

**ANALISIS FAKTOR PENINGKATAN “BRIDE TRAFFICKING” DARI
MYANMAR KE CHINA PADA TAHUN 2015-2017**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan
Peminatan *International Security and Peace.*



Oleh:

Putri Silvani

165120407111037

**PRODI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2020



LEMBAR PERSETUJUAN
ANALISIS FAKTOR PENINGKATAN “BRIDE TRAFFICKING”
DARI MYANMAR KE CHINA PADA TAHUN 2015 – 2017

SKRIPSI

Disusun oleh:

Putri Silvani

165120407111037

Telah disetujui oleh dosen pembimbing:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si

NIK. 2013098602142001

Ni Komang Desy Setyawati Arya Pinatih S.IP., M.Si

NIK. 2011028412302001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hubungan Internasional

Aswin Ariyanto Azis, S.IP, M.DevSt

NIP. 197802202010121001

LEMBAR PENGESAHAN

**ANALISIS FAKTOR PENINGKATAN “BRIDE TRAFFICKING”
DARI MYANMAR KE CHINA PADA TAHUN 2015 – 2017**

SKRIPSI

Disusun oleh:

Putri Silvani

165120407111037

Telah diuji dan dinyatakan **LULUS** dalam ujian sarjana pada tanggal 2
Januari 2020

Tim Penguji:

Ketua Majelis Penguji,

Sekretaris Majelis Penguji,

Dian Mutmainah

NIP. 197803192005012002

Anggota Majelis Penguji I,

Wishnu Mahendra W, S.IP., M.Si

NIK. 201708906281001

Anggota Majelis Penguji II,

Firstyarinda Valentina Indraswari, S.Sos., M.Si

NIK. 2013098602142001

Ni Komang Desy Setyawati Arya Pinatih S.IP., M.Si

NIK. 2011028412302001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak

NIP. 196908141994021001

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Putri Silvani

NIM : 165120407111037

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Faktor Peningkatan ‘Bride Trafficking’ Dari Myanmar Ke China Pada Tahun 2015 – 2017**” adalah hasil karya saya sendiri. Segala hal yang bukan merupakan tulisan saya telah diberikan catatan kaki dan kemudian ditunjukkan di dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik yaitu berupa pencabutan kelulusan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, Desember 2019

Putri Silvani

NIM. 165120407111037

**ANALISIS FAKTOR PENINGKATAN ‘BRIDE TRAFFICKING’ DARI
MYANMAR KE CHINA PADA TAHUN 2015 – 2017**

OLEH

PUTRI SILVANI

165120407111037

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja yang menjadi faktor peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015 - 2017 menggunakan teori *human trafficking* oleh Kevin Bales. *Bride trafficking* merupakan salah satu bentuk dari *human trafficking*. *Bride trafficking* merupakan istilah populer yang digunakan bagi para korban *human trafficking* yang dinikahkan secara paksa untuk memenuhi tugas rumah tangga ataupun memberikan keturunan dan korban menandatangani kekerasan seperti pelecehan, pemaksaan, perkosaan, hingga eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan diperoleh dari sumber data sekunder.

Kata kunci: *human trafficking*, *bride trafficking*, Cina, Myanmar.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Segi Akademis	9
1.4.2 Segi Praktis	9
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	10
2.1 Studi Terdahulu	11
2.1.1 <i>Human Trafficking in Burma and the Solutions Which Have Never Reached</i>	11
2.1.2 <i>Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan</i>	17
2.1.3 Tabel Posisi Penelitian Terhadap Studi Terdahulu	21
2.2 <i>Human Trafficking Theory</i> Oleh Kevin Bales	21
2.3 Operasionalisasi Teori	30
2.3.1 <i>Trafficking FROM a Country</i>	30
2.3.2 <i>Trafficking TO a Country</i>	33
2.4 Tabel Operasionalisasi Teori <i>Human Trafficking</i> oleh Kevin Bales	35
2.5 Alur Pemikiran	39
2.6 Hipotesis	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	41
3.3 Batasan Waktu Penelitian	42
3.4 Teknik Pengumpulan Data	42
3.5 Teknik Analisa Data	42
3.6 Sistematika Penulisan	43
BAB IV FENOMENA <i>BRIDE TRAFFICKING</i>	45

4.1 <i>Bride Trafficking</i> di Wilayah <i>Great Mekong Subregion</i> (GMS)	45
4.2 <i>Bride Trafficking</i> di Myanmar	50
4.3 <i>Bride Trafficking</i> di China	59
4.4 Upaya Pemberantasan <i>Bride Trafficking</i>	63
4.4.1 Pemerintah Myanmar	63
4.4.2 Kerjasama Pemerintah Myanmar dan Pemerintah China dalam Memberantas <i>Bride Trafficking</i>	64
BAB V FAKTOR PENINGKATAN BRIDE TRAFFICKING DARI MYANMAR KE CHINA PADA TAHUN 2015-2017	67
5.1 <i>Trafficking FROM a Country</i>	67
5.1.1 <i>Government Corruption</i>	68
5.1.2 <i>Infant Mortality</i>	74
5.1.3 <i>Percentage of Population Below Age 14</i>	78
5.1.4 <i>Food Production</i>	83
5.1.5 <i>Population Pressure</i>	88
5.1.6 <i>Conflict and Social Unrest</i>	93
5.2 <i>Trafficking TO a Country</i>	97
5.2.1 <i>Percentage of Male Population Age 60+</i>	98
5.2.2 <i>Government Corruption</i>	101
5.2.3 <i>Infant Mortality</i>	105
5.2.4 <i>Food Production</i>	110
5.2.5 <i>Energy Consumption</i>	114
BAB VI PENUTUP	118
6.1 Kesimpulan	118
6.2 Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	123

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Negara Myanmar 4

Gambar 2. Trafficking FROM a Country 25

Gambar 3. Trafficking TO a Country 28

Gambar 4. Peta Negara-Negara Greater Mekong Sub Region (GMS) 47

Gambar 5. Rute Bride Trafficking dari Negara-Negara GMS ke China 48

Gambar 6. Rute Human Trafficking dari Myanmar ke China 53

Gambar 7. Letak Kamp IDP Myanmar 58

Gambar 8. Diagram Indeks Korupsi Myanmar Tahun 2009 - 2018 69

Gambar 9. Grafik Populasi di bawah 14 tahun di Myanmar Pada Tahun 2015 – 2017 (%) 79

Gambar 10. Grafik Populasi Perempuan Myanmar Berumur 0 - 14 Tahun Pada Tahun 2015 – 2017 (%) 80

Gambar 11. Grafik Populasi Laki-Laki Myanmar Berumur 0 - 14 Tahun Pada Tahun 2015 -2017 81

Gambar 12. Grafik Populasi Perempuan Myanmar yang Bekerja di Sektor Pertanian Pada Tahun 2015 - 2017 86

Gambar 13. Diagram Tekanan Populasi di Myanmar Pada Tahun 2005 - 2017 89

Gambar 14. Grafik Presentase Populasi Perempuan Myanmar yang Tidak Memiliki Pekerjaan Pada Tahun 2015 – 2017 (%) 90

Gambar 15. Persentase Populasi Laki-Laki Yang Tidak Bekerja Pada Tahun 2015 - 2017 (%) 91

Gambar 16. Grafik Persentase Populasi Laki-Laki China Berusia diatas 60 Tahun Pada Tahun 2015 – 2017 (%) 99

Gambar 17. Grafik Indeks Korupsi China dari tahun 2009 - 2018 102

Gambar 18. Grafik Persentase Kematian Bayi China Pada Tahun 2015 – 2017 (%) 106

Gambar 19. Grafik Tingkat Kematian Bayi di China pada tahun 1990 - 2017 107

Gambar 20. Grafik Jangka Waktu Yang Dibutuhkan Negara dalam Mengatasi Tingkat Kematian Bayi 108

Gambar 21. Grafik Persentase Populasi Perempuan China yang Bekerja di Bidang Pertanian Pada Tahun 2015 – 2017 (%) 112

Gambar 22. Grafik Persentase Populasi Laki-Laki China yang Bekerja di Bidang Pertanian Pada Tahun 2015 – 2017 (%) 113

Gambar 23. Grafik Tingkat Konsumsi Energi China pada Tahun 1965 - 2015 116



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kasus ‘*Bride Trafficking*’ yang Terlapor dari Myanmar ke China Tahun 2010-2017 5

Tabel 2. Tabel Posisi Penelitian Terhadap Studi Terdahulu 21

Tabel 3. Tabel Operasionalisasi Teori Human Trafficking oleh Kevin Bales 35

Tabel 4. Tabel Definisi Istilah Kata yang Digunakan 46

Tabel 5. Tabel Tingkat Kematian Bayi di Myanmar Tahun 2010 – 2019 (%) 75

Tabel 6. Zona Agro-Ekologis Utama Myanmar (NBSAP 2011) 84

Tabel 7. Proporsi Populasi China Berdasarkan Umur 100



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kegiatan dari kejahatan transnasional yang disebutkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* di dalam kategori *identity-related crime*¹. Aktivitas *human trafficking* paling banyak ditemukan di wilayah *Greater Mekong Sub-Region* (GMS) yaitu suatu wilayah yang berisi negara-negara yang dialiri oleh Sungai Mekong.

Terdapat enam negara di dalam wilayah GMS yaitu China, Myanmar, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Wilayah GMS merupakan wilayah dengan aktivitas *human trafficking* tertinggi di dunia dimana sebanyak 11,7 juta manusia menjadi korban *human trafficking* yang merupakan 66% dari total kasus *human trafficking* di dunia². Beberapa bentuk *human trafficking* yang ada di wilayah ini yaitu kerja paksa, eksploitasi seksual untuk *sex tourism*, pengemis, hingga *bride trafficking*.

Bride trafficking merupakan salah satu bentuk dari *human trafficking*. *Bride trafficking* merupakan istilah populer yang digunakan bagi para korban *human trafficking* yang dinikahkan secara paksa untuk memenuhi tugas rumah tangga ataupun memberikan keturunan dan korban mendapatkan kekerasan seperti pelecehan,

¹ UNODC, "Emerging Crimes", diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/emerging-crimes.html> pada tanggal 4 September 2019.

² The Jakarta Post, "Vietnam Faces Growing Human Trafficking to China", diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/seasia/2016/10/24/vietnam-faces-growing-human-trafficking-to-china.html> pada tanggal 6 September 2019.

pemaksaan, perkosaan, hingga eksploitasi. Menurut UNODC, kasus *bride trafficking* paling banyak ditemukan di empat negara yang berada di wilayah GMS yaitu Kamboja, China, Myanmar dan Vietnam³.

Pada tahun 2012-2017, estimasi jumlah korban *bride trafficking* dari negara Vietnam ke China diperkirakan sejumlah 3.000 korban⁴. Sedangkan, di negara Kamboja pada tahun 2013-2015 estimasi jumlah korban *bride trafficking* ke China diperkirakan sejumlah 164 korban⁵. Di Myanmar sendiri pada tahun 2013-2017 diperkirakan korban *human trafficking* ke China mencapai 3.900 korban⁶. Bisa kita lihat bahwa rata-rata per tahunnya dari Vietnam ke China 500 korban per tahun, dari Kamboja ke China 55 korban per tahun, dan Myanmar ke China 780 korban. Maka dari itu, dapat kita tarik kesimpulan bahwa kasus *bride trafficking* paling tinggi berada di Myanmar ke China.

Negara destinasi *bride trafficking* dari Myanmar tidak hanya ke China, namun juga terdapat kasus yang negara destinasinya adalah Malaysia. Dimana sebagian besar

³ The ASEAN Post, "Myanmar's Trafficked Brides", diakses melalui <https://theaseanpost.com/article/myanmars-trafficked-brides> pada tanggal 11 September 2019.

⁴ Desmond Ng, "Raped, Beaten, and Sold in China: Vietnam's Kidnapped Young Brides", diakses melalui <https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/vietnam-kidnapped-brides-trafficking-china-wives-11777162> pada tanggal 11 September 2019.

⁵ Lauren Crothers, "China, Cambodia Urged to Tackle Forced Marriage Problem", diakses melalui <https://www.aa.com.tr/en/anadolu-post/china-cambodia-urged-to-tackle-forced-marriage-problem/637292> pada tanggal 11 September 2019.

⁶ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health dan KWAT, "Estimating Trafficking of Myanmar Women for Forced Marriage and Childbearing in China", diakses melalui https://www.jhsph.edu/departments/international-health/news/_publications/Myanmar-forced-marriage-report-embargoed-until-07-Dec-2018.pdf pada tanggal 13 September 2019.

korbannya berasal dari Myanmar yaitu daerah Rohingya⁷. Namun, penulis tidak menemukan data pasti mengenai jumlah korban maupun kasus *bride trafficking* dari Myanmar ke Malaysia, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus *bride trafficking* dari Myanmar ke China merupakan kasus *bride trafficking* tertinggi yang ada di dunia.

Myanmar merupakan negara multikultural di Asia Tenggara yang memiliki penduduk dengan etnis yang sangat beragam. Menurut *World Population Review*, terdapat 135 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar dimana populasi Myanmar didominasi oleh etnis Bamar sebanyak 68%, Shan 10%, Kayin 7%, Rakhine 4%, Chinese 3%, dan sisanya merupakan etnis minoritas seperti Mon, Indian, Kachin, Chin, Anglo-Indians, Nepali, dan Anglo Burmese⁸. Meskipun sebagai etnis minoritas, namun ciri khas, budaya, dan bahasa yang dimiliki masing-masing etnis sangat dijunjung tinggi sehingga terbentuk identitas yang sangat kuat dalam setiap etnis. Myanmar dan China memiliki perbatasan darat yang berada tepat di negara bagian Kachin, Myanmar dan Provinsi Yunnan, China.

⁷ Rozanna Latiff dan Ebrahim Harris, "Sold Into Marriage – how Rohingya Girls Become Child Brides in Malaysia", diakses melalui <https://www.reuters.com/article/uk-myanmar-rohingya-childbrides-insight-idUSKBN15U009> pada tanggal 10 Oktober 2019.

⁸ World Population Review, "Myanmar Population 2019", diakses melalui <http://worldpopulationreview.com/countries/myanmar-population/> pada tanggal 23 Agustus 2019.

Gambar 1. Peta Negara Myanmar



Sumber: <https://www.economist.com/asia/2015/03/12/the-han-that-rock-the-cradle>

Gambar 1 diatas merupakan gambar peta Myanmar yang memiliki perbatasan dengan China yaitu terletak di negara bagian Kachin dan Provinsi Yunnan. China sendiri memiliki populasi sebanyak 1,43 milyar jiwa yang menjadikan China sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia⁹. Pada kasus *bride trafficking*, China merupakan negara destinasi korban dari berbagai negara. Berikut merupakan data jumlah kasus *bride trafficking* yang terlapor ke *Myanmar Department of Social Welfare* dari Myanmar ke China:

⁹ World Population Review, "China Population 2019", diakses melalui <http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/> pada tanggal 6 September 2019.

Tabel 1. Jumlah Kasus ‘Bride Trafficking’ yang Terlapor dari Myanmar ke China Tahun 2010-2017

No	Year	Number Reaccepted		Total
		Below 18 Years	Above 18 Years	
1	2010	29	135	164
2	2011	16	122	138
3	2012	26	127	153
4	2013	17	122	139
5	2014	15	119	134
6	2015	18	82	100
7	2016	25	81	106
8	2017	39	142	181
Total		185	930	1115

Sumber: Give Us A Baby and We'll Let You Go, Trafficking of Kachin "Brides" from Myanmar to China, 2019.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah kasus dari tahun 2010-2017 terus mencapai angka 100. Kemudian, bisa dilihat juga bahwa terjadi peningkatan jumlah kasus pada tahun 2015 sampai 2017. Setiap kasus yang terlapor ini juga bisa memiliki jumlah korban yang berbeda. Maka dari itu, data jumlah kasus tersebut hanyalah permukaan dari keseluruhan total jumlah korban yang sebenarnya serta tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah korban *bride trafficking* sebenarnya jauh lebih banyak daripada jumlah kasus yang terlapor. Sedikitnya kasus *bride trafficking* yang terlapor ini dikarenakan banyak korban hilang dan tidak bisa ditemukan, operasi yang dilakukan tidak terdeteksi, serta banyak korban yang tidak berani melapor karena takut

akan stigma yang akan diterima dari masyarakat ketika kembali di daerah asal, sehingga tidak seluruh korban melaporkan kasusnya¹⁰.

Modus operandi *bride trafficking* ini berbeda dengan kasus *human trafficking* pada umumnya. Pada awal mulanya, korban dijanjikan pekerjaan dengan upah yang menjanjikan oleh pelaku hingga kemudian korban setuju untuk ikut dengan pelaku. Kemudian, pada saat perjalanannya pelaku memberikan obat untuk membius atau menidurkan korban sehingga korban tidak sadarkan diri. Pada saat korban tidak memiliki kendali atas dirinya sendiri, korban kemudian dibawa ke China dalam keadaan tidak sadar, tepatnya di rumah pembeli. Sesampainya di rumah pembeli, korban dipaksa masuk ke rumah pembeli dan di kurung di dalamnya. Pelaku pun mendapatkan upah atau biaya yang telah disepakati dengan pembeli dengan estimasi harga 3.000 sampai 13.000 Dolar Amerika¹¹. Pada prosesnya, korban ditipu, dan seringkali korban mendapatkan kekerasan dari pelaku maupun pembeli apabila korban tidak mengikuti kemauan pelaku dan pembeli. Sehingga, aktivitas ini termasuk ke dalam *human trafficking*.

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime*, perbedaan *human trafficking* dan *people smuggling* pada kasus *bride trafficking* yang termasuk dalam *forced marriage* terletak pada kesediaan korban, apabila korban mengalami penipuan,

¹⁰ Human Rights Watch, "Give Us A Baby and We'll Let You Go", diakses dari <https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china> pada tanggal 25 Agustus 2019.

¹¹ Heather Barr, "It's A Booming Business: Trafficking Myanmar Brides in China", diakses dari <https://www.hrw.org/news/2019/03/21/its-booming-business-trafficking-myanmar-brides-china> pada tanggal 26 Agustus 2019.

pemaksaan kehendak, atau terjadinya kekerasan maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan menjadi *human trafficking*¹². Pada operasi *people smuggling*, transaksi dilakukan oleh korban dengan pelaku. Korban merupakan orang-orang yang memberikan persetujuan untuk berpindah ke negara lain dengan melakukan transaksi untuk dapat melakukan operasinya. Namun, pada operasi *human trafficking*, transaksi dilakukan oleh pelaku dan pembeli. Pembeli pada operasi *human trafficking* merupakan orang atau kelompok yang membeli atau membayar sejumlah uang kepada pelaku untuk mendapatkan korban dengan tujuan mengeksploitasi tanpa mendapatkan persetujuan korban. Apabila dilihat dari proses dari awal rekrutmen, hingga akhirnya sampai di rumah pembeli, penulis melihat dan memahami bahwa pada operasi *bride trafficking* terjadi transisi dari *people smuggling* ke *human trafficking*. Adanya transisi ini dikarenakan pada proses rekrutmennya, korban memberikan persetujuan untuk ikut dengan pelaku karena dijanjikan pekerjaan dengan upah yang besar, namun kemudian terjadi transisi ke *human trafficking* karena korban diberikan obat atau dibius sehingga korban kehilangan kendali atas dirinya, dan ketika korban sampai di tempat pembeli, korban dipekerjakan atau diperlakukan atas paksaan dan tanpa persetujuan dari korban serta mendapatkan kekerasan apabila tidak menuruti pelaku ataupun pembeli.

Untuk memberantas permasalahan *human trafficking*, Myanmar telah menetapkan *Anti-Trafficking in Persons Law* pada tahun 2005. Kemudian, beberapa upaya lainnya untuk memberantas *human trafficking* seperti membentuk *Border*

¹² UNODC, "Forced Marriage", diakses dari <https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-11/key-issues/som-or-tip--forced-marriage.html> pada tanggal 11 September 2019.

Liaison Offices (BLO) pada tahun 2013 dengan China untuk memberantas *people smuggling* dan kejahatan lingkungan yang terjadi di perbatasan¹³. Selain itu, Pemerintah Myanmar juga membuat pasukan polisi yang disebut *Anti-Trafficking in Persons Division* pada tahun 2013 dibawah pengawasan langsung *Central Body for Suppression of Trafficking in Persons* (CBTIP) yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri yang dimiliki oleh Pemerintah Myanmar¹⁴. Namun, melihat jumlah korban dan kasus yang terus tinggi dan terdapat peningkatan dari tahun 2015-2017, membuktikan bahwa upaya yang telah dilakukan belum cukup maksimal.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis melihat bahwa isu *Bride Trafficking* dari Myanmar ke China merupakan isu yang sangat penting untuk diteliti karena merupakan salah satu bentuk aktivitas dari *Transnational Organized Crime* (TOC). Kemudian, Myanmar juga menjadi negara yang kasus *bride trafficking* nya paling tinggi diantara negara Sub Mekong Region lainnya. Selain itu, ditemukan juga bahwa terjadi peningkatan jumlah korban *bride trafficking* di Myanmar pada tahun 2015 sampai 2017. Maka dari itu, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan apa saja yang menjadi faktor-faktor peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017 menggunakan teori *human trafficking* oleh Kevin Bales.

¹³ UN-ACT, "Myanmar", diakses dari <http://un-act.org/myanmar/> pada tanggal 17 September 2019.

¹⁴ *Ibid.*

1.2 Rumusan Masalah

Apa saja faktor terjadinya peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisa apa saja yang menjadi faktor peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Segi Akademis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil pemahaman apa saja faktor peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khusus nya studi Hubungan Internasional di masa depan.

1.4.2 Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat melalui hasil dari penelitian ini, serta dapat memberikan kontribusi terkait pengetahuan lebih lanjut terkait isu *human trafficking* khususnya *bride trafficking* dari Myanmar ke China.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

Human trafficking atau perdagangan manusia merupakan salah satu kegiatan dari kejahatan transnasional yang disebutkan oleh *United Nations Office on Drugs and Crime* di dalam kategori *identity-related crime*¹⁵. Pada kategori tersebut, disebutkan beberapa kegiatan kejahatan transnasional dimana para pelaku mendapatkan atau memiliki identitas korban yang digunakan untuk pencucian uang, melakukan penipuan demi melakukan kegiatan ilegal seperti korupsi, perdagangan manusia (*human trafficking*), penyelundupan migran, hingga terorisme¹⁶.

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan studi terdahulu yang bertujuan untuk melihat dan membandingkan studi terdahulu mengenai kasus *bride trafficking* dari Myanmar ke China, untuk melihat lebih menyeluruh mengenai kasus ini menggunakan perspektif lain secara ilmiah. Kemudian, penulis akan menjelaskan teori *Human Trafficking* menurut Kevin Bales yang akan penulis gunakan untuk meneliti kasus yang penulis angkat. Pada bab ini pula penulis akan mengoperasionalisasikan teori tersebut dengan kasus yang akan penulis teliti. Terakhir, pada bab ini penulis akan menjelaskan alur pemikiran dan argumentasi penelitian.

¹⁵ UNODC, "*Emerging Crimes*", diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/emerging-crimes.html> pada tanggal 4 September 2019.

¹⁶ UNODC, "*Economic Fraud and Identity-Related Crime*", diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/identity-related-crime.html> pada tanggal 4 September 2019.

2.1 Studi Terdahulu

Penulis akan menggunakan dua studi terdahulu untuk memahami dan membandingkan dengan kasus yang akan penulis teliti. Studi terdahulu yang pertama, penulis akan menggunakan artikel jurnal berjudul “*Human Trafficking in Burma and the Solutions Which Have Never Reached*” karya Thanawat Pimoljinda dan Apiradee Thianthong. Pada artikel jurnal ini, penulis akan melihat dan membandingkan bagaimana pembahasan mengenai kasus *bride trafficking* yang ada di Myanmar menggunakan perspektif lain.

Studi terdahulu kedua yang akan penulis gunakan yaitu artikel jurnal berjudul “*Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan*” karya Paul Capobianco. Dengan menggunakan artikel jurnal ini, penulis akan membandingkan bagaimana Paul mengaplikasikan teori *Human Trafficking* karya Kevin Bales kedalam studi kasus di negara Jepang.

2.1.1 *Human Trafficking in Burma and the Solutions Which Have Never Reached*

Pada artikel jurnal ini, Pimoljinda dan Thianthong menjelaskan bagaimana situasi *human trafficking* di Burma secara umum melalui empat sub-topik. Pada bagian pertama, Pimoljinda dan Thianthong menjelaskan gambaran umum mengenai konflik internal yang ada di dalam pemerintahan Myanmar. Menurut Pimoljinda dan Thianthong, terjadinya kegiatan *human trafficking* yang ada di dalam suatu negara

memiliki faktor determinan yang dipengaruhi oleh keadaan nasional serta politik, ekonomi, serta sosial regional suatu negara¹⁷.

Pada sub-topik yang pertama, Pimoljinda dan Thianthong menjelaskan keadaan *human trafficking* di Myanmar secara umum. Pimoljinda dan Thianthong menyatakan

bahwa salah satu hal yang menjadi pendorong kegiatan *human trafficking* di Myanmar adalah diskriminasi politik yang dialami masyarakat etnis minoritas¹⁸. Karena adanya

diskriminasi politik ini, masyarakat etnis minoritas di Myanmar menginginkan otonomi khusus, hingga kemerdekaan dari dominasi etnis mayoritas Myanmar yaitu

“*the Burmese*”. Diskriminasi yang dialami oleh masyarakat etnis minoritas Myanmar

dilakukan oleh *Tatmadaw* (pasukan militer Burma), dimana hal inilah yang

menyebabkan banyaknya masyarakat minoritas Myanmar yang terpaksa melarikan diri

dari tempat tinggalnya. Menurut Pimoljinda dan Thianthong, banyaknya masyarakat

etnis minoritas Myanmar yang melarikan diri dari tempat tinggalnya ke tempat lain

atau bermigrasi ke negara lain juga dikarenakan oleh kegagalan lembaga yang dibentuk

pemerintah Myanmar yang berfungsi untuk menegakkan hak asasi manusia terutama

untuk perempuan dan anak-anak¹⁹. Lembaga yang dimaksud seperti *Myanmar*

Maternal and Child Welfare Association (MMCWA), *Myanmar Women*

Entrepreneurs' Association (MWEA), dan *Myanmar Women Sports Federation*

(MWSF). Hal ini dikarenakan meskipun lembaga-lembaga ini telah berusaha untuk

¹⁷ Thanawat Pimoljinda & Apiradee Thianthong, “*Human Trafficking in Burma and the Solution Which Have Never Reached*”, *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol.1 No.3, 2010, Hal. 525.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 528.

¹⁹ *Ibid.* Hal. 530

melakukan fungsinya, namun pemerintah junta terus melangsungkan kampanye ofensif yang pada akhirnya menyebabkan perpindahan paksa, penghancuran rumah serta properti warga, dan pembunuhan ekstra-yudisial²⁰. Maka dari itu, masyarakat etnis minoritas tidak hanya mengalami marginalisasi di bidang ekonomi saja, namun juga mendapat tekanan dalam mendapatkan hak sosial dan budaya.

Pada sub-topik kedua, Pimoljinda dan Thianthong menjelaskan bagaimana mekanisme institusional ASEAN dalam mengatasi *human trafficking* di negara-negara ASEAN. Sejak tahun 1997, ASEAN sebagai organisasi regional telah berusaha mengambil tindakan tegas untuk mengatasi kejahatan transnasional khususnya *human trafficking* terhadap perempuan dan anak-anak, maka dari itu sudah banyak perjanjian yang dibuat oleh ASEAN. Kemudian, pada tahun 2005 ASEAN menandatangani deklarasi Piagam ASEAN di Kuala Lumpur. Piagam ini pada dasarnya berisi tentang konsep *ASEAN Way* yaitu penanganan masalah menggunakan cara ASEAN dimana bersifat informal dan melalui prosedur yang tidak legalistic. Hal ini dikarenakan banyak diplomat ASEAN yang menyatakan pendapat bahwa ketika terjadi suatu permasalahan yang menyangkut hak asasi manusia di salah satu negara ASEAN, tidak sepatutnya untuk dibantu dengan intervensi, namun cukup dengan menjaga negara tersebut dari campur tangan negara lain. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa penanganan daripada permasalahan hak asasi manusia di dalam suatu negara hanya dapat diatasi oleh negara tersebut berdasarkan yuridiksi yang ada. Pimoljinda dan Thianthong mengkritik hal ini, menyatakan bahwa ASEAN sebagai organisasi regional

²⁰ *Ibid.* Hal. 531

telah membina jaringan transnasional, namun belum bisa menjadi institusi yang dapat membuat kebijakan seperti yang seharusnya sebuah organisasi regional lakukan²¹.

Kritik lainnya adalah yaitu ASEAN masih berfokus pada kerjasama ekonomi untuk meningkatkan perkembangan ekonomi negara ASEAN²². Kemudian Pimoljinda dan Thianthong juga berpendapat bahwa negara-negara ASEAN belum dapat melihat permasalahan *human trafficking* ini melalui perspektif holistik sehingga belum mencapai pendekatan yang sinergis untuk mengatasi permasalahan ini²³.

Pada sub-topik ke tiga, Pimoljinda dan Thianthong membahas tentang bagaimana kekuatan eksternal atau kekuatan dari negara lain juga mempengaruhi keadaan *human trafficking* di Myanmar. Pada sub-topik ini dijelaskan bahwa Myanmar memiliki hubungan yang cukup erat dengan China dan India, didukung dengan perluasan jaringan perdagangan. Kemudian dinyatakan bahwa penyebab Beijing dan New Delhi mendukung *State Peace and Development Council* (SPDC) adalah dikarenakan stabilitas di dalam Myanmar memfasilitasi kepentingan kedua negara. Myanmar dan China memiliki kerjasama di bidang konstruksi pipa minyak dan gas yang tersambung dari Arakan (negara bagian di Myanmar) ke China. Kemudian, Myanmar dan India juga memiliki kerjasama dalam berbagai projek konstruksi. India maupun China juga memperkuat SPDC dengan memberikan bantuan keuangan dan militer seperti menyokong persenjataan. Dengan adanya hubungan timbal balik ini, Beijing dan New Delhi seolah-olah menutup kuping terkait permasalahan isu hak asasi

²¹ *Ibid.* Hal. 535

²² *Ibid.* Hal. 534

²³ *Ibid.*

manusia dan demokrasi yang ada di Myanmar. Pimoljinda dan Thianthong berpendapat bahwa kehadiran China dan India dengan adanya hubungan non-intervensi dan penolakan kedua negara dalam memberikan sanksi kepada Myanmar memungkinkan SPDC untuk meningkatkan daya politik dan ekonomi di Myanmar, serta memperburuk situasi *human security* dan tentunya isu *human trafficking* yang ada di Myanmar²⁴.

Pada sub-topik keempat, menjelaskan bagaimana tekanan dari luar yaitu dari pemerintah Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada masa perang Vietnam, negara barat mendukung pemerintah otoriter selama mereka mempromosikan stabilitas politik dan anti komunis. Namun, setelah perang dingin kebijakan luar negeri Amerika Serikat berubah melihat pergantian pola persaingan kekuatan besar baru dari China dan India. Amerika Serikat kemudian semakin khawatir akan pengaruh yang diberikan China dan India terhadap Myanmar. Setelah diobservasi, dapat dilihat bahwa kepentingan Amerika Serikat tidak hanya terhadap pergantian politik di dalam Myanmar, namun berbagai isu keamanan seperti arus narkotika, kekerasan dalam isu hak asasi manusia yang merajalela, dan tingginya angka populasi pengungsi di negara tetangga²⁵.

Selanjutnya, setelah Myanmar menjadi anggota dari *Asia-Europe Meeting* (ASEM), pemerintahan junta Myanmar yang otoriter mendapatkan kritikan yang cukup besar dari Uni Eropa, dan menghasilkan sanksi yang diberikan kepada pemerintah Myanmar yaitu larangan berpergian untuk pemimpin junta, anggota pengadilan, aktor politik yang berhubungan dengan junta, pembekuan aset, hingga larangan ekspor untuk

²⁴ *Ibid.* Hal. 537

²⁵ *Ibid.* Hal. 539

industri kayu, logam, dan bahan konstruksi²⁶. Kemudian, ASEAN dan Uni Eropa juga bersepakat untuk melanjutkan dialog mengenai Myanmar seperti bagaimana memberikan bantuan asistensi untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi yang ada di Myanmar.

Dari artikel jurnal ini, penulis dapat memahami bagaimana isu *human trafficking* yang ada di Myanmar ini juga dapat didorong dari faktor eksternal Myanmar seperti tidak efektifnya ASEAN sebagai organisasi regional dalam mengatasi *human trafficking* di Myanmar, adanya kepentingan negara lain seperti China dan India yang malah memperkuat pemerintahan otoriter Myanmar dan menutup kuping terkait isu *human trafficking*, serta bagaimana tekanan eksternal lainnya seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam memberikan sanksi kepada pemerintahan Myanmar dengan tujuan membantu mengatasi isu hak asasi manusia yang ada di Myanmar.

Persamaan yang dimiliki penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah terletak pada subjek penelitian yaitu Myanmar dan bagaimana China memiliki pengaruh pada kasus *human trafficking* yang ada di Myanmar. Sedangkan, perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak di bagaimana sudut pandang penelitian. Penelitian yang dilakukan Pimoljinda dan Thianthong memandang bagaimana peran eksternal memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap *human trafficking* yang ada di Myanmar. Bisa dilihat dari tidak efektifnya ASEAN sebagai organisasi regional dalam membantu memberantas kasus *human trafficking*, kemudian pengaruh kerjasama ekonomi India dan China bersama Myanmar sehingga kasus

²⁶ *Ibid.* Hal. 539

human trafficking ini terus mudah beroperasi, peran Amerika Serikat dan Uni Eropa dalam memberikan sanksi guna memicu pemerintah Myanmar untuk memberantas kasus *human trafficking*, hingga sejarah konflik yang ada di Myanmar khususnya daerah Kachin sehingga membantu penulis untuk memahami gambaran secara umum situasi konflik di Kachin dan diharapkan dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian.

2.1.2 Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan

Pada artikel jurnal ini, Paul Capabianco menggunakan teori *Human Trafficking* oleh Kevin Bales untuk mengaplikasikan pada kasus *human trafficking* yang ada di Jepang. Di dalam tulisannya, Paul berusaha menjelaskan apa yang menjadi faktor pendorong *human trafficking* di Jepang menggunakan teori dari Kevin Bales. Kemudian Paul berharap bertujuan untuk melihat dan memahami lebih dalam bagaimana dinamika faktor penarik dan faktor pendorong di balik kegiatan *human trafficking* di Jepang.

Dalam tulisannya, Paul hanya menganalisis beberapa aspek dari teori Kevin Bales yang dirasa relevan apabila diaplikasikan kedalam kasus *human trafficking* di Jepang. Paul berpendapat bahwa keseluruhan aspek dari teori Kevin Bales tidak relevan dengan situasi *human trafficking* di Jepang, sehingga dirasa sia-sia apabila keseluruhan aspek tersebut dianalisis²⁷.

²⁷ Paul Capabianco, "Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan", *Virginia Review of Asian Studies*, Hal. 82.

Sebelum menganalisis, tentunya diperlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai situasi *human trafficking* yang ada di Jepang. Paul menjelaskan bahwa Jepang merupakan salah satu negara yang masalah *human trafficking* nya cukup tinggi, hal ini didukung dengan sedikitnya respon pemerintah Jepang mengenai isu *human trafficking* ini²⁸. Mayoritas korban dari *human trafficking* yang ada di Jepang adalah perempuan dan anak-anak, dimana para korban tersebut dieksploitasi untuk industri entertainment yang dimana mereka ditahan dalam kondisi terjerat dalam hutang. Para pelaku mengetahui keadaan ekonomi dan keluarga korban sehingga informasi tersebut digunakan sewaktu-waktu untuk mengancam korban sehingga korban terpaksa mengikuti perintah pelaku. Selain itu, bentuk lain dari eksploitasi *human trafficking* yang ada di Jepang yaitu pekerjaan rumah tangga, agrikultur, konstruksi atau pembangunan, dan manufaktur²⁹.

Setelah memahami kondisi *human trafficking* yang ada di Jepang, Paul kemudian menganalisis menggunakan determinan tiga faktor mendasar yang mendukung terjadinya *human trafficking*, dan *trafficking to a country* karena Paul mengidentifikasi Jepang sebagai negara destinasi atau penerima *human trafficking*.

Menurut Paul, dari tiga faktor mendasar yang mendukung terjadinya *human trafficking* di Jepang hanya dua faktor yang dapat diaplikasikan yaitu faktor (2), dan (3)³⁰. Faktor (2) menjelaskan bagaimana negara destinasi *human trafficking* memiliki permintaan yang tak ada habisnya terhadap jasa korban *human trafficking*. Pada faktor

²⁸ *Ibid.* Hal. 83

²⁹ *Ibid.* Hal. 83

³⁰ *Ibid.* Hal. 84

ini, Paul mengidentifikasi bahwa mayoritas korban *human trafficking* yang dikirim ke Jepang akan dieksploitasi untuk industri entertainmen seperti *brothels*, klub striptis, panti pijat, hingga prostitusi. Hal ini menciptakan peluang bagi pelaku *human trafficking* untuk merekrut dan menggunakan korban dikarenakan tingkat permintaan yang cukup tinggi. Faktor (3) menjelaskan bagaimana organisasi kriminal yang ada di dalam negeri, mengatur situasi *supply and demand* dan mengeksploitasi korban *human trafficking* untuk menguntungkan diri sendiri. Paul mengidentifikasi dari hasil analisisnya bahwa adanya keterlibatan organisasi kriminal dalam *human trafficking* yang ada di Jepang, dimana Yakuza berperan secara langsung dalam rekrutmen perdagangan perempuan di Jepang sehingga memperkuat peran organisasi kriminal dalam perekrutan, menyembunyikan, serta memindahkan korban *human trafficking*.

Selanjutnya Paul menganalisis kasus *human trafficking* di Jepang menggunakan determinan *trafficking to a country*, dimana Jepang sebagai negara destinasi atau penerima *human trafficking*. Terdapat 5 faktor yang ada di dalamnya, yaitu tingkat korupsi, jumlah persen masyarakat laki-laki berumur diatas 60 tahun, produksi makanan, tingkat kematian bayi, dan produksi energy. Hasil analisis dari pengaplikasian kasus *human trafficking* di Jepang menggunakan teori Kevin Bales beragam, Paul tidak menemukan bukti yang cukup kuat mengenai tingkat korupsi yang ada di Jepang, kemudian jumlah persen masyarakat laki-laki yang berumur diatas 60 tahun dan tingkat kematian bayi dapat merepresentasikan keadaan ekonomi Jepang yang mendukung teori Kevin Bales, namun meskipun hasil analisis produksi makanan

yang ada di Jepang tidak sesuai dengan teori Kevin Bales, aspek lain dari sisi ekonomi Jepang dapat menunjukkan tingkat ekonomi di Jepang³¹.

Menurut Paul, hasil akhir dari analisisnya mengenai *human trafficking* yang ada di Jepang menggunakan teori *human trafficking* dari Kevin Bales adalah adanya ketidaksesuaian ketika diaplikasikan menggunakan kasus di Jepang³². Sehingga untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih mendalam, teori ini perlu diuji lebih lanjut.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada penggunaan teori yang sama, yaitu teori *Human Trafficking* dari Kevin Bales. Maka dari itu, studi ini berguna bagi penulis untuk memahami lebih dalam bagaimana mengaplikasikan teori ini pada kasus yang akan penulis teliti. Sedangkan, perbedaan dari penelitian ini dan penelitian yang akan penulis lakukan adalah subjek penelitiannya yaitu di artikel jurnal ini meneliti kasus *human trafficking* di Jepang.

Selain itu, pada artikel jurnal ini juga membahas *human trafficking* di Jepang secara umum, tidak terkhusus *bride trafficking* seperti penelitian yang akan penulis lakukan.

Dan terakhir, penelitian ini juga hanya berfokus pada satu variabel yaitu *Trafficking TO a Country* karena Paul sebagai penulis mengidentifikasi Jepang sebagai negara destinasi.

³¹ *Ibid.* Hal. 87-89

³² *Ibid.* Hal. 91.

2.1.3 Tabel Posisi Penelitian Terhadap Studi Terdahulu

Tabel 2. Tabel Posisi Penelitian Terhadap Studi Terdahulu

No.	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Thanawat Pimoljinda & Apiradee Thianthong. <i>Human Trafficking in Burma and the Solutions Which Have Never Reached</i>	Artikel jurnal ini membahas tentang keadaan <i>human trafficking</i> yang ada di Myanmar, serta bagaimana adanya negara China sebagai negara destinasi yang memberikan pengaruh pada kasus <i>human trafficking</i> yang ada di Myanmar.	Artikel jurnal ini membahas bagaimana pihak eksternal (ASEAN, Uni Eropa, Amerika Serikat, serta China dan India) memberikan pengaruh pada kasus <i>human trafficking</i> yang ada di Myanmar.
2.	Paul Capabianco. <i>Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan</i>	Artikel jurnal ini menggunakan teori yang sama yaitu teori <i>Human Trafficking</i> dari Kevin Bales	Artikel jurnal ini mengaplikasikan teori Kevin Bales menggunakan studi kasus <i>human trafficking</i> di Jepang.

2.2 *Human Trafficking Theory* Oleh Kevin Bales

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan teori dari Kevin Bales dengan judul ‘*What Predicts Human Trafficking*’ dalam salah satu artikel jurnal Smith yang diterbitkan pada tahun 2007 dengan judul “*International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice*”. Dalam tulisannya, Bales menjelaskan terlebih dahulu bahwa terdapat berbagai macam faktor, sebab dan akibat yang ada dalam *human*

trafficking, sehingga jawaban dari apa saja penyebab *human trafficking* menjadi begitu beragam. Namun terdapat beberapa poin yang seragam akan jawaban dari pertanyaan tersebut, yaitu keserakahan dari pelaku, tekanan ekonomi, ketidakseimbangan negara dalam politis dan transisi, serta faktor sosial dan budaya³³.

Bales kemudian menjelaskan definisi *human trafficking* yang beliau kutip dari Artikel 3 dalam *The Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children* yaitu ‘kegiatan dimana adanya rekrutmen, transportasi, transfer, menyembunyikan, atau menerima seseorang secara paksa dengan menggunakan kekerasan, memanfaatkan kelemahan, memberikan keuntungan untuk korban yang berada di bawah kontrol dengan tujuan eksploitasi termasuk prostitusi, eksploitasi seksual, buruh paksa, perbudakan atau aktivitas yang menyerupai, dan mengambil bagian dari organ tubuh manusia, kemudian persetujuan dari korban tidak relevan karena aktivitas tersebut ilegal dan tetap, namun hukum tindak pidana tetap berjalan untuk melindungi korban³⁴. Bales menekankan bahwa definisi dari *human trafficking* tersebut tidak dijadikan sebagai satu-satunya hal dalam mendefinisikan apa itu sebenarnya *human trafficking*. Definisi ini diperlukan untuk membantu aktor-aktor baik nasional maupun internasional untuk dapat memiliki pemahaman serupa tentang apa itu sebenarnya *human trafficking*. Namun kembali lagi, definisi diatas tidak dapat dijadikan satu-satunya alat acuan untuk memahami apa itu *human trafficking* karena

³³ Kevin Bales, “*What Predicts Human Trafficking?*”, Hal.1 diakses dari <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01924036.2007.9678771> pada tanggal 29 Agustus 2019.

³⁴ *Ibid.* Hal. 3

ruang lingkungannya yang terbatas. Maka dari itu, Bales melihat bahwa Protokol dari Konvensi ini ditujukan untuk mencegah dan melawan, serta menjadi fasilitas kerjasama internasional dalam melawan *human trafficking*³⁵.

Bales juga mengemukakan bahwa negara seharusnya melawan *human trafficking* dengan pandangan kriminologisnya masing-masing dalam bentuk eksploitasi apapun³⁶. Pada pernyataan ini Bales menjelaskan bahwa bentuk dari *human trafficking* tidak selalu lintas batas negara, karena banyak pelaku yang tidak berasal dari organisasi kriminal sehingga penegakan hukum nasional, strategi, dan jasa dalam merespon korban dari segala bentuk eksploitasi *human trafficking* sangat penting.

Bales berpendapat bahwa ketika negara-negara sudah sepakat akan definisi dari apa itu *human trafficking*, maka langkah selanjutnya adalah memahami faktor pendorong *human trafficking* tersebut dapat terjadi³⁷. Kemudian Bales memaparkan metode melalui variasi antara kedua negara yaitu negara asal dan negara tujuan untuk melihat faktor *push and pull* dari aktivitas *human trafficking*. Metode ini berdasarkan informasi yang beliau peroleh dari *United Nations Statical HandBook* dan 76 variabel data lainnya, termasuk: aktivitas ekonomi, konsumsi energi, mengukur kesehatan, produksi makanan, pergerakan turis, distribusi populasi dengan sektor industri, profil populasi, jaringan kendaraan dan telfon per kapita, GDP per kapita, perkembangan penduduk baik di desa maupun di kota, batas sensor, tingkat korupsi di pemerintahan, beban hutang negara, index kebebasan masyarakat dan politik, tingkat kerusuhan

³⁵ *Ibid.* Hal. 3

³⁶ *Ibid.* Hal. 4

³⁷ *Ibid.* Hal. 4

konflik sosial di suatu negara³⁸. Kemudian Bales menambahkan tiga variabel dari hasil penelitiannya yaitu jumlah perbudakan yang ada di negara tersebut, jumlah perdagangan manusia yang ada di negara asal, serta jumlah korban perdagangan manusia di negara destinasi³⁹.

Berdasarkan data dan hasil dari penelitian yang telah dilakukannya, kemudian muncul dua buah pertanyaan yaitu: Pertama, apa prediksi terkuat dari *trafficking* dari suatu negara dalam skala global. Kedua, apa prediksi terkuat dari *trafficking* ke suatu negara dalam skala global. Bales menjelaskan bahwa karena model atau teori ini bersifat *explanatory test*, sehingga Bales menggunakan operasi statistik sederhana bernama '*multiple regression*'. Dengan menggunakan operasi statistik ini, Bales dapat meneliti jumlah dari faktor di waktu yang bersamaan serta pada kasus perdagangan manusia dari negara asal ini, dapat dikalkulasikan variabelnya secara bersamaan⁴⁰.

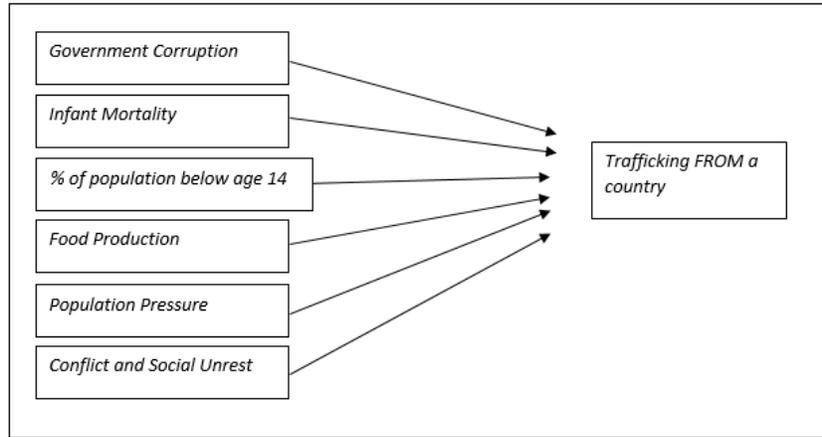
Operasi ini juga dapat memberikan berbagai variasi dari aktivitas *human trafficking* yang dijelaskan melalui faktor yang telah diidentifikasi tersebut.

³⁸ *Ibid.* Hal. 6

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 8

Gambar 2. *Trafficking FROM a Country*



Sumber: Bales, 2007

Hasil dari penelitian tersebut, Bales menemukan dua variabel yang dapat menjadi prediktor dari aktivitas *trafficking* yaitu *trafficking FROM a country* dan *trafficking TO a country*. Gambar 2 diatas merupakan variabel pertama dari teori Bales adalah *trafficking FROM a country* yang memiliki enam indikator yaitu *governmental corruption, infant mortality, % of population below age 14, food productions, population pressure, dan conflict and social unrest*. Gambar 2 diatas merupakan hasil kalkulasi dari operasi statistik yang dilakukan Bales, menunjukkan peringkat dari prediktor yang paling kuat sebagai faktor pendorong *trafficking* dari negara asal.

Untuk memahami indikator lebih jauh lagi, penulis kemudian mengutip salah satu *working paper* yang ditulis oleh Kevin Bales yang berjudul “*Theory of Modern Slavery*”. Pada tulisan tersebut, Bales mengatakan bahwa analisis yang dilakukan dimulai dengan melihat pertumbuhan penduduk berdasarkan populasi yang berusia dibawah 14 tahun dan tekanan populasi, pemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya tingkat kematian bayi dan rendahnya produksi pangan, serta praktek korupsi yang

ditunjukkan oleh indeks korupsi, sedangkan konflik dan kerusuhan sosial menjadi faktor prediktor tambahan⁴¹. Dari pernyataan tersebut, penulis memahami bahwa penelitian tersebut untuk memperjelas indikator diatas, dimana pada indikator pertama dari variabel *Trafficking FROM a Country* yaitu tingginya tekanan populasi dan tingkat populasi yang berusia dibawah 14 tahun merujuk pada perkembangan dan peningkatan populasi pada negara tersebut. Bales juga menjelaskan di dalam artikel jurnal *What Predicts Human Trafficking* bahwa apabila sebuah negara memiliki profil populasi yang masih muda, dimana yang dimaksud adalah banyaknya jumlah populasi yang berusia dibawah 18 tahun, maka akan tercipta kondisi persaingan ketat terhadap lapangan pekerjaan dan kurangnya kesempatan yang dapat dirasakan secara bersamaan⁴². Selanjutnya Bales melihat tingginya tingkat kematian bayi dan rendahnya produksi pangan yang merujuk pada tingkat kemiskinan dari negara tersebut. Kemudian dalam melihat faktor korupsi, Bales menganalisis menggunakan indeks korupsi berdasarkan persepsi dari level korupsi yang dibuat oleh para ahli terhadap suatu negara. Terakhir, Bales menambahkan bahwa konflik dan kerusuhan sosial kemudian menjadi prediktor tambahan, penulis memahami bahwa adanya konflik dan kerusuhan sosial yang ada di suatu negara bersamaan dengan kemiskinan sehingga terdapat relasi yang kuat sebagai prediktor *human trafficking*.

⁴¹ Kevin Bales, "Testing a Theory of Modern Slavery", diakses melalui http://lastradainternational.org/lsidocs/bales_test_theory_0607.pdf pada tanggal 23 September 2019.

⁴² Bales, *Loc. Cit.* Hal. 7

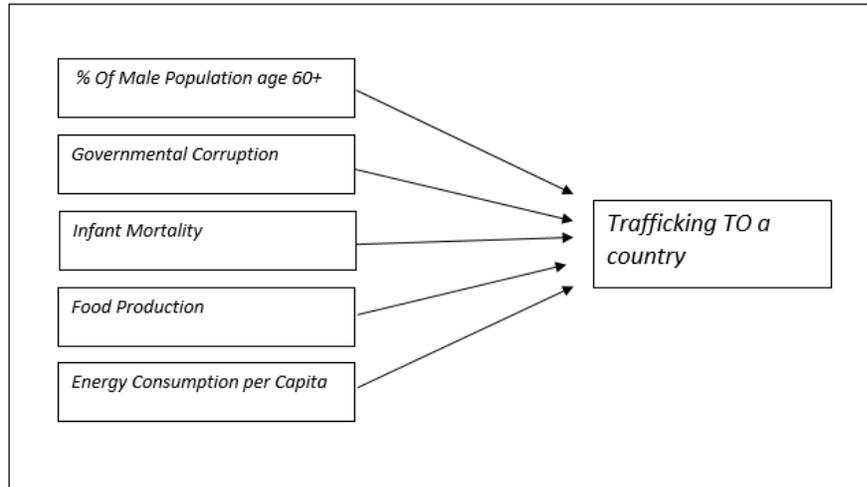
Menurut Bales, tingkat korupsi yang ada pada suatu negara menjadi prediktor terkuat dalam *human trafficking*, hal ini dilihat dari bagaimana tekanan populasi dan tingkat kemiskinan merupakan faktor pendorong *trafficking* yang sangat kuat mengingat korban *trafficking* sebagian besar berasal dari negara-negara miskin yang memiliki tingkat ketidakstabilan dan korupsi yang tinggi, sehingga menciptakan kondisi masyarakat yang rentan terhadap *trafficking*⁴³. Maka dari itu, berdasarkan hasil dari analisisnya Bales mengemukakan bahwa salah satu cara yang utama dan paling efektif dalam melawan *human trafficking* adalah dengan mengurangi tingkat korupsi di negara tersebut.

Berdasarkan faktor *human trafficking* ke negara destinasi, Bales mengatakan bahwa negara yang dilihat sebagai negara destinasi harus mempertimbangkan faktor penarik yang dirasakan serta permeabilitas yang relatif dari border negara tersebut⁴⁴. Namun, belum ada perkiraan terhadap permeabilitas tersebut sehingga Bales memasukkan indeks korupsi negara sebagai salah satu indikator kemungkinan permeabilitas karena korupsi dianggap sebagai pembuka border untuk para *traffickers*.

⁴³ *Ibid.* Hal. 11

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 11

Gambar 3. *Trafficking TO a Country*



Sumber: Bales, 2007

Indikator diatas merupakan hasil dari ujian yang dilakukan Bales menggunakan metode *'multiple regression'*. Gambar 3 diatas merupakan variabel kedua Bales yaitu *Trafficking TO a Country*, terdapat lima indikator didalamnya, yaitu *% of Male Population Age 60+*, *Governmental Corruption*, *Infant Mortality*, *Food Production*, dan *Energy Consumption per Capita*. Bales menjelaskan bahwa hanya empat indikator yang berkaitan secara signifikan dengan prediktor *human trafficking* ke negara destinasi.

Prediktor yang terkuat pertama adalah jumlah proporsi masyarakat populasi laki-laki yang berusia diatas 60 tahun. Menurut Bales, profil demografi menjadi indikator penting karena banyaknya populasi laki-laki yang berusia diatas 60 tahun tersebut, akan menyebabkan kekurangan pekerja yang lebih muda yang mau

mengambil pekerjaan keterampilan rendah (*low skill jobs*)⁴⁵. Kondisi kekurangan pekerjaan ini menjadi potensi permintaan akan pekerja imigran untuk mengambil pekerjaan tersebut. Prediktor terkuat kedua adalah *government corruption* atau tingkat korupsi negara. Kemudian indikator *food production, energy consumption*, serta *infant mortality* menjelaskan bagaimana kesejahteraan ekonomi yang ada di negara destinasi.

Pada bagian kesimpulan, Bales menjelaskan bahwa dari hasil penelitiannya terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pendorong *human trafficking*⁴⁶, yaitu; Pertama, negara asal memiliki *supply* yang besar sehingga menjadi peluang untuk di eksploitasi sebagai korban *human trafficking*. Kedua, negara tujuan memiliki *demand* untuk jasa, sehingga membutuhkan korban *human trafficking*. Ketiga, organisasi kriminal memiliki kontrol dari situasi *supply* dan *demand* korban *human trafficking* serta mengeksploitasi korban demi keuntungan pribadi.

Selanjutnya Bales mengemukakan beberapa strategy untuk memperlambat atau mengurangi tingkat *trafficking*⁴⁷, yaitu; mengurangi tingkat korupsi yang ada di negara asal dan negara tujuan, mengontrol populasi terutama mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pendidikan, melawan ketidaksetaraan antar negara di bidang kesejahteraan, sehingga masyarakat memiliki jaminan hidup dan sosial di negaranya masing-masing. Bales juga menekankan bahwa pelaku kriminal memiliki sifat yang sangat oportunistis dan adaptif terhadap situasi baru dan teknologi, karena *human trafficking* ini beroperasi secara ekstrim dan penuh kekerasan serta kondisinya sangat

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 11.

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 13

⁴⁷ *Ibid.* Hal. 14

dinamis. Maka dari itu, pelaku biasanya sangat cepat beradaptasi dan membuat cara baru dari komunikasi, transportasi, kontrol dan cara eksploitasi korban. Maka dari itu, negara yang melawan *human trafficking* juga harus siap dan cepat beradaptasi dengan cara-cara baru yang dilakukan pelaku melalui hukum yang diaplikasikan dan penegak hukum yang kreatif melalui penelitian yang menyeluruh⁴⁸.

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan dua variabel dari Kevin Bales untuk memprediksi kegiatan *human trafficking* yang ada di suatu negara. Penulis akan menggunakan variabel *Trafficking FROM a Country* dan *Trafficking TO a Country* untuk menganalisis bagaimana faktor pendorong dan faktor penarik suatu negara dalam aktivitas *human trafficking* khususnya *bride trafficking* yang ada di Myanmar dan China.

2.3 Operasionalisasi Teori

Dalam mengoperasionalkan teori *human trafficking* dari Kevin Bales dengan studi kasus *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015 sampai 2017, penulis akan menggunakan variabel dan indikator sebagai berikut:

2.3.1 *Trafficking FROM a Country*

Pada teori *Human Trafficking* yang ditulis oleh Kevin Bales, variabel pertama dalam melihat terjadinya *human trafficking* di suatu negara adalah faktor pendorong dari negara asal atau *Trafficking FROM a Country*. Terdapat enam indikator atau faktor terkuat yang ada di dalam variabel ini:

⁴⁸ *Ibid.* Hal. 15

2.3.1.1 *Government Corruption*

Pada indikator ini, penulis akan menjelaskan bagaimana tingkat korupsi serta praktek korupsi yang paling marak terjadi di Myanmar. Indikator ini ada untuk melihat bagaimana aktivitas korupsi yang ada di Myanmar mempengaruhi peningkatan *bride trafficking* karena kemudian akses perpindahan korban dari Myanmar ke China menjadi lebih mudah, sehingga mendorong peningkatan kasus *bride trafficking*.

2.3.1.2 *Infant Mortality*

Pada indikator ini, penulis akan menjelaskan tingginya tingkat kematian bayi yang ada di Myanmar untuk melihat rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah sehingga menjadi pendorong aktivitas *bride trafficking* di Myanmar. Tingginya tingkat kematian bayi ini juga menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar dalam mengatur sistem layanan kesehatan bagi penduduknya.

Ketika penduduk berada dalam kondisi yang tidak sejahtera, maka akan semakin mudah bagi pelaku untuk menipu korban dan menjualnya. Maka dari itu, faktor ini menjadi faktor pendorong *bride trafficking*.

2.3.1.3 *% Population Below Age 14*

Pada indikator ini, penulis akan menjelaskan bagaimana tingginya presentase populasi masyarakat Myanmar yang berumur di bawah 14 tahun untuk melihat perkembangan dan peningkatan populasi di negara Myanmar. Indikator ini melihat apabila persentase populasi yang berada di bawah 14 tahun tinggi, maka akan tercipta kondisi persaingan terhadap lapangan pekerjaan yang ketat, dan kurangnya kesempatan yang tersedia. Selain itu juga kondisi ini akan menciptakan banyaknya jumlah

komoditas bagi pelaku untuk kemudian diperdagangkan sehingga mendorong *bride trafficking* untuk beroperasi di Myanmar.

2.3.1.4 *Food Production*

Pada indikator ini, penulis akan menjelaskan bagaimana apabila negara Myanmar memiliki jumlah produksi pangan yang rendah, maka hal ini menggambarkan tingkat kesejahteraan ekonomi yang juga rendah. Rendahnya tingkat produksi pangan tentunya menggambarkan permasalahan yang ada di sektor pertanian, dan menghasilkan kemungkinan penduduknya yang mengalami kondisi kesulitan dalam mendapatkan makanan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan pelaku karena akan lebih mudah dalam menipu dan mengambil korban yang akan di jual.

2.3.1.5 *Population Pressure*

Pada indikator ini, penulis akan menjelaskan bagaimana tingkat tekanan populasi yang ada di Myanmar dimana apabila semakin tinggi tingkat tekanannya maka akan semakin tinggi pula persaingan akan pekerjaan yang ada. Apabila semakin tinggi persaingan yang ada, maka akan menghasilkan tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Tingginya jumlah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan terutama pada gender perempuan, maka akan semakin banyak komoditas korban bagi pelaku, dan kondisi kemiskinan yang dialami tentunya memudahkan pelaku dalam mengambil korban.

2.3.1.6 *Conflict and Social Unrest*

Pada indikator ini, penulis akan menjelaskan bagaimana konflik dan kerusuhan sosial yang ada di Myanmar mendorong masyarakat Myanmar melakukan aktivitas

bride trafficking untuk melarikan diri dari kondisi konflik. Ketika penduduk yang berada dalam melarikan diri, maka mereka akan lebih rentan terhadap pelaku *bride trafficking* karena tidak mendapatkan perlindungan yang lebih maksimal.

2.3.2 Trafficking TO a Country

Menurut teori Kevin Bales, terjadinya aktivitas *human trafficking* yang ada di suatu negara tidak hanya terdapat faktor pendorong dari negara asal, namun faktor penarik dari negara tujuan. Berikut adalah indikator atau faktor dari variabel kedua sebagai faktor penarik dari negara tujuan:

2.3.2.1 % of Male Population Age 60+

Untuk indikator ini, penulis akan menjelaskan bagaimana Negara China memiliki tingginya presentase populasi laki-laki yang berumur diatas 60 tahun, dimana hal ini menyebabkan terciptanya pasar atau kebutuhan akan jasa korban *human trafficking* untuk mengambil pekerjaan dengan keterampilan rendah atau *low skill jobs*.

Hal ini lah yang kemudian menjadi faktor penarik China sebagai negara destinasi dari *bride trafficking*.

2.3.2.2 Government Corruption

Untuk menganalisis indikator ini, penulis akan menjelaskan bagaimana tingkat korupsi yang ada di China dan apa saja praktek korupsi yang marak yang dilakukan dan dapat diberikan kepada *law enforcement* sehingga memudahkan akses bagi pelaku untuk mengirim korban *bride trafficking*.

2.3.2.3 Infant Mortality

Pada indikator ini, penulis akan menjelaskan rendahnya tingkat kematian bayi untuk melihat kesejahteraan ekonomi yang ada di China. Rendahnya tingkat kematian bayi ini juga menggambarkan bagaimana usaha pemerintah dalam memberikan layanan kesehatan bagi penduduknya. Maka dari itu, apabila China memiliki tingkat kematian bayi yang rendah, maka untuk pembeli *bride trafficking* yang bertujuan untuk mendapatkan keturunan, kemungkinannya akan tinggi karena didukung layanan kesehatan yang baik. Hal ini lah yang menjadi faktor penarik *bride trafficking*.

2.3.2.4 Food Production

Untuk menganalisis indikator ini, penulis akan menjelaskan bagaimana tingginya tingkat produksi pangan yang ada di China untuk menggambarkan kesejahteraan ekonomi yang ada di China. Tingginya produksi pangan yang ada di China akan menghasilkan lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Apabila tingkat pekerja di sektor pertanian bagi gender perempuan tinggi sesuai dengan tingkat produksi pangannya, maka dapat menciptakan kebutuhan akan jasa korban *bride trafficking* untuk di eksploitasi sebagai buruh. Maka dari itu, hal ini dapat menjadi faktor penarik *bride trafficking*.

2.3.2.5 Energy Consumption Per Capita

Untuk menganalisis indikator ini, penulis akan menjelaskan tingginya tingkat konsumsi energi per kapita yang dilakukan oleh China untuk menggambarkan bagaimana kesejahteraan ekonomi yang ada di China sehingga menjadi faktor penarik daripada *bride trafficking*. Tingginya tingkat konsumsi energi, menggambarkan

bagaimana kehidupan penduduk yang mampu dalam mengakses energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini lah yang menggambarkan bahwa penduduk China yang mampu dalam membeli korban *bride trafficking*. Kondisi inilah yang kemudian menjadi faktor penarik *bride trafficking*.

2.4 Tabel Operasionalisasi Teori *Human Trafficking* oleh Kevin Bales

Tabel 3. Tabel Operasionalisasi Teori *Human Trafficking* oleh Kevin Bales

Variabel	Indikator	Operasionalisasi
<i>Trafficking FROM a Country</i>	<i>Government Corruption</i>	Bagaimana aktivitas korupsi yang ada di Myanmar mempengaruhi peningkatan <i>bride trafficking</i> karena akses perpindahan korban dari Myanmar ke China menjadi lebih mudah
	<i>Infant Mortality</i>	Tingginya tingkat kematian bayi yang ada di Myanmar menggambarkan rendahnya kesejahteraan ekonomi.
	<i>% Population Below Age 14</i>	Tingginya presentase populasi Myanmar yang berumur dibawah 14 tahun menggambarkan tingginya tingkat persaingan yang lebih ketat, rendahnya kesempatan akan lapangan pekerjaan, dan

		menciptakan komoditas untuk pelaku <i>bride trafficking</i> .
	<i>Food Production</i>	Rendahnya tingkat produksi pangan yang ada di Myanmar menggambarkan rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi Myanmar dan permasalahan yang ada di sektor pertanian sehingga memungkinkan penduduknya mengalami kesulitan dalam mendapatkan makanan. Kondisi inilah yang dimanfaatkan pelaku karena akan lebih mudah dalam menipu dan mengambil korban yang akan di jual.
	<i>Population Pressure</i>	Tingginya tingkat tekanan populasi yang ada di Myanmar, menggambarkan tingkat persaingan yang lebih ketat dan akan menghasilkan tingkat pengangguran yang tinggi. Kondisi ini yang dimanfaatkan pelaku sehingga korban lebih mudah di tipu dan di jual.
	<i>Conflict and Social Unrest</i>	konflik dan kerusuhan sosial yang ada di Myanmar mendorong masyarakat Myanmar melakukan aktivitas <i>bride trafficking</i> untuk melarikan

		<p>diri dari kondisi konflik sehingga tidak mendapatkan perlindungan yang baik dan rentan akan pelaku <i>bride trafficking</i>.</p>
<p>Trafficking TO a Country</p>	<p><i>% of Male Population Age 60+</i></p>	<p>Tingginya tingkat populasi laki-laki yang berumur diatas 60 tahun di China, menciptakan pasar atau kebutuhan akan jasa korban <i>human trafficking</i> untuk mengambil pekerjaan dengan keterampilan rendah (<i>low skill jobs</i>).</p>
	<p><i>Government Corruption</i></p>	<p>Tingginya tingkat korupsi yang ada di China memudahkan akses <i>bride trafficking</i>.</p>
	<p><i>Infant Mortality</i></p>	<p>Rendahnya tingkat kematian bayi yang ada di China menggambarkan kesejahteraan ekonomi serta bagaimana layanan kesehatan yang ada di China. Dengan layanan kesehatan yang baik, maka pembeli <i>bride trafficking</i> bisa mendapatkan tujuannya yaitu memiliki keturunan dari korban <i>bride trafficking</i>.</p>
	<p><i>Food Production</i></p>	<p>Tingginya jumlah produksi pangan yang ada di China menggambarkan kesejahteraan ekonomi yang ada di China. Tingginya produksi pangan yang ada di China akan</p>

		<p>menghasilkan lapangan pekerjaan di sektor pertanian. Kondisi ini menciptakan kebutuhan akan jasa dari korban <i>bride trafficking</i> sebagai buruh.</p>
	<p><i>Energy Consumption Per Capita</i></p>	<p>Tingginya jumlah konsumsi energi per kapita menggambarkan kesejahteraan ekonomi yang ada di China. Tingginya tingkat konsumsi energi, menggambarkan bagaimana kehidupan penduduk yang mampu dalam mengakses energi untuk memenuhi kebutuhan energi dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Hal ini lah yang menggambarkan bahwa penduduk China yang mampu dalam membeli korban <i>bride trafficking</i>.</p>

2.5 Alur Pemikiran

Latar Belakang Masalah

Myanmar merupakan salah satu negara *Great Mekong Sub Region* (GMS) yang memiliki jumlah korban *human trafficking* tertinggi, dimana dari estimasi 7.000 korban *human trafficking*, 3.900 diantaranya merupakan *bride trafficking*. China sebagai salah satu negara tetangga dari Myanmar, menjadi negara destinasi korban *bride trafficking* dari Myanmar. Sejak tahun 2010-2017, jumlah kasus *bride trafficking* terus menginjak angka 100. Namun, terjadi peningkatan jumlah kasus *bride trafficking* yang terjadi pada tahun 2015-2017.

Rumusan Masalah

Apa saja faktor pendukung terjadinya peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017?

Konsep *Human Trafficking* oleh Kevin Bales

Trafficking FROM a Country

1. *Government Corruption*
2. *Infant Mortality*
3. *% Population Below Age 14*
4. *Food Production*
5. *Conflict and Social Unrest*
6. *Population Pressure*

Trafficking TO a Country

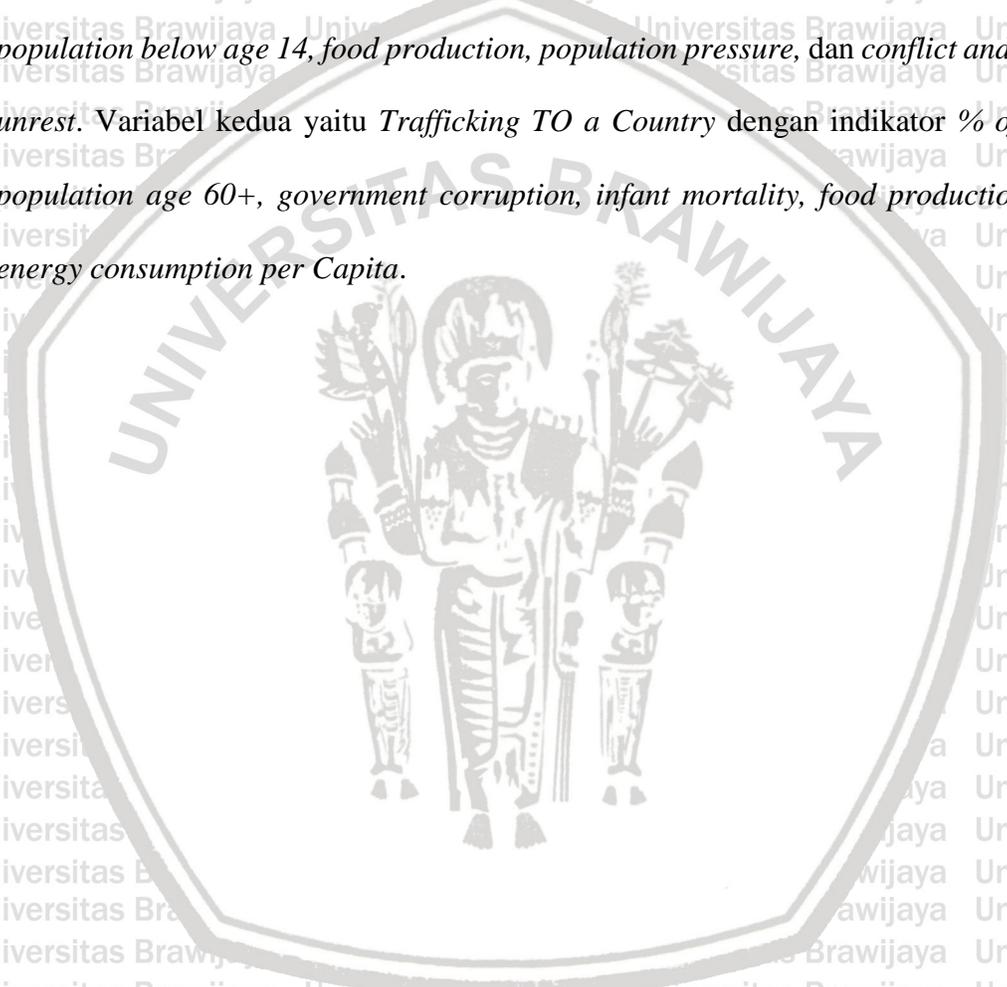
1. *% of Male Population Age 60+*
2. *Government Corruption*
3. *Infant Mortality*
4. *Food Production*
5. *Energy Consumption per Capita*

Hipotesis

Terdapat dua variabel yang menjelaskan faktor peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017 yaitu variabel pertama *Trafficking FROM a Country* dengan indikator *government corruption, infant mortality, % population below age 14, food production, population pressure, dan conflict and social unrest*. Variabel kedua yaitu *Trafficking TO a Country* dengan indikator *% of male population age 60+, government corruption, infant mortality, food production, dan energy consumption per Capita*.

2.6 Hipotesis

Berdasarkan penjabaran yang telah penulis lakukan dari latar belakang hingga operasionalisasi teori, terdapat dua variabel yang menjelaskan faktor peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017 yaitu variabel *Trafficking FROM a Country* dengan indikator *government corruption, infant mortality, % population below age 14, food production, population pressure, dan conflict and social unrest*. Variabel kedua yaitu *Trafficking TO a Country* dengan indikator *% of male population age 60+, government corruption, infant mortality, food production, dan energy consumption per Capita*.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yaitu deskriptif kualitatif.

Penelitian kualitatif merujuk pada pengumpulan data dan analisis strategi menggunakan pengumpulan dan analisis data non-numerik⁴⁹. Metode ini digunakan untuk memahami lebih jauh dunia di sekitar kita, sehingga membutuhkan fokus pada makna dan proses yang membentuk politik internasional⁵⁰. Sedangkan, penelitian kualitatif deskriptif merujuk pada eksplorasi fenomena-fenomena yang bersifat deskriptif yaitu langkah kerja, formula dari suatu resep, pengertian suatu teori, gambar, gaya, karakteristik, karakter budaya, model fisik atau artifak dan lain sebagainya⁵¹.

Maka dari itu, penulis memilih untuk menggunakan penelitian jenis deskripsi kualitatif untuk menerangkan kesesuaian fenomena *bride trafficking* dari China ke Myanmar dengan teori *Human Trafficking* dari Kevin Bales.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang akan penulis lakukan pada tulisan ini adalah menganalisa apa saja faktor pendukung meningkatnya *bride trafficking* dari Myanmar ke China menggunakan teori *Human Trafficking* dari Kevin Bales.

⁴⁹ Christopher Lamont, *Research Methods in International Relations*, (London: SAGE Publications, 2014), Hal.142

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Dja'man Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal.23.

3.3 Batasan Waktu Penelitian

Batasan waktu yang akan penulis pakai di dalam penelitian ini yaitu sejak tahun 2015-2017, dikarenakan adanya peningkatan pada jumlah kasus yang terlapor dalam rentang waktu tersebut.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan pada penelitian ini berupa teknik studi pustaka *archival or document based research* yaitu penelitian arsip resmi dimana pada teknik ini penulis akan meneliti menggunakan dokumen resmi yang dipublikasi secara resmi oleh negara, organisasi, atau swasta⁵². Dokumen resmi ini dapat berupa laporan, berita, pernyataan kebijakan, transkrip wawancara, catatan memorandum, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk penelitian ini penulis akan menggunakan teknik ini untuk menganalisis kasus peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China. Teknik pengumpulan data ini juga bisa dikategorikan sebagai pengumpulan data sekunder.

3.5 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang penulis gunakan untuk meneliti kasus ini adalah secara kualitatif, dimana penulis akan menganalisa studi pustaka, berita acara, dokumen resmi, hingga pernyataan resmi melalui website resmi yang berkaitan dengan kasus peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China.

⁵² Christopher Lamont, *Op. Cit.*, Hal. 149

3.6 Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini, penulis akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan alasan penulis dalam mengangkat kasus yang akan penulis teliti dalam skripsi ini. Penjelasan tersebut dilakukan melalui penjabaran latar belakang, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat dari penelitian ini.

2. BAB II : Kajian Pustaka

Pada bab ini, penulis menjelaskan studi terdahulu yang akan penulis gunakan untuk membantu penelitian ini, lalu penjelasan mengenai teori *Human Trafficking* oleh Kevin Bales yang akan penulis gunakan untuk meneliti kasus ini, bagaimana operasionalisasi yang akan penulis gunakan di kasus penelitian menggunakan teori yang dipilih, hingga hipotesa atau argument utama penelitian.

3. BAB III : Metodologi Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai hal-hal yang menyangkut penelitian seperti jenis penelitian, tingkat analisa, serta teknik-teknik penelitian, hingga bagaimana sistematika penulisan yang akan penulis gunakan.

4. **BAB IV : Fenomena *Bride Trafficking* yang ada di Myanmar dan China**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan gambaran umum mengenai kondisi *bride trafficking* yang ada di Myanmar, serta bagaimana latar belakang negara China sebagai negara penerima korban *bride trafficking*.

5. **BAB V : Faktor Peningkatan *Bride Trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017.**

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan hasil analisa yang penulis lakukan terkait peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017 menggunakan teori *Human Trafficking* dari Kevin Bales.

6. **BAB VI : Penutup**

Pada bab ini, penulis akan mengakhiri penelitian dengan menjelaskan secara ringkas terkait penelitian ini melalui rangkuman, disertai dengan saran yang penulis berikan untuk hasil penelitian ini.

BAB IV

FENOMENA *BRIDE TRAFFICKING*

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan bagaimana tren *human trafficking* yang ada di negara-negara *Great Mekong Subregion* (GMS) serta bagaimana rute perjalanan pada pengiriman korban dari negara asal ke negara tujuan. Kemudian, penulis juga akan menjelaskan lebih dalam bagaimana fenomena *human trafficking* dan khususnya *bride trafficking* yang ada di Myanmar, mulai dari sejarah, tren, modus operandi, rute perjalanan, hingga peristiwa konflik internal yang dialami. Pada bab ini juga akan dijelaskan bagaimana fenomena *bride trafficking* yang ada di China sebagai negara destinasi, dan ditutup dengan upaya-upaya yang telah dilakukan Myanmar dan China dalam memberantas kasus *bride trafficking*.

4.1 *Bride Trafficking* di Wilayah *Great Mekong Subregion* (GMS)

Bride Trafficking merupakan salah satu bentuk dari *human trafficking* yang dimana korbannya adalah perempuan dengan tujuan untuk mencari istri yang kemudian dapat di eksploitasi sebagai objek seksual, pekerja rumah tangga, memberikan keturunan dan secara keseluruhan sebagai budak⁵³. Kemudian, korban *bride trafficking* ini sebagian besar mengalami kekerasan fisik, maupun mental, dimana mereka disekap dan dikurung di dalam rumah pemiliknya dan dilarang untuk berkomunikasi secara langsung dengan keluarganya. *Forced marriage* dan *forced labor* termasuk ke dalam

⁵³ Empower People, "*Bride Trafficking*", diakses melalui <http://www.empowerpeople.org.in/bride-trafficking.html> pada tanggal 3 November 2019.

bride trafficking. *Forced marriage* adalah korban yang dinikahkan secara paksa dengan pemiliknya untuk dapat di eksploitasi secara seksual, ataupun memenuhi pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya, untuk *forced labor* atau *forced childbearing*, adalah kehamilan dari pernikahan secara paksa yang dilakukan juga dengan paksa tanpa persetujuan dari perempuan atau korban. Banyak kasus dimana ketika korban sudah melahirkan bayinya, bayi tersebut diambil dan korban ditelantarkan atau dibuang.

Tabel 4. Tabel Definisi Istilah Kata yang Digunakan

Term	Operational Definition used in Study
Marriage	Formal or informal union of two persons, as self-reported by the respondent (i.e. the research will not require documentation or 'proof' of the marriage). ¹
Forced marriage	Formal or informal union of two persons, at least one of whom did not have the option of (i) refusing the marriage without suffering a penalty (or the menace of penalty), OR (ii) exiting the marriage without suffering a penalty (or the menace of penalty). Penalties include physical, sexual, emotional, financial or legal consequences. ²
Childbearing	The state of being pregnant, irrespective of the birth outcome.
Forced childbearing	Any pregnancy that occurs in a forced marriage, regardless of whether the sex or pregnancy occurred with the woman's consent.
Human trafficking	The recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. ³

Sumber: *Estimating Trafficking of Myanmar Women for Forced Marriage and Childbearing in China, 2018*

Greater Mekong Sub Region (GMS) merupakan suatu wilayah negara-negara yang terhubung dengan Sungai Mekong, diantaranya ada 6 negara yaitu Kamboja, China, Laos, Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Berikut merupakan peta dari negara-negara *Greater Mekong Subregion* (GMS):

Gambar 4. Peta Negara-Negara *Greater Mekong Sub Region (GMS)*



Sumber: <https://www.chiangraitimes.com/thailand-national-news/chiangrai-news/greater-mekong-subregion-single-visa-plan-edges-forward/>

Aktivitas *bride trafficking* di negara-negara GMS sendiri paling banyak terdapat di China dimana China menjadi negara destinasi untuk *bride trafficking*. Peta dibawah merupakan peta yang menunjukkan rute *bride trafficking* dari negara-negara

GMS ke China:

Gambar 5. Rute *Bride Trafficking* dari Negara-Negara GMS ke China



Sumber: <https://www.thestar.com.my/news/regional/2018/12/12/mekong-women-sold-as-wives-many-promised-a-better-future-in-china-but-end-up-as-commodity>

Menurut UNODC, kasus *bride trafficking* paling banyak ditemukan di negara-negara yang berada di wilayah GMS yaitu Kamboja, China, Myanmar dan Vietnam⁵⁴.

Pada tahun 2012-2017, estimasi jumlah korban *bride trafficking* dari negara Vietnam ke China diperkirakan sejumlah 3.000 korban⁵⁵. Sedangkan, di negara Kamboja pada tahun 2013-2015 estimasi jumlah korban *bride trafficking* ke China diperkirakan

⁵⁴ The ASEAN Post, "Myanmar's Trafficked Brides", diakses melalui <https://theaseanpost.com/article/myanmars-trafficked-brides> pada tanggal 11 September 2019.

⁵⁵ Desmond Ng, "Raped, Beaten, and Sold in China: Vietnam's Kidnapped Young Brides", diakses melalui <https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/vietnam-kidnapped-brides-trafficking-china-wives-11777162> pada tanggal 11 September 2019.

sejumlah 164 korban⁵⁶. Di Myanmar sendiri pada tahun 2013-2017 diperkirakan korban *human trafficking* ke China mencapai 7.000 korban, dan 3.900 diantaranya merupakan *bride trafficking*⁵⁷. Melalui data berikut bisa dilihat bahwa Myanmar memiliki jumlah korban terbanyak dari kasus *bride trafficking* ke China.

Salah satu alasan mengapa kasus *bride trafficking* ini paling marak di wilayah GMS adalah karena negara-negara yang berada di wilayah ini memiliki kemiripan dalam beberapa hal, diantaranya adalah linguistik, kebudayaan, dan kepercayaan.

Kemiripan pada linguistik ini diantaranya terdapat pada Myanmar di negara bagian Shan yang memiliki kesamaan linguistik dan kebudayaan dengan China yaitu *Thais*, *Laotians*, dan Dai di Provinsi Yunnan⁵⁸. Sedangkan untuk kemiripan budaya terletak pada tradisi keagamaan yang ada di GMS, yaitu *Theraveda Buddhism*. *Theraveda Buddhism* memberikan justifikasi atas subordinasi perempuan⁵⁹. Dalam hal ini, perempuan dianggap tidak memiliki kesetaraan dengan laki-laki atau lebih rendah, kemudian tidak ada jalan lagi bagi perempuan untuk mendapatkan kesetaraan dengan laki-laki kecuali mereka lahir kembali menjadi laki-laki. Tradisi keagamaan ini menjadi mengakibatkan budaya perdagangan perempuan dapat berkembang di negara-negara GMS. Perlu diingat bahwa *Theraveda Buddhism* merupakan sub-ortodok dari

⁵⁶ Lauren Crothers, "China, Cambodia Urged to Tackle Forced Marriage Problem", diakses melalui <https://www.aa.com.tr/en/analodu-post/china-cambodia-urged-to-tackle-forced-marriage-problem/637292> pada tanggal 11 September 2019.

⁵⁷ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health dan KWAT, "Estimating Trafficking of Myanmar Women for Forced Marriage and Childbearing in China", diakses melalui https://www.jhsph.edu/departments/international-health/news/_publications/Myanmar-forced-marriage-report-embargoed-until-07-Dec-2018.pdf pada tanggal 13 September 2019.

⁵⁸ Caitlin Kelin dan Davidson College, "Slaves of Sex: Human Trafficking in Myanmar and the Greater Mekong Region", Ringhting Wrongs A Journal of Human Rights, 2012, Volume 2 Issue 1, Hal.5

⁵⁹ *Ibid.*, Hal.6

agama Buddha sehingga tidak dapat mencerminkan sistem kepercayaan Buddhisme yang lebih luas. Bisa dilihat dari kesamaan budaya dan agama yang ada di negara-negara GMS, mendukung adanya fenomena *sex trafficking* tersebut dapat terjadi.

4.2 *Bride Trafficking* di Myanmar

Myanmar telah menjadi pusat perdagangan manusia dan migrasi eksploitatif sehingga menjadi negara yang memiliki kondisi migrasi yang tidak aman di Asia Tenggara selama lebih dari 15 tahun⁶⁰. Myanmar juga dikategorikan sebagai negara yang menjadi sumber dan transit korban *human trafficking*. Menurut data yang diperoleh dari *Anti-Trafficking in Persons Division* yang dimiliki oleh Pemerintah Myanmar, dari tahun 2015-2018 terdapat 3 kasus *forced adoption*, 1 kasus *debt bondage*, 577 kasus *forced labour*, dan 683 kasus *sexual exploitation*⁶¹. Maka dari itu, kasus korban *human trafficking* yang mengalami eksploitasi seksual dapat dikatakan sebagai kasus tertinggi atau terbanyak diantara bentuk *human trafficking* lainnya.

Myanmar merupakan salah satu negara yang memiliki keadaan daerah perbatasan yang tidak stabil dan pasar *sex trafficking* yang sangat tinggi dimana berada diantara China dan Thailand yang merupakan negara dengan pelaku *human trafficking* yang paling buruk⁶². Korban *bride trafficking* dari Myanmar ditemukan paling banyak

⁶⁰ David A Feingold, "The Burmese Traffic-Jam Explored: Changing Dynamics and Ambiguous Reforms", *Cultural Dynamics*: 2013, 207-227, Hal. 5.

⁶¹ UNODC, "Global Report on Trafficking in Persons", (United Nations: New York, 2018).

⁶² Caitlin Klein & Davidson College, *Loc. Cit.*, Hal.2.

di daerah Yangon, Shan, Mandalay, dan Kachin⁶³. Menurut artikel jurnal “*Shan Women and Girls and the Sex Industry in Southeast Asia*” yang ditulis oleh Chris Beyrer, perdagangan perempuan untuk dijadikan istri di Myanmar sudah muncul sejak tahun 1760an dimana beliau menyatakan bahwa terdapat suatu jurnal yang melaporkan bagaimana aktivitas perdagangan manusia yang ditemukan karena ditangkap oleh pedagang budak dari Karen yang kemudian dijual ke *Lanna Thai* dari Chiang Mai, Thailand⁶⁴. Pada periode ini, perempuan Shan yang diperbudak menjadi ‘istri’ menjadi fenomena yang umum, perbudakan jenis ini kemudian dihapuskan secara resmi di Thailand dibawah pemerintahan Rama V, namun praktek perbudakan dan perdagangan perempuan terus berlangsung di berbagai daerah sampai 1930an. Tren perdagangan perempuan Myanmar untuk dijadikan istri ini berlangsung hingga saat ini, namun negara tujuan utamanya pada saat ini adalah China. Tren *bride trafficking* dari Myanmar ini merupakan *by demand* atau bersifat sesuai permintaan, dimana penduduk laki-laki di bagian utara China membutuhkan perempuan sebagai istri atau *caretaker* dikarenakan sedikitnya jumlah populasi perempuan yang ada di daerah utara China⁶⁵. Hal ini menyebabkan munculnya beberapa komunitas laki-laki yang hidup bersama, dan tidak mampu membesarkan keluarga karena tidak adanya perempuan.

Adapun dalam menjalankan operasinya, korban *bride trafficking* ini di rayu dan dijanjikan pekerjaan dengan upah yang tinggi. Kemudian, ketika korban menyetujui,

⁶³ Human Rights Watch, “*Gove Us A Baby and We’ll Let You Go*”, 2019, diakses melalui <https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china> pada tanggal 20 November 2019.

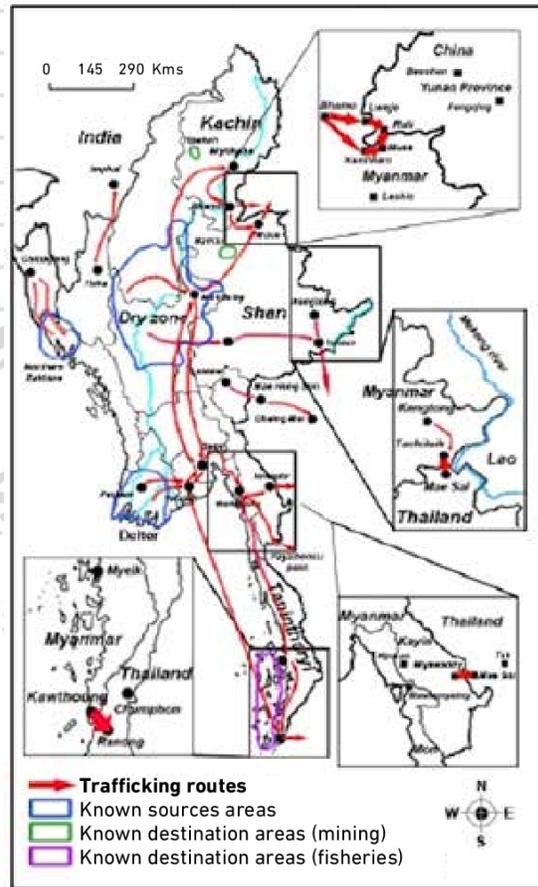
⁶⁴ Chris Beyrer, “*Shan Women and Girls and the Sex Industry in Southeast Asia; Political Causes and Human Rights Implications*”, *Social Science & Medicine*, 2001, 543-550, Hal.545

⁶⁵ David A Feingold, *Op. Cit.*, Hal. 213.

korban diberikan obat tidur sehingga tidak sadarkan diri. Selama korban tidak sadarkan diri, pelaku membawa korban ke tempat pelanggan yang ada di China. Sesampainya korban di rumah pelanggan, korban dimasukkan dan di kunci ke dalam ruangan sehingga tidak dapat keluar dari rumah tersebut. Transaksi *bride trafficking* ini dilakukan oleh pelanggan dengan pelaku, dimana harga yang ditawarkan oleh pelaku kepada pelanggan adalah sekitar 3.000 – 13.000 US Dolar⁶⁶. Dari modus operandi diatas bisa dilihat bahwa terdapat perubahan bentuk dimana pada saat pelaku menawarkan pekerjaan dan korban tersebut menyetujui maka disitu merupakan *people smuggling*, namun kemudian sesampainya di tempat tujuan korban diberikan obat sehingga tak sadarkan diri dan kemudian pelaku menipu korban dengan menjualnya dan korban pun dipaksa untuk mengikuti kemauan pelaku karena mendapatkan perlakuan kekerasan sehingga aktivitas ini menjadi *human trafficking*. Berikut adalah peta rute *human trafficking* dari Myanmar ke China:

⁶⁶ Tharanga Yakupitiyage, "Myanmar and China's Bride Trafficking Problem", diakses melalui <https://www.mmtimes.com/news/myanmar-and-chinas-bride-trafficking-problem.html> pada tanggal 1 November 2019.

Gambar 6. Rute *Human Trafficking* dari Myanmar ke China



Sumber: https://www.researchgate.net/figure/TRAFFICKING-ROUTES-IN-MYANMAR_fig1_325332030

Bisa dilihat dari peta diatas, bahwa rute yang dilalui untuk aktivitas *human trafficking* dari Myanmar ke China melalui daerah Kachin yang berada di utara

Myanmar. Sedangkan untuk korban-korban *human trafficking* lainnya yang menuju

Thailand melalui daerah selatan Myanmar. Untuk daerah Kachin sendiri merupakan daerah yang memiliki konflik internal cukup besar. Menurut IMF, Myanmar dan

Filipina merupakan negara yang memiliki jumlah korban dari konflik internal yang sangat banyak dimana korban-korban ini dimanfaatkan pelaku *human trafficking*

karena korban-korban tersebut tidak memiliki perlindungan yang kuat⁶⁷. Lebih dari 5.000 penduduk Rohingya diculik atau diselundupkan ke Bangladesh, kemudian penduduk perempuan Myanmar yang beretnis minoritas seperti Karen, Shan, Akha, dan Lahu diculik untuk dieksploitasi secara seksual di Thailand, dan penduduk perempuan di Kachin dijual di China untuk dijadikan istri⁶⁸.

Konflik internal yang ada di Myanmar berasal dari perilaku diskriminasi yang dialami oleh penduduk yang beretnis minoritas. Etnis mayoritas di Myanmar yaitu etnis Barma mendominasi kursi pemerintahan dan *Tatmadaw* (Angkatan Bersenjata Burma).

Hal ini menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan seringkali lebih menguntungkan etnis Barma dan merugikan etnis minoritas, hal ini lah yang memicu terjadinya konflik internal Myanmar hingga pada tahun 1989 pemerintah mengganti nama negara dari Burma menjadi Myanmar dengan harapan dapat lebih inklusif terhadap etnis minoritas⁶⁹. Namun, perubahan nama negara ini tetap saja menimbulkan banyak kontroversi karena etnis mayoritas merasa pemerintah tidak mengikutsertakan etnis Barma dalam rancangan perubahan nama, dan etnis minoritas merasa bahwa perubahan nama tersebut dipilih tidak berdasarkan konsiderasi perbedaan bahasa yang ada di Myanmar.

⁶⁷ IMF, "A Hidden Scourge", diakses melalui <https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/pdf/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.pdf> pada tanggal 28 November 2019.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Seunghyun Han, "Human Trafficking and Ethnic Minority Problems in Myanmar", diakses dari http://publicspherejournal.com/wp-content/uploads/2017/03/PSJ17_Article04.pdf pada tanggal 23 Agustus 2019.

Dominasi etnis mayoritas di Myanmar menimbulkan perlakuan yang tidak setara terhadap etnis minoritas, dimana seringkali terjadi kekerasan ekonomi, sosial, hak kebudayaan, perampasan mata pencaharian, perusakan rumah warga, hingga pajak yang berlebihan⁷⁰. Maka dari itu, muncul kelompok oposisi bersenjata dari etnis minoritas untuk melawan pemerintah dan *Tatmadaw* dengan tujuan mendapatkan hak-hak yang setara dengan etnis mayoritas, hak otonomi yang lebih besar, dan ingin mendapatkan kemerdekaan dari dominasi etnis Barma⁷¹. Dengan adanya kelompok oposisi bersenjata ini, pemerintah Myanmar berupaya untuk meredam konfrontasi dengan melakukan *4 Cuts Strategy* yaitu penghentian pasokan makanan, bantuan, intelijen, dan rekrut bagi para pemberontak⁷².

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada gambar 6 diatas, daerah sumber dan transit daripada *bride trafficking* dari Myanmar ke China berada di Kachin dan Shan Utara. Kachin merupakan daerah etnis minoritas di Myanmar yang memiliki sejarah konflik yang cukup besar dengan pemerintah Myanmar. Daerah Kachin merupakan daerah yang terpencil, kaya akan sumber daya alam, dan merupakan daerah perbatasan Myanmar dengan China dan India. Sejarah konflik etnis Kachin dengan pemerintah Myanmar dimulai pada saat kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948 dimana etnis Kachin mendapatkan diskriminasi dari pemerintah pusat Myanmar. Kemudian dibentuklah *Kachin Independence Organization* (KIO) pada tahun 1961,

⁷⁰ Thanawat Pimoljinda & Apiradee Thianthong, "Human Trafficking in Burma and the Solutions Which Have Never Reached", *Journal of Asia Pacific Studies*, Vol.1 No.3, 2010, hal. 529.

⁷¹ *Ibid*

⁷² *Ibid*

yaitu sebuah gerakan pertahanan bersenjata untuk melawan pemerintah pusat dan menjadi kelompok pertahanan etnis terbesar di Myanmar⁷³. KIO juga memiliki badan persenjataan yaitu *Kachin Independence Army* (KIA).

Konflik antara pemerintah Myanmar dan Kachin di dasari oleh keluhan masyarakat Kachin atas sedikitnya otonomi yang diberikan pemerintah pusat dan terjadinya diskriminasi yang terus-menerus terhadap etnis Kachin⁷⁴. Kondisi konflik ini menyebabkan masyarakat Kachin dan Shan Utara kesulitan dalam bertahan hidup, dilaporkan bahwa lebih dari 120.000 *Internally Displaced Persons* (IDPs) pergi meninggalkan daerah tersebut untuk melarikan diri dari konflik sehingga daerah Kachin menjadi daerah yang paling buruk dalam krisis humaniternya⁷⁵. *Internally Displaced Persons* (IDP) merupakan orang-orang yang berpindah dari daerah konflik ke daerah lain yang masih satu daerah di dalam negara tersebut untuk melarikan diri, meskipun perpindahan tersebut disebabkan oleh pemerintah negara itu sendiri⁷⁶. Pemerintah dari negara tersebut mendirikan kamp-kamp khusus untuk membantu korban IDP dalam bertahan hidup.

Berdasarkan penjelasan dari salah satu pengatur kamp untuk IDP di daerah Kachin dan Shan Utara, setiap 45 hari seluruh keluarga di kamp tersebut mendapatkan

⁷³ Kachin's Women's Association Thailand, "Burma's Covered Up War: Atrocities Against the Kachin People", diakses melalui <https://burmacampaign.org.uk/reports/burmas-covered-up-war-atrocities-against-the-kachin-people/> pada tanggal 24 Agustus 2019.

⁷⁴ Erin M. Kamler, "Women of the Kachin Conflict: Trafficking and Militarized Femininity on the Burma-China Border", diakses dari http://www.burmalibrary.org/docs21/Kamler-2015_Women_of_the_Kachin_Conflict_Trafficking_and_Militarized_Femininity_on_the_Burma-Chin_Border-en.pdf pada tanggal 23 Agustus 2019

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ UNHCR, "Internally Displaced Person", diakses dari <https://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html> pada tanggal 25 Agustus 2019.

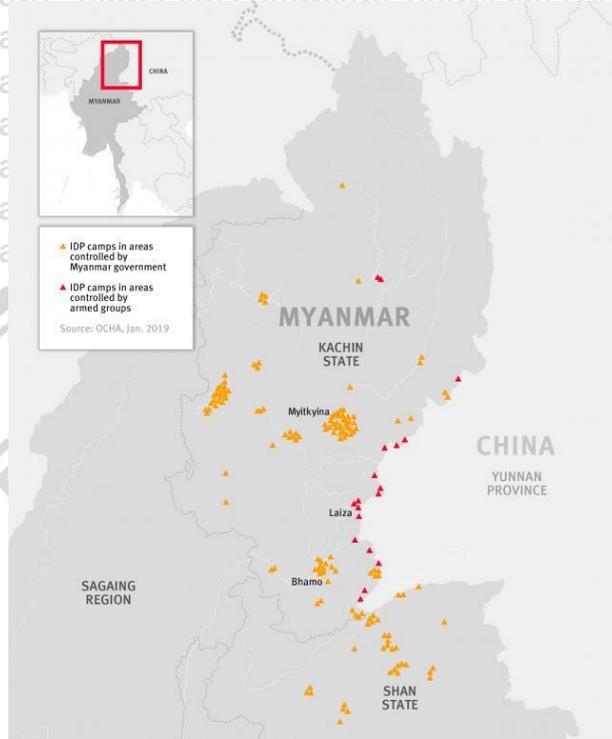
beras sebanyak dua gelas setiap hari untuk setiap kepala keluarga, dan uang sebesar 6 US Dolar per orang di keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain seperti bahan makanan dan sebagainya, sedangkan orang-orang yang tidak berada di kamp tersebut kesulitan dalam bertahan hidup karena sedikitnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendapatan kerja, hingga terbatasnya akses pendidikan⁷⁷. Tak hanya itu, pemerintah Myanmar juga memblokir bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Kachin dan Shan Utara terutama di daerah-daerah yang di pegang oleh KIO⁷⁸. Berikut merupakan peta letak kamp IDP di daerah Kachin dan Shan Utara. Simbol segitiga yang berwarna kuning merupakan kamp IDP yang di kontrol oleh pemerintah sedangkan segitiga yang berwarna merah merupakan kamp yang di kontrol oleh kelompok bersenjata.

⁷⁷ Human Rights Watch, "Give Us A Baby and We'll Let You Go", diakses dari <https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china> pada tanggal 25 Agustus 2019.

⁷⁸ *Ibid*



Gambar 7. Letak Kamp IDP Myanmar



Sumber: *Give Us A Baby and We'll Let You Go*, Human Right Watch Report 2019

Kondisi daerah yang berkonflik terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang ini menyebabkan ribuan masyarakat etnis minoritas Myanmar seperti etnis Shan, etnis Karen, dan etnis Kachin bermigrasi untuk melarikan diri dari Myanmar dengan harapan bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Jumlah masyarakat yang bermigrasi tersebut merupakan salah satu aliran migrasi terbesar di kawasan Asia

Tenggara⁷⁹. Setelah bernegosiasi untuk menyepakati gencatan senjata antara pemerintah Myanmar dengan KIO pada tahun 1993, akhirnya pada tahun 1994 KIO

⁷⁹ Thanawat Pimoljinda & Apiradee Thianthong, *op. cit.* Hlm. 526

dan Pemerintah Myanmar menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan keinginan utama dari KIO adalah perkembangan regional di daerah Kachin⁸⁰.

Dampak yang dirasakan oleh penduduk setempat sangat besar yang menyebabkan mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan kesejahteraan hidup, kondisi konflik ini juga membuat penduduk tidak mendapatkan perlindungan yang maksimal dari negara, sehingga dapat dengan mudah di giring oleh pelaku *human trafficking* dan dijadikan sebagai komoditas untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya atau kelompoknya sendiri.

4.3 *Bride Trafficking* di China

China sebagai negara destinasi *bride trafficking* dari Myanmar merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki aktivitas *human trafficking* yang sangat tinggi. Dari seluruh bentuk dari korban *human trafficking*, menurut laporan dari *US Department of State Trafficking in Persons* (TIP), perdagangan perempuan dan anak-anak merupakan permasalahan yang paling besar di China⁸¹, dimana 90% dari total korban *human trafficking* tersebut merupakan perempuan dan anak-anak. Dalam kasus *bride trafficking*, negara asal korban yang dikirim ke China tidak hanya dari Myanmar, tetapi dari berbagai negara lainnya yaitu Vietnam, Kamboja, Pakistan, India, hingga Indonesia. Perdagangan perempuan untuk pernikahan atau yang kita sebut dengan *bride trafficking* memiliki sejarah panjang di China, dimana pada tahun 1950

⁸⁰ The Irrawaddy, "A Chronology of Myanmar's Kachin Conflict", diakses dari <https://www.irrawaddy.com/news/military/chronology-kachin-conflict.html> pada tanggal 30 Agustus 2019.

⁸¹ *Ibid.*

pemerintah komunis menghapuskan praktek perdagangan perempuan untuk mengkampanyekan emansipasi wanita⁸². Namun, praktek ini terus berlangsung hingga 30 tahun, yang kemudian pada tahun 1980 perdagangan perempuan kembali hidup dan menyebar ke berbagai provinsi di China, terutama di provinsi yang kurang berkembang seperti Sichuan, Hunan, Guizhou, Shandong, Hebei, Henan, Anhui, dan Neimengu⁸³.

Menurut jurnal Zhao yang berjudul “*Trafficking in Women for Marriage in China*”, terdapat dua alasan munculnya permintaan atau *demand* terhadap *bride trafficking* di China. Pertama, tidak seimbang rasio laki-laki dan perempuan yang ada di China. Negara China memiliki populasi sebanyak 1,43 milyar jiwa yang menjadikan China sebagai negara dengan populasi terbanyak di dunia⁸⁴. Pertumbuhan populasi di China berkembang dengan sangat pesat, sehingga pada akhir tahun 1970 pemerintah China membuat kebijakan ‘*One Child Policy*’ yang dimana masyarakat China hanya diperbolehkan untuk memiliki satu anak dengan tujuan untuk menahan peningkatan jumlah populasi yang terlalu cepat⁸⁵. Hasil dari penerapan kebijakan ini berjalan sesuai dengan harapan, pertumbuhan populasi tidak secepat sebelumnya namun menimbulkan permasalahan yang lebih besar. Dengan adanya kebijakan *One Child Policy* pada tahun 1970, mengakibatkan banyak kasus dimana keluarga-keluarga miskin pada akhirnya menjual bayi mereka dikarenakan menurut kebijakan tersebut,

⁸² Gracie Ming Zhao, “*Trafficking of Women for Marriage in China*”, SAGE Publications, 2003, Vol.3(1), Hal 84.

⁸³ *Ibid.* Hal 85.

⁸⁴ World Population Review, “*China Population 2019*”, diakses dari <http://worldpopulationreview.com/countries/china-population/> pada tanggal 6 September 2019.

⁸⁵ Kenneth Pletcher, “*One Child Policy*”, diakses dari <https://www.britannica.com/topic/one-child-policy> pada tanggal 7 September 2019.

anak kedua yang dilahirkan akan dikenakan denda sebesar 3,500 US Dolar⁸⁶. Harga tersebut merupakan harga yang sangat mahal sehingga banyak keluarga-keluarga miskin yang tinggal di daerah pedesaan tidak mampu membayarnya sehingga banyak ditemukan kasus keluarga yang memberikan dan memperdagangkan bayi mereka. Selain itu di daerah pedesaan ini juga memiliki tingkat pendidikan dan lapangan pekerjaan yang tergolong rendah sehingga mudah bagi para pelaku *human trafficking* untuk menjalankan operasinya.

Kebijakan ini menyebabkan adanya ketidakseimbangan jumlah populasi laki-laki dan perempuan sehingga menjadi akar masalah utama dari perdagangan perempuan di China, dibuktikan oleh beberapa statistik yang menjelaskan jumlah populasi perempuan di daerah pedesaan China lebih banyak daripada jumlah populasi laki-lakinya yaitu sebanyak 20-40% yang kemudian rasionya menjadi 120 laki-laki untuk 100 perempuan sehingga diprediksi pada tahun 2050 sebagian besar populasi lansia diatas umur 60 tahun akan mendominasi China dikarenakan rendahnya tingkat kelahiran bayi⁸⁷.

Alasan kedua, yaitu tingginya harga perayaan pernikahan di beberapa daerah, dimana harga untuk merayakan pernikahan lebih mahal dibandingkan ‘membeli’ seorang istri⁸⁸. Seperti yang kita ketahui, China masih memiliki budaya patriarki yang

⁸⁶ Cindy Yik-Yi Chu, “*Human Trafficking and Smuggling in China*”, *Journal of Contemporary China*, December 2010, Hal 46. Diakses melalui <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2011.520842> pada tanggal 30 Oktober 2019.

⁸⁷ The Guardian, “*Can China Recover from it’s Disastrous One Child Policy?*”, diakses dari <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/02/china-population-control-two-child-policy> pada tanggal 7 September 2019.

⁸⁸ Gracie Ming Zhao, *Op. Cit.* Hal. 87.

cukup tinggi, dimana seorang perempuan dianggap sebagai suatu barang yang dimiliki oleh keluarganya sampai ia menikah kelak dan menjadi milik suaminya. Apabila melangsungkan pernikahan, pihak keluarga perempuan merasa bahwa keluarga laki-laki yang ingin menikahinya perlu memberikan kompensasi atas kerja keras keluarga perempuan dalam melahirkan dan membesarkan anak perempuan tersebut. Maka dari itu, untuk mendapatkan restu pernikahan, keluarga perempuan akan meminta sejumlah uang kepada laki-laki yang akan menikahinya. Praktek ini biasanya sangat sakral untuk keluarga-keluarga yang tinggal di daerah pedesaan, namun permasalahannya terletak pada tingginya harga tersebut sehingga pada akhirnya lebih memilih untuk ‘membeli’ seorang istri karena harganya lebih murah dibandingkan melangsungkan pernikahan.

Rendahnya tingkat kelahiran bayi tersebut disebabkan oleh semakin sulitnya laki-laki menemukan perempuan untuk melakukan pernikahan dan memiliki keturunan. Budaya patriarki yang ada di China melihat perempuan masih inferior dan harus diatur oleh laki-laki demi kemaslahatan hidupnya bisa dilihat dari budaya pernikahan. Di China sendiri masih banyak praktek *arranged marriage* dimana pernikahan diatur oleh keluarga sebagai bentuk peduli dan kasih sayang karena pilihan keluarga adalah pilihan yang terbaik bagi anak perempuan tersebut⁸⁹.

Budaya patriarki yang ada menyebabkan rendahnya minat keluarga untuk memiliki anak perempuan, namun tetap membutuhkan keberadaan perempuan. Anak laki-laki dianggap lebih baik karena menjadi pemimpin, pencari nafkah, dan membawa nama baik keluarga. Sedangkan perempuan, hanyalah suatu hal untuk

⁸⁹ Jane Ni, Thesis: “*Selling Bodies and Souls: Human Sex Trafficking in China*”, (New York: University of Albany, 2015), Hal.4

menyeimbangkan dan membantu jalan laki-laki untuk mencapai tujuannya.

Ketidakeimbangan rasio jumlah laki-laki dan perempuan ini sebagian besar terjadi di daerah pedesaan, sehingga dapat menjadi penyebab dari adanya aktivitas *bride trafficking* di China.

4.4 Upaya Pemberantasan *Bride Trafficking*

4.4.1 Pemerintah Myanmar

Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Myanmar dalam memberantas permasalahan *human trafficking*. Pertama, Myanmar telah menandatangani *Anti-Trafficking in Persons Law* pada tahun 2004 yang kemudian berhasil dibuat ke dalam undang-undang pada tahun 2005, namun prosedur yang dilakukan masih kurang jelas, minimnya dukungan finansial untuk aparat polisi yang menegakan *anti-trafficking*, dan undang-undang yang ada belum diimplementasikan secara sempurna⁹⁰.

Kedua, upaya lainnya yang telah dilakukan oleh Myanmar dalam memberantas *human trafficking* adalah *Five Year National Plan of Action* yang di efektifkan pada tahun 2007, lalu pembuatan *Central Body for Suppression of Trafficking in persons* (CBTIP) dibawah Kementerian Luar Negeri, serta pembuatan *Anti-Trafficking in Persons Division* (ATIP) yang berada dibawah CBTIP pada tahun 2013⁹¹.

⁹⁰ UN WOMEN, "*Tackling Human Trafficking in Myanmar*", diakses melalui <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/1/feature-tackling-human-trafficking-in-myanmar> pada tanggal 4 November 2019.

⁹¹ UN-ACT, "*Myanmar*", diakses melalui <http://un-act.org/myanmar/> pada tanggal 5 November 2019.

Meskipun beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Myanmar, namun pada pengimplementasiannya tidak dilaksanakan dengan maksimal. Dibawah *Anti-Trafficking in Persons Law* Myanmar tahun 2015, setiap orang yang dihukum karena perdagangan manusia akan dikenakan hukuman minimum 10 tahun penjara dan maksimum seumur hidup, namun hanya beberapa kasus yang dapat mencapai hukuman tersebut. Hal ini dikarenakan sumber daya kepolisian yang rendah, masih maraknya praktek korupsi, proses persidangan yang lambat, dan bagi kasus *bride trafficking* ini para korban mengalami tekanan untuk membatalkan atau tidak mengajukan tuntutan agar tidak melibatkan anggota keluarga korban⁹².

4.4.2 Kerjasama Pemerintah Myanmar dan Pemerintah China dalam Memberantas *Bride Trafficking*

Pada tanggal 11 November 2009 Myanmar dan China menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) yang berisi tentang kerjasama antar pemerintah Myanmar dan China mengenai pemberantasan *human trafficking*. MoU ini ditandatangani oleh Wakil Menteri Keamanan Publik China yaitu Zhang Xinfeng dan Wakil Menteri Dalam Negeri Myanmar yaitu Brigjen Phone Swe⁹³. Tren *trafficking* yang termasuk dalam MoU ini adalah perempuan-perempuan dari negara bagian Shan Myanmar yang mengalami pernikahan paksa (*forced marriage*) dengan warga China di China, juga perempuan-perempuan dari negara bagian Shan Utara, Yangon, Mandalay, Kachin, Bago, dan Ayeyarwaddy yang dikirim ke kota-kota yang berada di

⁹² Human Rights Watch, *Op. Cit.*

⁹³ Thein Linnm "Myanmar and China Ink Human Trafficking Agreement in Beijing", diakses melalui <https://www.mmtimes.com/national-news/5850-myanmar-and-china-ink-human-trafficking-agreement-in-beijing.html> pada tanggal 4 November 2019.

perbatasan China seperti Provinsi Yunnan dan bagian timur China dimana korban-korban dipaksa untuk menikah atau bekerja di bidang industri seksual⁹⁴. MoU yang dilakukan ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara Myanmar dan China dalam memberantas *human trafficking* dan meningkatkan keamanan untuk korban. Dalam pelaksanaannya juga terdapat investigasi gabungan, penyerahan pelaku, pertukaran informasi, pengembalian korban ke negara asal, pelatihan gabungan untuk menginvestigasi dan mengamankan korban, mengesahkan undang-undang mengenai pemberantasan *human trafficking*, serta mendirikan kantor yang bertujuan untuk mengkonsolidasikan komunikasi dan meningkatkan kolaborasi antar polisi yang berada di perbatasan kedua negara tersebut.

Myanmar dan China juga menandatangani *Coordinated Mekong Ministerial Initiative against Human Trafficking* (COMMIT) pada tahun 2004 bersama Kamboja, Laos, Thailand, dan Vietnam yaitu kerjasama yang dimana ke enam negara ini mengadopsi *action plan* mengenai penanganan beberapa bidang kritis dan juga menciptakan kemitraan secara bilateral dan multilateral untuk memberantas *human trafficking*⁹⁵.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa upaya yang telah dilakukan baik Pemerintah Myanmar dan Pemerintah China dalam mengatasi kasus *bride trafficking*, kenyataannya upaya tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal karena adanya hambatan seperti sumber daya yang kurang baik dari segi personel ataupun anggaran. Sehingga sulit dalam memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberantasan

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

kasus *bride trafficking*. Selain itu, belum ada upaya dari kedua negara dalam memberantas kasus *bride trafficking* secara khusus sehingga dalam pelaksanaan penanganannya masih menggunakan cara atau metode penanganan kasus *human trafficking* pada umumnya.



BAB V

FAKTOR PENINGKATAN *BRIDE TRAFFICKING* DARI MYANMAR KE CHINA PADA TAHUN 2015-2017

Pada bab ini, penulis akan menganalisis penyebab dari peningkatan *bride trafficking* yang terjadi dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017 menggunakan teori *human trafficking* dari Kevin Bales. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2, terdapat 2 variabel yang menjelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi peningkatan *bride trafficking* yaitu; *Trafficking FROM a Country* dan *Trafficking TO a Country*.

Penulis kemudian akan mengimplementasikan kedua variabel tersebut untuk menganalisis penyebab meningkatnya *bride trafficking* dari Myanmar ke China dari tahun 2015-2017.

5.1 *Trafficking FROM a Country*

Pada variabel ini, penulis akan menganalisis dengan mengimplementasikan 6 (enam) indikator pada variabel ini untuk melihat faktor apa saja yang menjadi penyebab meningkatnya *bride trafficking* yang terjadi dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017. Adapun keenam faktor tersebut adalah; *government corruption*, *infant mortality*, *% of population below age 14*, *food production*, *population pressure*, dan *conflict and social unrest*.

5.1.1 Government Corruption

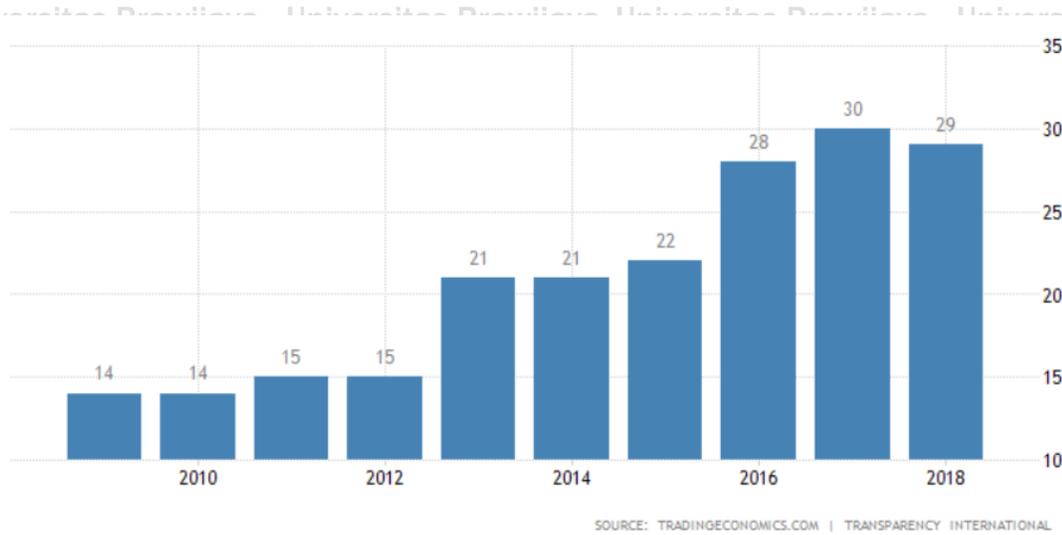
Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 sebelumnya, Bales menjelaskan bahwa tingkat korupsi yang ada di suatu negara menjadi prediktor terkuat dalam terjadinya *human trafficking*. Hal ini dilihat dari bagaimana sebagian besar korban *human trafficking* berasal dari negara-negara miskin yang memiliki tingkat korupsi tinggi sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang rentan terhadap *trafficking*⁹⁶.

Bales mengemukakan bahwa cara yang paling utama dalam memberantas terjadinya *human trafficking* adalah dengan mengurangi tingkat korupsi yang ada di negara tersebut. Semakin rendah tingkat korupsi yang ada di suatu negara, maka kemungkinan untuk pelaku *human trafficking* melakukan operasinya dengan menyuap *law enforcement* pun semakin kecil.

Corruption Perception Index (CPI) menjelaskan bagaimana negara yang memiliki nilai dan peringkat yang rendah dalam indeksnya memiliki kecenderungan aktivitas korupsi yang sering terjadi sehingga dapat dengan mudah melakukan praktek penyuapan dan pemerasan terhadap *law enforcement*, pejabat resmi hingga penegak hukum negara. Gambar 8 merupakan diagram indeks korupsi Myanmar dari tahun 2009–2018. Bisa dilihat dari tahun 2015–2017, indeks korupsi yang ada di Myanmar mengalami peningkatan nilai.

⁹⁶ Bales, *Op, Cit.*, Hal 11.

Gambar 8. Diagram Indeks Korupsi Myanmar Tahun 2009 - 2018



Sumber: <https://tradingeconomics.com/myanmar/corruption-index>

Berdasarkan nilai dari persepsi indeks korupsi yang ada di Myanmar, kita bisa melihat bahwa Myanmar mendapatkan nilai 22 dari 100 pada tahun 2015, kemudian meningkat menjadi 28 pada tahun 2016, dan terus meningkat hingga 30 dari 100 pada tahun 2017. Skor atau nilai diatas menunjukkan bagaimana tingkat korupsi yang ada di sektor publik suatu negara yang dirasakan dari 0 (*highly corrupt*) sampai 100 (*very clean*)⁹⁷. Dengan nilai tersebut, Myanmar menjadi negara ke-6 yang paling korup di wilayah Asia Pasifik setelah Afghanistan, Bangladesh, Kamboja, Papua Nugini, dan Korea Utara⁹⁸.

Menurut laporan yang dikeluarkan oleh *Transparency International* mengenai korupsi yang ada di Myanmar, terdapat beberapa bentuk praktek korupsi yang ada di

⁹⁷ Transparency International, "Myanmar", diakses melalui <https://www.transparency.org/country/MMR> pada tanggal 6 November 2019.

⁹⁸ Transparency Internasional, "Overview of Corruption and Anti-Corruption in Myanmar", Hal.3, diakses melalui <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/overview-of-corruption-and-anti-corruption-in-myanmar> pada tanggal 4 November 2019.

Myanmar. Salah satunya adalah *bureaucratic corruption* atau korupsi yang ada pada birokrasi dimana biasanya penyuapan sering terjadi untuk mendapatkan izin (*permit*), proses aplikasi atau mendapatkan berbagai bentuk jasa publik⁹⁹. Menurut *Transparency International's Asia Pacific Global Corruption Barometer*, 40% penduduk Myanmar memberikan suap untuk mendapatkan layanan publik¹⁰⁰. Selain itu, praktek korupsi dalam penyuapan juga terjadi dalam mengakses pembayaran fasilitas publik seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan mendaftar kepada pihak berwenang. Penyuapan ini marak terjadi karena dengan dilakukan penyuapan tersebut, maka proses yang dilalui akan lebih dipermudah oleh pihak yang disuap tersebut, namun seringkali penduduk yang menyuap tersebut harus memberikan suapan ke banyak pihak untuk mempercepat prosesnya.

Terdapat dua sektor yang dimana memiliki tingkat kepercayaan penduduk yang paling rendah, yaitu polisi dan pengadilan. Menurut *Asian Barometer Survey* pada tahun 2016, hanya 27% penduduk Myanmar yang mempercayai pihak kepolisian¹⁰¹. Angka ini merupakan angka terendah diantara seluruh negara ASEAN, dimana masih terdapat indikasi lebih dari setengah penduduk Myanmar tetap harus melakukan penyuapan untuk mengakses layanan polisi. Menurut *Asian Barometer Survey* pada tahun 2016, hanya sebanyak 32% penduduk yang menyatakan percaya kepada pengadilan, dan 40% responden percaya bahwa tidak ada cara terjangkau untuk mendapatkan keadilan melalui lembaga hukum dimana sebagian besar penduduk tidak

⁹⁹ *Ibid.*, Hal. 3

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ *Ibid.*, Hal. 6

percaya pada netralitas sehingga mayoritas penduduk tidak mengambil tindakan hukum melalui pengadilan hukum¹⁰².

Pada kasus *bride trafficking* ini, praktek korupsi ini terjadi di daerah perbatasan.

Dimana daerah perbatasan antara Myanmar dan China dikontrol oleh KIO, bukan pemerintah Myanmar. Sehingga, kontrol atau pengawasan atas daerah perbatasan Myanmar dan China sangat buruk, kemudian diperumit juga oleh perdagangan giok dan kayu di daerah perbatasan tersebut sehingga banyak praktek korupsi terjadi¹⁰³.

Perdagangan yang dilakukan di daerah perbatasan ini juga yang kemudian menjadikan praktek korupsi kepada petugas perbatasan menjadi hal yang biasa, hal ini dikarenakan surat izin impor dan ekspor diberikan berdasarkan per kasus sehingga memberikan ruang bagi pejabat publik untuk melakukan korupsi¹⁰⁴.

Buruknya kontrol atau pengawasan petugas perbatasan, mempermudah pelaku dan korban *bride trafficking* untuk berpindah dari Myanmar ke China. Hal ini dibuktikan dengan testimoni korban *bride trafficking* ketika diwawancara oleh *Human Rights Watch* dimana mereka menyatakan bahwa para korban bisa melalui beberapa cara, yaitu melalui pos perbatasan resmi dan secara diam-diam tanpa melewati imigrasi. Ketika pelaku dan korban melewati pos perbatasan resmi, para petugas tersebut biasanya gagal mendeteksi korban *bride trafficking* atau kemungkinan besar membantu dan bersekongkol dengan pelaku¹⁰⁵, sedangkan apabila melalui cara

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Human Rights Watch, *Op. Cit.*

¹⁰⁴ GAN Integrity, "Myanmar Corruption Report", diakses melalui <https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/myanmar/> pada tanggal 5 Januari 2020.

¹⁰⁵ *Ibid.*

melewati imigrasi, salah satu korban *bride trafficking* menyatakan bahwa orang-orang dapat menyebrang secara ilegal ketika waktu pemeriksaan polisi sedang berfungsi, meskipun para penjaga melihat orang-orang tersebut menyebrang, namun tidak ada tindakan untuk menghentikannya¹⁰⁶. Tsin Tsin, salah satu korban *bride trafficking* yang di wawancara menyatakan bahwa mereka mengetahui waktu-waktu kapan saja perbatasan tersebut tidak dijaga, yaitu pukul 6 pagi¹⁰⁷. Pada pukul 6 pagi, tidak ada penjaga perbatasan baik di Myanmar maupun di China, kemudian pada siang hari tentara KIO akan berjaga di perbatasan dimana pada saat tersebut apabila ada yang ingin menyebrang maka petugas KIO terkadang memeriksa *the red book* atau buku yang menyatakan izin sementara untuk menyebrang. Maka dari itu, apabila mereka berangkat pukul 6 pagi, tidak perlu menggunakan izin dan mereka dapat berpindah lebih mudah.

Aktivitas korupsi yang ada di Myanmar juga memperlambat tindakan yang dapat dilakukan *law enforcement* Myanmar dalam mengatasi masalah *bride trafficking*. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana respon dan tindakan pemerintah Myanmar dalam memberantas *bride trafficking* tidak didukung dengan keadaan polisi yang sangat buruk karena praktek korupsi dan sumber daya yang buruk¹⁰⁸. Praktek korupsi yang dilakukan oleh para polisi ini ketika makelar dari *bride trafficking* dapat dengan mudah kabur dan bebas dari hukuman karena pihak kepolisian dan pengadilan dapat dengan

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

mudah di suap¹⁰⁹. Bagi korban yang meminta keadilan, tanpa adanya ‘bayaran’, seringkali pihak kepolisian menolak untuk menginvestigasi suatu kasus, tidak jarang juga pihak kepolisian meminta kepada pihak pelapor untuk menginvestigasi terlebih dahulu, kemudian membayar sejumlah uang untuk membayar biaya transportasi polisi tersebut ketika berpergian menginvestigasi. Buruknya performa pihak kepolisian dalam menangani kasus ini dikarenakan gaji polisi di Myanmar yang sangat rendah, serta anggaran yang sangat rendah sehingga hal ini menghambat performa kerja dari polisi tersebut.

Bisa dilihat dari penjabaran kondisi korupsi yang ada di Myanmar, dari nilai dan praktek korupsi yang dilakukan, bentuk daripada korupsi yang dilakukan sebagian besar adalah suap yang dapat dilakukan oleh penduduk hingga pihak elit negara. Kemudian ditemukan juga bahwa kepercayaan penduduk Myanmar terhadap pihak kepolisian dan pengadilan sangat rendah, hal ini disebabkan mudahnya penduduk dalam memberikan suap kepada penegak hukum, dan mudahnya penegak hukum tersebut untuk disuap demi memenuhi keinginan yang memberikan suap. Banyak sekali kasus dimana para pelaku *bride trafficking* ini berhasil lolos dengan menyuap penegak hukum dan aparat kepolisian¹¹⁰. Selain itu, mudahnya pelaku dan korban untuk menyebrang dari Myanmar ke China karena penjagaan di daerah perbatasan yang buruk sehingga mempermudah proses penyebrangan secara ilegal maupun melalui

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Frontier, “Report Shines Spotlight on ‘Unspeakable Abuse’ of Trafficked Women”, diakses melalui <https://frontiermyanmar.net/en/report-shines-spotlight-on-unspeakable-abuse-of-trafficked-women> pada tanggal 26 November 2019.



imigrasi. Menurut penulis, melihat keseluruhan kondisi korupsi yang ada di Myanmar, indikator ini menjadi faktor pendukung dari peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar.

5.1.2 Infant Mortality

Pada indikator ini, Bales melihat bahwa tingginya tingkat kematian bayi (*infant mortality*) merujuk pada tingkat kemiskinan yang ada di negara tersebut. Tingkat kematian bayi ditunjukkan dengan ketika seorang bayi meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun dan dihitung per 1000 bayi yang telah lahir. Bales mengatakan bahwa indikator tingkat kematian bayi tersebut menjadi faktor pendorong daripada *human trafficking* dengan melihat tinggi atau rendahnya tingkat kematian bayi tersebut serta melihat bagaimana akses kesehatan yang ada di Myanmar. Ketika suatu negara memiliki tingkat kematian bayi yang tinggi, maka dapat dikatakan bahwa pelayanan negara dalam mensejahterakan penduduknya melalui fasilitas kesehatan sangat rendah, sehingga berujung pada kematian bayi. Maka dari itu, tingkat kematian bayi dapat menjadi tolak ukur atau gambaran dari tingkat kemiskinan suatu negara. Semakin buruk akses kesehatannya, maka semakin tinggi tingkat kematian bayi yang ada.

Tabel 5. Tabel Tingkat Kematian Bayi di Myanmar Tahun 2010 – 2019 (%)

Myanmar - Historical Infant Mortality Rate Data		
Year	Infant Mortality Rate	Growth Rate
2019	37.401	-2.590%
2018	38.396	-2.670%
2017	39.449	-2.600%
2016	40.502	-2.540%
2015	41.556	-2.470%
2014	42.609	-2.410%
2013	43.662	-3.670%
2012	45.326	-3.540%
2011	46.989	-3.420%
2010	48.653	-3.310%

Sumber: <https://www.macrotrends.net/countries/MMR/myanmar/infant-mortality-rate>

Pada tabel 5 diatas, bisa dilihat bahwa pada tahun 2015 tingkat kematian bayi sebesar 41,5 kemudian tahun 2016 tingkat kematian bayi tersebut menurun menjadi 40,5 dan pada tahun 2017 tingkat kematian bayi tersebut terus menurun hingga 39,4.

Tingginya tingkat kematian bayi di Myanmar ini merefleksikan bagaimana sistem atau layanan kesehatan yang ada di Myanmar. Pada tahun 2013, *World Health Organization* (WHO) menempatkan Myanmar pada peringkat terakhir dari 190 negara untuk “overall health system performance” atau performa layanan kesehatan di Myanmar secara keseluruhan¹¹¹.

Buruknya performa layanan kesehatan di Myanmar dipengaruhi oleh faktor dari dukungan finansial yang terbatas, dimana Pemerintah Myanmar hanya mengalokasikan 2% dari GDP nya untuk layanan kesehatan. Terbatasnya dukungan finansial untuk

¹¹¹ Benjamin Shobert, “Healthcare in Myanmar”, diakses melalui <https://www.forbes.com/sites/benjaminshobert/2013/08/19/healthcare-in-myanmar/#4fb0d2d96142> pada tanggal 6 November 2019.

layanan kesehatan menyebabkan Myanmar kesulitan dalam memberantas penyakit menular seperti malaria yang menjadi penyebab utama kematian penduduk Myanmar¹¹². Selain itu, tingkat penyakit *tuberculosis* atau TB diperkirakan tiga kali lipat dari tingkat global dimana sebagian kasusnya adalah resistan terhadap obat yang dijual di pasaran¹¹³.

Menurut data yang diperoleh dari UNICEF, 1 dari 20 anak perempuan yang berumur 15 – 19 tahun sudah melahirkan¹¹⁴. Usia melahirkan yang masih sangat muda tersebut beresiko sangat tinggi akan keguguran, hal ini dibuktikan dengan kasus bayi premature ditemukan sebagai penyebab utama paling tinggi dari kematian bayi di Myanmar, diikuti dengan *birth asphyxia* serta *birth trauma* dan infeksi (*sepsis*)¹¹⁵.

Resiko kematian bayi juga dilihat dari bagaimana akses kesehatan yang didapatkan ibu saat melahirkan dan pasca melahirkan, menurut data dari UNICEF, ibu yang berasal dari keluarga yang kaya lebih mendapatkan akses melahirkan yang lebih baik sebanyak 88% daripada ibu yang tinggal di daerah pedesaan yang hanya sebesar 52%¹¹⁶. Kemudian, jumlah ibu yang mendapatkan pendampingan baik saat melahirkan lebih sedikit untuk ibu yang berada di bawah umur (usia dibawah 20 tahun) sebesar 67%, dibanding ibu yang sudah cukup umur (20 – 34 tahun) sebesar 71%¹¹⁷.

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ UNICEF, "Myanmar: Maternal and Newborn Health Disparities", diakses melalui file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/country%20profile_MMR.pdf pada tanggal 25 November 2019.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

Anak laki-laki di Myanmar mengalami resiko kematian yang lebih besar daripada anak perempuan, hal ini dikarenakan anak laki-laki lebih sering berhadapan dengan bahaya seperti kecelakaan lalu lintas, jatuh, hingga terkena sengatan listrik¹¹⁸.

Diantara penduduk dewasa pun, penduduk laki-laki di Myanmar memiliki resiko kematian yang lebih tinggi yaitu dua kali lipat dari resiko kematian penduduk perempuan, dimana kemungkinan usia kematiannya berada pada umur 15 sampai 59 tahun¹¹⁹. Maka dari itu, dari data diatas bisa kita lihat bahwa populasi penduduk Myanmar lebih banyak perempuan daripada laki-laki.

Dari data diatas, bisa dilihat bahwa jumlah perempuan di bawah umur yang sudah melahirkan cukup banyak, namun akses kesehatan yang didapatkan saat melahirkan dan pasca melahirkan lebih sedikit sehingga kasus kematian bayi paling tinggi disebabkan oleh prematuritas¹²⁰. Untuk populasi laki-laki nya sendiri, lebih besar resiko nya dalam menghadapi kematian. Faktanya, umur harapan hidup laki-laki di Myanmar berada pada umur 60,2 tahun, dimana menjadi umur harapan hidup terendah ke dua di antara negara-negara ASEAN¹²¹.

Apabila kita lihat dari data diatas, dapat kita simpulkan bahwa tingkat kematian bayi yang ada di Myanmar mengalami penurunan dari tahun 2015 – 2017, namun tetap masuk ke dalam kategori tinggi. Tingginya tingkat kematian bayi ini juga disebabkan

¹¹⁸ UNFPA Myanmar, "New Census Report Reveals Alarmingly High Child Death in Districts: in Laboutta, One in Six Boys Die Before Their Fifth Birthday", diakses melalui <https://myanmar.unfpa.org/en/news/new-census-report-reveals-alarmingly-high-child-death-districts-laboutta-one-six-boys-die-their> pada tanggal 25 November 2019.

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ UNICEF, *Op. Cit.*

¹²¹ UNFPA, *Op. Cit.*

oleh masih kurang baiknya layanan kesehatan bagi penduduk Myanmar, dimana hanya sebesar 2% GDP yang dialokasikan Pemerintah Myanmar untuk layanan kesehatan.

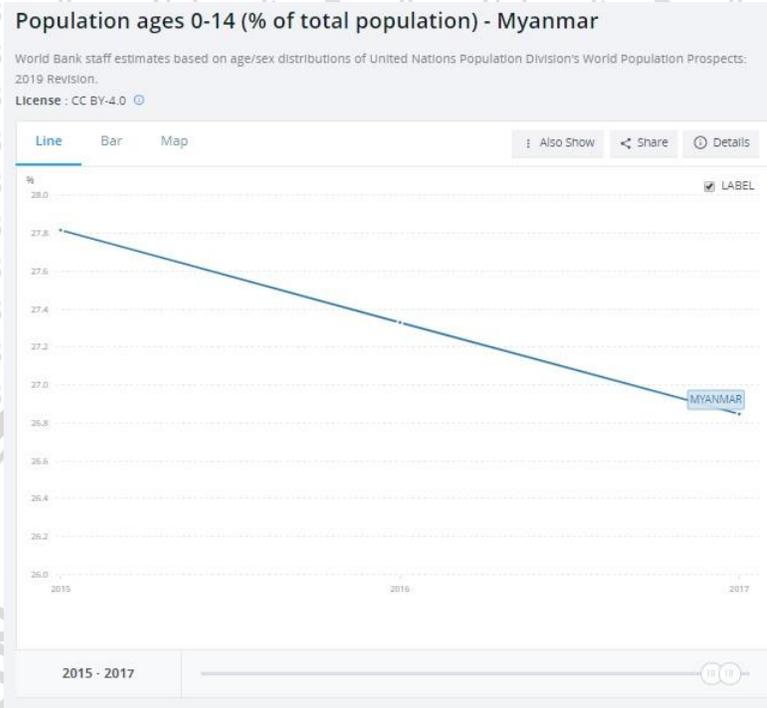
Dari kondisi ini, bisa kita lihat bahwa Myanmar memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah. Kondisi ini lah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku *bride trafficking*. Maka dari itu, indikator ini dapat menjadi faktor peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015 – 2017.

5.1.3 Percentage of Population Below Age 14

Pada artikel jurnal yang berjudul “*What Presicts Human Trafficking?*” Bales menjelaskan apabila suatu negara memiliki profil populasi yang masih muda, yang dimaksud dengan banyaknya jumlah populasi yang berusia dibawah 18 tahun, maka akan menciptakan kompetisi yang ketat terhadap kesempatan dalam mendapatkan pekerjaan¹²². Maka dari itu, pada indikator ini penulis akan melihat bagaimana populasi di Myanmar yang berusia dibawah 14 tahun.

¹²² Bales, *Loc. Cit.* Hal. 7

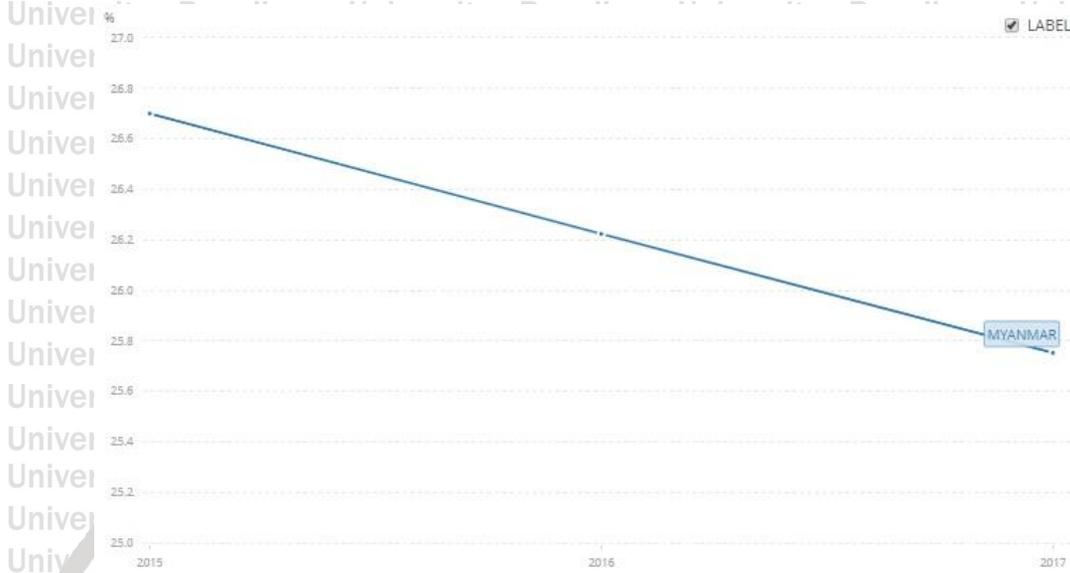
Gambar 9. Grafik Populasi di bawah 14 tahun di Myanmar Pada Tahun 2015 – 2017 (%)



Sumber: <https://data.worldbank.org/indicator/sp.pop.0014.to.zs?end=2017&start=2015>

Pada gambar 9, populasi yang berada di bawah 14 tahun di Myanmar mengalami penurunan dimana pada tahun 2015 persentase populasi dibawah 14 tahun sebanyak 27,8%, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 27,3% dan terus menurun pada tahun 2017 yaitu sebesar 26,8%. Kemudian, kita bandingkan tingkat populasi anak yang berumur dibawah 14 tahun berdasarkan gendernya.

Gambar 10. Grafik Populasi Perempuan Myanmar Berumur 0 - 14 Tahun Pada Tahun 2015 – 2017 (%)



Sumber:

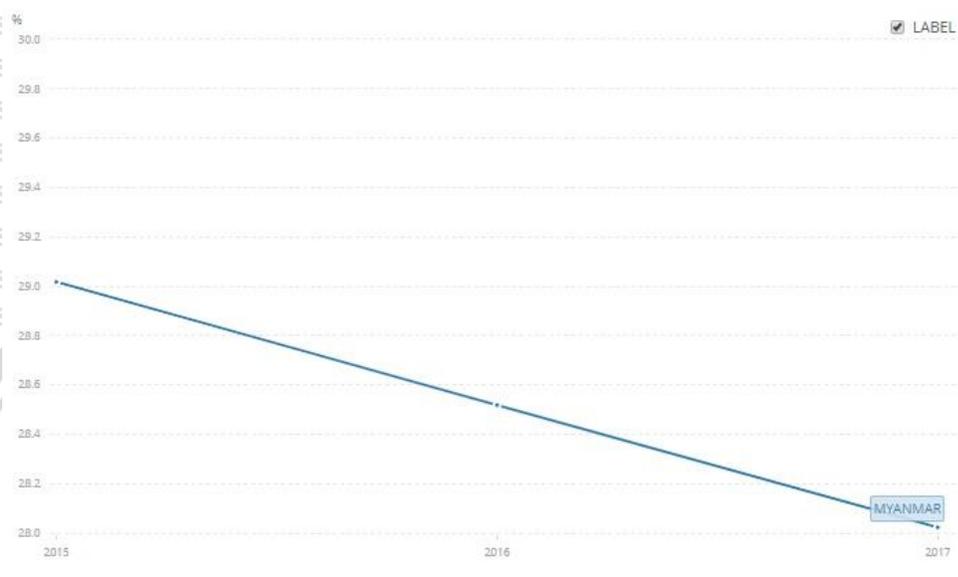
<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.FE.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015>

Apabila dilihat dari gambar 10 diatas, tingkat populasi anak perempuan yang berumur 0 – 14 Tahun didapatkan menurun, dimana pada tahun 2015 berada pada angka 26,7% kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 26,2% dan terus menurun pada tahun 2017 menjadi 25,7%¹²³. Kemudian, kita bandingkan dengan grafik dari gambar 11, tingkat populasi laki-laki yang berumur 0 – 14 pada tahun 2015 – 2017 juga mendapati penurunan, dimana pada tahun 2015 tingkat populasinya berada pada angka 29%, kemudian turun pada tahun 2016 menjadi 28,5% dan terus menurun pada

¹²³ World Bank, "Population Age 0 – 14, female (% of female population)", diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.FE.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015> pada tanggal 27 November 2019.

tahun 2017 menjadi 28%¹²⁴. Namun, ketika dibandingkan, tingkat populasi perempuan dan laki-laki yang berumur 0 – 14 tahun ini lebih kecil di gender perempuan.

Gambar 11. Grafik Populasi Laki-Laki Myanmar Berumur 0 - 14 Tahun Pada Tahun 2015 -2017



Sumber:

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.MA.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015>

International Labour Organization (ILO), pada *Labour Force Survey* yang dilaksanakan pada tahun 2015, sebanyak 1,13 juta anak-anak yang berumur 5 – 17 tahun atau 9,3% dari total keseluruhan populasi anak-anak di Myanmar sudah mulai bekerja¹²⁵. Dalam hal ini, 5,1% diantaranya bekerja di tempat yang dapat membahayakan fisik, mental, maupun perkembangan anak lainnya¹²⁶. Anak-anak yang

¹²⁴ World Bank, “Population Age 0 – 14, male (% of male population)”, diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.MA.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015> pada tanggal 27 November 2019.

¹²⁵ International Labour Organization, “Child Labour in Myanmar”, diakses melalui <https://www.ilo.org/yangon/areas/childlabour/lang--en/index.htm> pada tanggal 10 November 2019.

¹²⁶ *Ibid.*

bekerja di tempat-tempat berbahaya ini sebanyak 24,1% berusia 12 – 14 tahun dan 74,6% berusia 15-17 tahun¹²⁷.

Menurut Bales, tingginya tingkat populasi anak-anak berumur dibawah 14 tahun akan menciptakan kondisi persaingan yang ketat untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Namun, ketika kita lihat tingkat populasi anak-anak berumur dibawah 14 tahun di Myanmar, didapatkan bahwa grafik tingkat populasi tersebut dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami penurunan, terutama untuk gender perempuan. Hal ini menggambarkan bagaimana tingkat kemiskinan yang ada di Myanmar, didukung dengan tingginya jumlah anak-anak yang bekerja di tempat-tempat berbahaya. Kondisi ini kemudian menjadi kemungkinan peluang bagi pelaku *bride trafficking* menjalankan operasinya, selain itu juga banyak anak perempuan Myanmar yang ditelantarkan, dijual, dan dinikahkan secara paksa oleh keluarganya sendiri karena sudah tidak mampu menghidupinya lagi. Hal ini didukung oleh undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan di Myanmar yaitu *Child Marriage Restraint Act 1930* dimana usia minimal laki-laki untuk menikah adalah 18 tahun sedangkan usia minimal perempuan untuk menikah adalah 14 tahun¹²⁸. Kemudian, dibawah undang-undang lainnya yaitu *Christian Marriage Act Section 60*, usia minimal laki-laki untuk menikah adalah 16 tahun dan usia minimal perempuan untuk menikah adalah 13 tahun¹²⁹. Maka dari itu, menurut penulis indikator ini tidak dapat menjadi faktor pendukung

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ Girls Not Brides. "Myanmar", diakses melalui <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/myanmar/> pada tanggal 5 Desember 2019.

¹²⁹ *Ibid.*

peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar karena apabila diaplikasikan dengan pernyataan Bales, faktanya pada tahun 2015 – 2017 persentase jumlah populasi anak yang berumur dibawah 14 tahun didapatkan menurun.

5.1.4 Food Production

Pada indikator ini, Bales menjelaskan bahwa tingkat produksi pangan yang ada di suatu negara dapat menjadi faktor pendorong dari peningkatan *human trafficking* dikarenakan tingkat produksi pangan tersebut menjadi gambaran dari tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan masyarakat dari negara tersebut. Produksi pangan yang dimaksud tersebut merupakan produksi panen yang dimakan dan memiliki nutrisi sehingga kopi dan teh tidak termasuk di dalamnya.

Myanmar termasuk kedalam negara agrikultural yang dimana 70% penduduknya tinggal di daerah pedesaan sehingga sangat bergantung pada sektor pertaniannya sebagai lapangan pekerjaan, sumber pendapatan, dan sumber kehidupan sehari-hari¹³⁰. Makanan pokok utama yang ada di Myanmar adalah beras, kemudian tanaman pangan utama lainnya adalah jagung, gandum, kacang-kacangan, biji minyak, sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian, Myanmar juga merupakan salah satu negara pengekspor kacang polong terbesar di dunia.

¹³⁰ Minn San Thein dan Khin Mar Oo, "Creating Enabling Environments for Nutrition-Sensitive Food and Agriculture to Address Malnutrition", diakses melalui http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/meetings/2017/170330_session4_1_Myanmar.pdf pada tanggal 10 November 2019.

Tabel 6. Zona Agro-Ekologis Utama Myanmar (NBSAP 2011)

Name	Geographical description	Administrative unit	Crop
A. Bago, Kachin River-side Land	Upper Delta, Kachin plain, flat plain along the side of river Ayeyarwady and Sittaung, moderate rainfall (1000 - 2500 mm).	Ayeyarwady, Sagaing, Mandalay, Bago Regions and Kachin State	Rice, pulses, oilseeds, cereals, sugarcane, jute
B. Central Dry Zone	Central dry zone, rainfall less than 1000 mm, high temperature in summer, flat plain, some areas with uneven topography.	Magway, Mandalay, and Sagaing Regions.	Oilseeds, pulses, cotton, other minor crops, irrigated rice
C. Delta and Coastal Lowland	Delta, lowland and mouth of rivers in coastal area, heavy rainfall (>2500 mm)	Ayeyarwady, Yangon, Bago, Taninthayi Regions, Mon, Kayin, and Rakhine States	Rice, pulses, oilseeds and Nipa palm, plantation crops
D. Kachin and Coastal Upland	Mountainous, slope land, heavy rainfall (>2500 mm)	Kachin State, Rakhine State, Taninthayi Region, Mon State, Kayin State, Kayah State, Yangon Region and Bago Region.	Orchard, plantation crops, fruit trees and other upland crops
E. North, East and West Hills	Hilly areas, uneven topography, moderate to heavy rainfall, slope land	Kachin, Chin and Shan States	Upland crops, several crop species in shifting cultivation and fruit trees
F. Upper, Lower Myanmar and Shan Plain	Plain, upper and lower parts outside of central dry zone, plateau.	Kachin and Shan State, Sagaing, Bago, Magway, Mandalay and Yangon Regions.	Upland crops, oilseeds, pulses, vegetable and wheat

Sumber: http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/meetings/2017/170330_session4_1_Myanmar.pdf

Kondisi pertanian yang ada di Myanmar sangat beragam dimana sebagian besar memproduksi padi selama musim hujan dan pada musim dingin dan kering memproduksi kacang-kacangan, biji, minyak, serta jagung¹³¹. Tabel 6 diatas merupakan gambaran dari zona pertanian yang ada di Myanmar. Menurut laporan dari *The World Bank*, produktivitas sektor pertanian Myanmar termasuk ke dalam kategori rendah dimana pada satu hari, panen padi yang didapatkan di Myanmar hanya sebanyak 23 kg, sangat kecil dibanding 429 kg per hari di Vietnam, dan 547 kg di Thailand¹³². Kemudian, upah yang didapatkan dari produksi beras di Myanmar juga sangat rendah

¹³¹ The World Bank, "Myanmar: Analysis of Farm Production Economics", diakses melalui <https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-analysis-of-farm-production-economics> pada tahun 10 November 2019.

¹³² *Ibid.*

di banding dengan negara tetangganya yang lain. Pada tahun 2013-2014, keuntungan dari produksi beras *monsoon* rata-rata sebesar 114 US Dolar/hektar¹³³.

Rendahnya produktivitas dari produksi pangan yang ada di Myanmar ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem publik yang tidak menyediakan benih yang cukup baik serta sektor swasta yang tidak dapat merangsang impor benih yang cukup baik, kemudian tingkat aplikasi pupuk yang tidak efisien dan komposisi yang kurang sehingga nutrisi yang dihasilkan tidak sesuai, dan cakupan irigasi di Myanmar yang relatif rendah¹³⁴. Pada tahun 2014-2015, hanya 15% lahan pertanian yang menjadi sistem irigasi publik, angka ini lebih rendah daripada negara-negara tetangga Myanmar¹³⁵. Kemudian, kasus malnutrisi yang dialami masih sangat tinggi. Myanmar merupakan negara ketiga yang paling kekurangan gizi (*malnourished*) setelah Timor Leste dan Kamboja¹³⁶. Hal ini dikarenakan sulitnya akses terhadap sumber daya, pendidikan, perilaku, dan praktik secara kultural yang masih perlu dibenahi guna meningkatkan nutrisi makanan yang dikonsumsi¹³⁷.

Sektor pertanian merupakan tulang punggung dari perekonomian Myanmar, dimana sektor ini dapat mempekerjakan 2/3 dari total populasi Myanmar dan dapat menghasilkan 1/3 total GDP yang ada¹³⁸. Perempuan-perempuan yang tinggal di

¹³³ *Ibid.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

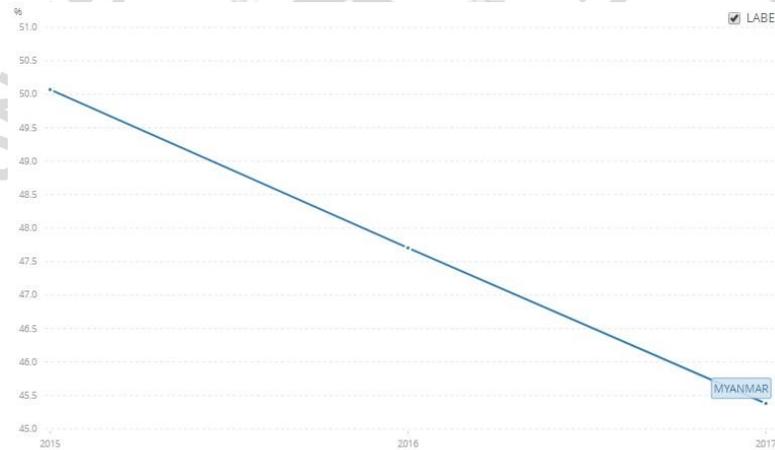
¹³⁶ Thin Lei Win, "Myanmar is Still the Third-Most Malnourished Country in Southeast Asia", diakses melalui <https://www.mmtimes.com/national-news/18665-myanmar-is-still-the-third-most-malnourished-country-in-southeast-asia.html> pada tanggal 11 November 2019.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ FAO, "Women, the Unsung Heroes of Myanmar's Agriculture Economy", diakses melalui <http://www.fao.org/myanmar/news/detail-events/en/c/385218/> pada tanggal 30 November 2019.

pedesaan ini sebagian besar menjadi pekerja di sektor pertanian, mulai dari panen, ternak hewan, hingga sektor perikanan. Namun, perempuan yang bekerja di sektor pertanian kerap kali tidak mendapatkan keadilan atau kesetaraan dengan pekerja laki-laki. Menurut studi yang dilakukan oleh *Food and Agriculture Organization* (FAO) pada tahun 2015, ditemukan bahwa pada level pemerintahan hanya beberapa perempuan yang menjadi administrator dari 330 kota dan hanya 0,001% jumlah perempuan yang berada di administrator desa¹³⁹.

Gambar 12. Grafik Populasi Perempuan Myanmar yang Bekerja di Sektor Pertanian Pada Tahun 2015 - 2017



Sumber:

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015>

Ketimpangan jumlah pekerja laki-laki dan perempuan inilah yang menyebabkan ketimpangan tingkat kesejahteraan bagi pekerja laki-laki dan perempuan, dimana pekerja perempuan mendapatkan gaji yang lebih sedikit daripada pekerja laki-laki, dan pekerja perempuan cenderung lebih sulit untuk mendapatkan

¹³⁹ *Ibid.*

pinjaman dan memegang aset karena sebagian sumber peminjaman formal hanya akan meminjamkan kepada kepala rumah tangga yaitu mayoritas laki-laki¹⁴⁰. Seperti yang bisa dilihat di gambar 12 diatas, tingkat populasi perempuan Myanmar yang bekerja di sektor pertanian mendapatkan penurunan, dimana pada tahun 2015 berada pada angka 50%, kemudian menurun di tahun 2016 menjadi 47,7%, dan kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 45,3%. Tentunya, ketidakadilan dan ketimpangan kesejahteraan yang didapatkan oleh pekerja laki-laki dan perempuan dapat menjadi pendorong bagi para perempuan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik dan kemudian kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku *bride trafficking*.

Kondisi dalam industri pertanian yang kurang baik bagi perempuan ini memungkinkan bagi para perempuan untuk mencari pekerjaan di bidang pertanian di luar Myanmar. Salah satu korban *bride trafficking* bernama Ja Htoi Tsawm yang diwawancarai oleh *Human Rights Watch* menceritakan bagaimana ia sering pergi ke China untuk bekerja sebagai petani di lading tebu untuk beberapa bulan demi menghidupi keluarganya setelah suaminya yang seorang pengguna narkoba meninggalkan keluarganya, namun kemudian pada tahun 2013 Ja Htoi Tsawm diculik oleh temannya yang juga bekerja di ladang tebu tersebut dimana dia di tahan selama dua tahun¹⁴¹. Maka dari itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kondisi ini juga yang mempermudah bagi pelaku untuk mendapatkan korban.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ Human Rights Watch, *Op. Cit.*

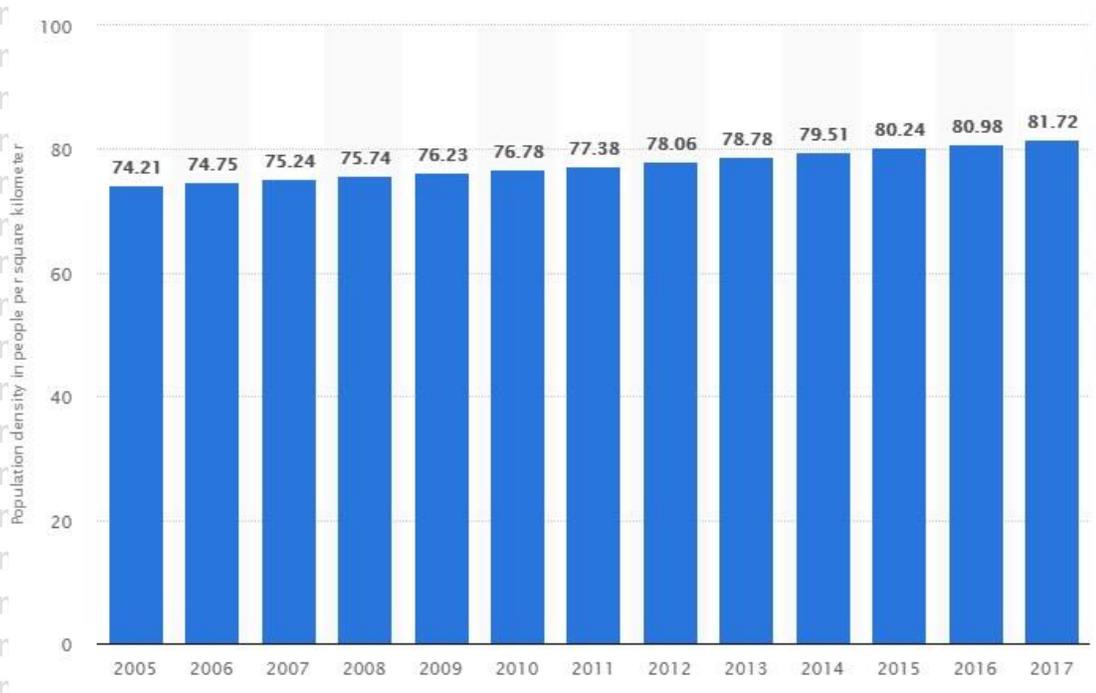
Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan diatas, Myanmar merupakan suatu negara yang mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomiannya. Namun, bisa dilihat bahwa Pemerintah Myanmar pun masih kesulitan dalam menjaga sektor pertaniannya, hal ini dilihat dari produktivitas hasil pertanian yang rendah, serta masih tingginya tingkat malnutrisi yang ada di Myanmar. Kemudian, untuk kesejahteraan pekerjaannya pun, pekerja perempuan mendapatkan kesejahteraan yang lebih sedikit daripada laki-laki, dimana masih banyak ketidakadilan yang dirasakan perempuan sehingga bisa dilihat pada tahun 2015 – 2017 jumlah pekerja perempuan di sektor pertanian mengalami penurunan. Menurut penulis, kondisi kemiskinan yang dialami oleh perempuan di Myanmar, dan rendahnya kesejahteraan juga keadilan yang bisa didapatkan oleh perempuan di Myanmar, yang dimanfaatkan oleh pelaku *bride trafficking*. Karena, semakin perempuan tersebut berada di kondisi yang putus asa, maka akan semakin mudah untuk pelaku dalam merekrut dan menipu korban tersebut hingga dikirim ke negara tujuan. Maka dari itu, menurut penulis indikator ini menjadi faktor pendukung peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015–2017.

5.1.5 Population Pressure

Menurut Bales, tekanan populasi yang ada di suatu negara menggambarkan bagaimana perkembangan penduduk yang ada di negara tersebut, semakin tinggi tingkat populasi yang ada di negara tersebut maka semakin tinggi pula persaingan atau kompetisi yang akan terjadi dalam mencari pekerjaan seiring dengan tingkat

pengangguran yang akan terus meningkat¹⁴². Pada indikator ini, penulis akan melihat bagaimana tekanan populasi yang ada di Myanmar dengan menghitung jumlah penduduk per area kilometer persegi.

Gambar 13. Diagram Tekanan Populasi di Myanmar Pada Tahun 2005 - 2017



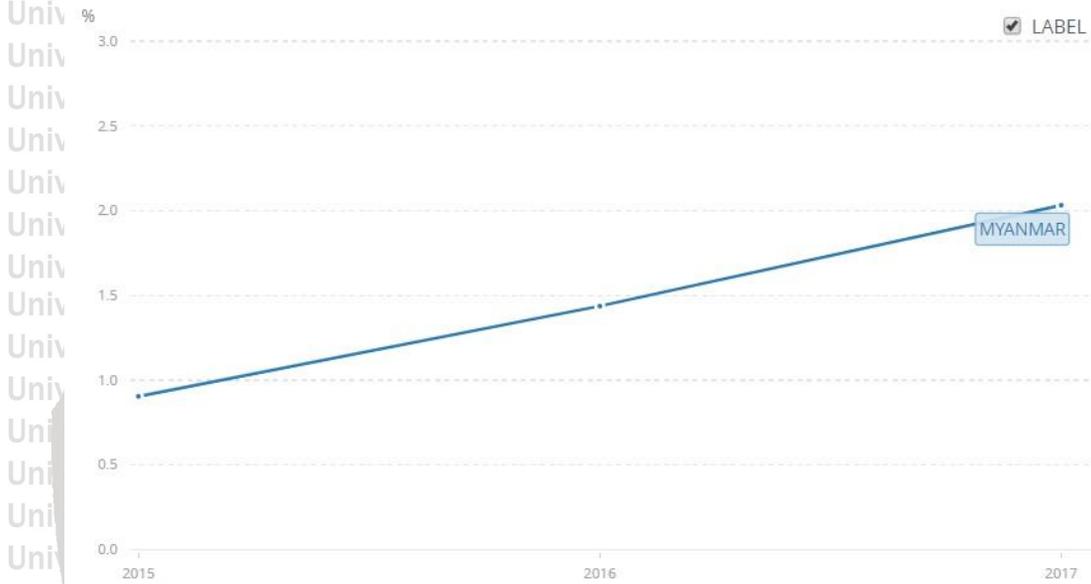
Sumber: <https://www.statista.com/statistics/778483/myanmar-population-density/>

Gambar 13 diatas merupakan grafik tingkat tekanan populasi di Myanmar selama 12 tahun terakhir per kilometer persegi. Bisa dilihat bahwa tekanan populasi di Myanmar terus meningkat, hingga pada tahun 2015 sampai 2017 mencapai angka 80,24 per kilometer persegi pada tahun 2015, 80,98 per kilometer persegi pada tahun 2016, hingga 81,72 per kilometer persegi pada tahun 2017. Tekanan populasi di Myanmar yang terus meningkat tiap tahunnya mengakibatkan pemerintah Myanmar

¹⁴² Bales, *Op. Cit.* Hal 13.

yang kesulitan dalam memfasilitasi penduduk Myanmar untuk layanan publik seperti pengolahan limbah, layanan kesehatan, dan pembuatan kebijakan¹⁴³.

Gambar 14. Grafik Presentase Populasi Perempuan Myanmar yang Tidak Memiliki Pekerjaan Pada Tahun 2015 – 2017 (%)



Sumber :

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.FE.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015>

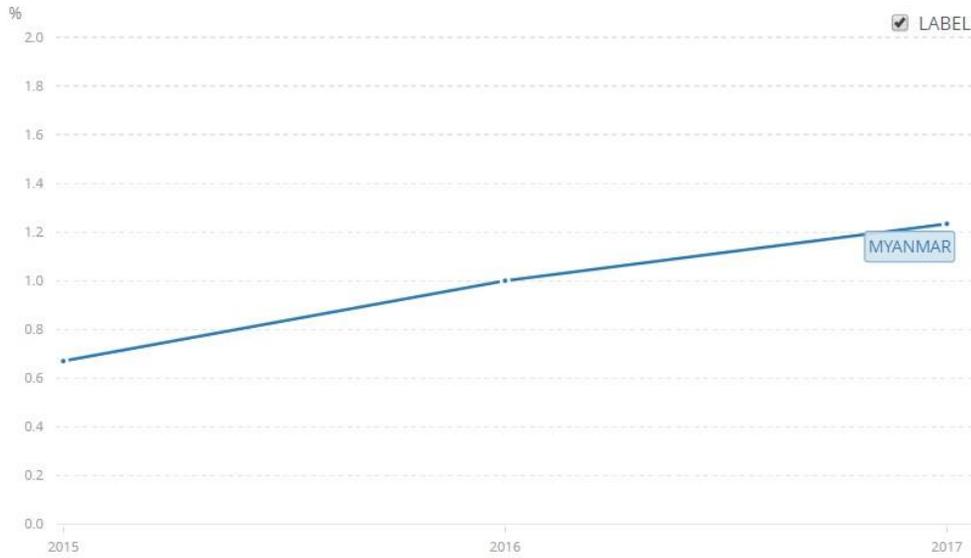
Berdasarkan gambar 14 diatas, persentase populasi perempuan yang tidak memiliki pekerjaan di Myanmar meningkat dari tahun 2015 sampai 2017, dimana pada tahun 2015 persentase populasi perempuan yang tidak memiliki pekerjaan berada di angka 0,905%, pada tahun 2016 berada di angka 1,437%, dan terus meningkat pada tahun 2017 hingga mencapai angka 2,032%¹⁴⁴. Sedangkan, gambar 16 dibawah

¹⁴³ Hein Thar, "Government Seeks to Tame Hlaing Tharyar, Yangon's Wild West", diakses melalui <https://frontiermyanmar.net/en/government-seeks-to-tame-hlaing-tharyar-yangons-wild-west> pada tanggal 28 November 2019.

¹⁴⁴ World Bank, "Unemployment, female (% of female labor force) (modeled ILO estimate)", diakses melalui

merupakan grafik dari persentase populasi laki-laki di Myanmar yang tidak memiliki pekerjaan pada tahun 2015 – 2017 dimana persentase populasi ini mengalami peningkatan, pada tahun 2015 persentase populasi laki-laki yang tidak memiliki pekerjaan berada pada angka 0,67%, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 1%, dan terus meningkat pada tahun 2017 menjadi 1,234%¹⁴⁵.

Gambar 15. Persentase Populasi Laki-Laki Yang Tidak Bekerja Pada Tahun 2015 - 2017 (%)



Sumber:

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.MA.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015>

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.FE.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015> pada tanggal 28 November 2019.

¹⁴⁵ World Bank, "Unemployment, Male (% of male labor force) (modeled ILO estimated)", diakses melalui

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.MA.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015> pada tanggal 28 November 2019.

Apabila dibandingkan, persentase populasi perempuan dan laki-laki yang tidak bekerja di Myanmar pada tahun 2015 – 2017 mengalami peningkatan, namun bisa dilihat bahwa persentase populasi perempuan yang tidak bekerja lebih tinggi daripada laki-laki. Selain itu, Bales juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepadatan penduduk yang ada di suatu negara, maka tingkat kompetisi dan persaingan untuk pekerjaan akan semakin tinggi.

Daerah perbatasan Myanmar dan China ini ditemukan adanya kebutuhan akan pekerja di bidang jasa dan pertanian, dimana jumlah pekerja perempuan dari Myanmar ke China ditemukan cukup banyak, mereka berpindah ke China untuk mencari pekerjaan dimana untuk orang yang tidak memiliki izin secara legal untuk bekerja di China pun, pekerjaan dan gaji yang ditawarkan masih lebih baik daripada yang ada di Myanmar, khususnya di daerah perbatasannya yaitu Kachin dan Shan Utara¹⁴⁶.

Sebagian besar korban *bride trafficking* yang diwawancara oleh *Human Rights Watch* menyatakan bahwa pada awalnya mereka berhasil di rekrut karena dijanjikan akan diberikan pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, namun kemudian ketika mereka sampai di China, orang yang merekrut mereka tersebut menjual mereka¹⁴⁷.

Sedikitnya jumlah lapangan pekerjaan yang ada di Myanmar dan tingginya tingkat populasi perempuan yang tidak memiliki pekerjaan memungkinkan perempuan terjebak dalam kondisi kemiskinan yang kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku *bride trafficking*. Fenomena ini juga menjadi tren di Myanmar karena banyaknya

¹⁴⁶ Human Rights Watch, *Op. Cit.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

jumlah produk untuk diperdagangkan, yaitu perempuan. Maka dari itu, menurut penulis indikator ini dapat menjadi faktor pendukung peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015 – 2017.

5.1.6 Conflict and Social Unrest

Myanmar merupakan salah satu negara multikultural di dunia yang memiliki ratusan etnis dengan budaya yang berbeda-beda di dalamnya. Menurut *World Population Review*, terdapat 135 etnis yang diakui oleh pemerintah Myanmar dimana populasi Myanmar didominasi oleh etnis Bamar sebanyak 68%, Shan 10%, Kayin 7%, Rakhine 4%, Chinese 3%, dan sisanya merupakan etnis minoritas seperti Mon, Indian, Kachin, Chin, Anglo-Indians, Nepali, dan Anglo Burmese¹⁴⁸.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 4, Myanmar memiliki sejarah konflik internal dengan penduduk yang beretnis minoritas sejak tahun 1948. Konflik internal ini berasal dari diskriminasi yang dilakukan pemerintah Myanmar kepada penduduk yang beretnis minoritas. Daerah Kachin dan Shan Utara merupakan daerah yang memiliki sejarah konflik internal paling besar di Myanmar, dimana dilaporkan sebanyak 120.000 penduduk Kachin pergi melarikan diri dari daerah konflik sehingga menjadi daerah yang paling buruk dalam krisis humaniternya¹⁴⁹. Pada tahun 1961, terbentuk sebuah gerakan pertahanan bersenjata oleh penduduk Kachin yang diebut

¹⁴⁸ World Population Review, "Myanmar Population 2019", diakses melalui <http://worldpopulationreview.com/countries/myanmar-population/> pada tanggal 23 Agustus 2019.

¹⁴⁹ Erin M. Kamler, "Women of the Kachin Conflict: Trafficking and Militarized Femininity on the Burma-China Border", diakses dari http://www.burmalibrary.org/docs21/Kamler-2015_Women_of_the_Kachin_Conflict_Trafficking_and_Militarized_Femininity_on_the_Burma-Chin_Border-en.pdf pada tanggal 23 Agustus 2019

dengan *Kachin Independence Organization* (KIO) untuk melawan pemerintah pusat, organisasi ini menjadi kelompok pertahanan etnis terbesar yang ada di Myanmar¹⁵⁰.

KIO juga memiliki badan persenjataan yaitu *Kachin Independence Army* (KIA).

Kondisi daerah yang terus berkonflik selama bertahun-tahun ini menyebabkan ratusan ribu penduduk melarikan diri dan terlantar di daerah lain yang kemudian disebut dengan *Internally Displaced Person* (IDP). Jumlah masyarakat yang bermigrasi tersebut merupakan salah satu aliran migrasi terbesar di kawasan Asia Tenggara¹⁵¹. Setelah bernegosiasi untuk menyepakati gencatan senjata antara pemerintah Myanmar dengan KIO pada tahun 1993, akhirnya pada tahun 1994 KIO dan Pemerintah Myanmar menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan keinginan utama dari KIO adalah perkembangan regional di daerah Kachin¹⁵². Namun 17 tahun kemudian, konflik kembali pecah antara KIO dan Pemerintah Myanmar dikarenakan setelah perjanjian tersebut disepakati, Pemerintah Myanmar memutuskan bahwa seluruh kelompok pemberontak yang menandatangani kesepakatan gencatan senjata, harus menjadi bagian dari bagian dari Pemerintah Myanmar dan menerima seluruh perintah dari pusat¹⁵³.

¹⁵⁰ Kachin's Women's Association Thailand, "*Burma's Covered War: Atrocities Against the Kachin People*", diakses melalui <https://burmacampaign.org.uk/reports/burmas-covered-up-war-atrocities-against-the-kachin-people/> pada tanggal 24 Agustus 2019.

¹⁵¹ Thanawat Pimoljinda & Apiradee Thianthong, *op. cit.* Hlm. 526

¹⁵² The Irrawaddy, "*A Chronology of Myanmar's Kachin Conflict*", diakses dari <https://www.irrawaddy.com/news/military/chronology-kachin-conflict.html> pada tanggal 30 Agustus 2019.

¹⁵³ Human Rights Watch, *Op. Cit.* Hal. 13

Pada tahun 2009, KIO tidak menyetujui keputusan tersebut dan mulai merekrut masyarakat Kachin untuk menjadi pasukannya, hingga pada tahun 2010 ketegangan antara KIO dengan Pemerintah semakin meningkat dan akhirnya pada tahun 2011 konflik pun pecah dan menjadi akhir dari kesepakatan gencatan senjata antara KIO dengan Pemerintah Myanmar yang mengakibatkan lebih dari 100.000 masyarakat Kachin dan etnis minoritas lainnya yang harus terlantar.¹⁵⁴

Pada tahun 2015 Pemerintah Myanmar dengan 8 dari 15 kelompok etnis bersenjata (EAOs) menandatangani perjanjian gencatan senjata yang disebut dengan *Nationwide Ceasefire Agreement* (NCA) sebagai proses perdamaian dan rekonsiliasi, namun dengan ketentuan pemerintah tetap membuka pintu untuk bisa terus berdialog dan berproses hingga seluruh kelompok menandatangani perjanjian ini¹⁵⁵. Berdasarkan perjanjian ini, kelompok etnis bersenjata yang menandatangani masih bisa memiliki persenjataannya namun keseimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan kelompok etnis tersebut belum dibahas.

Meskipun terdapat beberapa upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar dalam menanggulangi permasalahan konflik internal dengan kelompok etnis bersenjata, namun dampak yang dialami penduduk setempat sangat besar. Salah satu korban *bride trafficking* dari Myanmar bernama Ja Tawng yang dijual pada tahun 2015 menceritakan mengenai kondisinya sebelum ia dijual di China:

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Jack Myint, "The Truth About Myanmar's New Ceasefire Agreement", diakses melalui <https://thediplomat.com/2015/10/the-truth-about-myanmars-new-ceasefire-agreement/> pada tanggal 1 Desember 2019.

“[We] lost everything we had. We had to leave everything when we ran from our village. I became separated from my husband. I stayed in the jungle and hid there with my babies. When my babies became hungry, I had to check the conditions outside the jungle. If it seemed stable, I would sneak out and go to the sugarcane field to find food for them. But after staying there for a while, the jet fighter came. They shot everything they could see. They shot for four or five days and they started from the early morning from seven or eight a.m. They shot villagers and whomever they saw. They didn’t care. All the villagers had to run and hide. All the villagers fled. The kids had to hide under rocks. My children and I hid in banana fields. The road was very muddy, so the kids cried out a lot. They lost their shoes in the muddy road. The jet fighters’ missiles almost hit us. But we got away.”¹⁵⁶

Bisa dilihat dari pernyataan Ja Tawng bahwa kehidupannya sangat sulit berada di daerah konflik. Ja Tawng juga menjelaskan bagaimana keluarga mereka terus berpeleceh untuk mencari tempat yang aman, dan mendapati kesulitan untuk mengembalikan anak-anaknya ke sekolah. Hingga pada akhirnya seorang perempuan menawarkan Ja Tawng bekerja di sebuah perkebunan pisang yang ada di China, yang kemudian menjual Ja Tawng.

Selain Ja Tawng, beberapa perempuan korban *bride trafficking* yang diwawancarai *Human Rights Watch* berasal dari daerah kamp IDP. Dimana seperti yang sudah dijelaskan di bab 4 sebelumnya bahwa kamp-kamp IDP ini untuk orang-orang yang melarikan diri dari daerah konflik. Namun, kehidupan yang ada di kamp IDP inipun tidak mudah. Luas kamp-kamp IDP ini sangat terbatas, dan penuh sesak karena banyaknya orang yang menghuni sehingga meningkatkan kerapuhan kondisi keluarga dan menyebabkan banyak perpisahan keluarga. Salah satu korban *bride trafficking* bernama Khawng Shawng menceritakan bahwa ketika Khawng Shawng dan suaminya

¹⁵⁶ Human Rights Watch, *Op. Cit.*

tinggal di kamp IDP, mereka memutuskan untuk berpisah dan salah satunya harus pergi ke China demi menghidupi keluarganya. Kemudian sepasang orang China mendatangi kamp IDP mencari orang yang bisa memasak untuk sebuah perkantoran dengan menjanjikan gaji sebesar 1.500 yuan per bulannya (240 US Dolar), Khawng Shawng pun sepakat untuk bekerja dengan mereka, namun kemudian sesampainya dia di China, Khawng Shawng dijual dengan harga 20.000 yuan (3.200 US Dolar)¹⁵⁷.

Maka dari itu, kondisi konflik internal yang ada di Myanmar selain menyebabkan kesulitan ekonomi bagi para penduduknya dan anak-anak yang tumbuh besar di lingkungan yang keras, mendapatkan kekerasan, hingga penelantaran sehingga kondisi ini lah yang membuat penduduk Myanmar terutama perempuan menjadi rentan akan *bride trafficking*. Berdasarkan penjelasan dari indikator ini, penulis melihat bahwa indikator *social and conflict unrest* ini menjadi faktor peningkatan kasus *bride trafficking* dari Myanmar.

5.2 Trafficking TO a Country

Setelah penulis melakukan analisa pada variabel pertama yaitu *Trafficking FROM a Country*, pada sub bab ini penulis akan melakukan analisa dan mengimplementasikan 5 (lima) indikator yang ada pada variabel *Trafficking TO a Country* yaitu faktor penarik negara China dalam peningkatan kasus *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015-2017. Adapun indikator yang ada di dalam

¹⁵⁷ *Ibid.*

variabel ini yaitu; *% of Male Population Age 60+, Government Corruption, Infant Mortality, Food Production, dan Energy Consumption.*

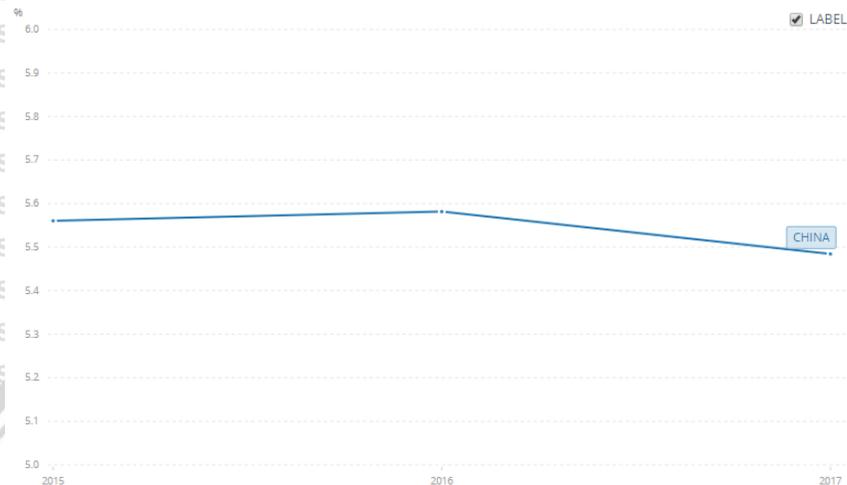
5.2.1 Percentage of Male Population Age 60+

Pada indikator ini, Bales menjelaskan bahwa persentase populasi laki-laki yang berumur diatas 60 tahun di negara tujuan menjadi indikator penting, karena tingginya persentase populasi laki-laki diatas 60 tahun tersebut menciptakan kebutuhan akan jasa korban *human trafficking* dikarenakan kekurangan pekerja yang lebih muda yang mau mengambil pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skill jobs*)¹⁵⁸. Maka dari itu, pada indikator ini penulis akan menganalisis bagaimana persentase populasi laki-laki berusia diatas 60 tahun di China untuk melihat bagaimana pengaruhnya dengan *bride trafficking* dari Myanmar ke China.

¹⁵⁸ Bales, *Op. Cit.*, Hal. 11



Gambar 16. Grafik Persentase Populasi Laki-Laki China Berusia diatas 60 Tahun Pada Tahun 2015 – 2017 (%)



Sumber:

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.6064.MA.5Y?end=2017&locations=CN&start=2015>

Bisa dilihat dari grafik di gambar 16 diatas, bahwa persentase populasi China yang berusia 60 keatas dari tahun 2015 – 2017 terdapat peningkatan kemudian penurunan. Pada tahun 2015 terdapat 5.56% kemudian meningkat tahun 2016 meningkat menjadi 5.581% dan pada tahun 2017 menurun menjadi 5.484% dari jumlah populasi yang ada di China. Bisa dilihat bahwa pertumbuhan populasi berusia 60 tahun keatas meskipun terdapat penurunan dan peningkatan namun tidak menjadi populasi mayoritas di China.

Tabel 7. Proporsi Populasi China Berdasarkan Umur

Age Group	Total Age Group Population	Share of Total Population	Dependency Ratio
Youth (0-14 years old)	254,930,371	17.71%	25.2
Working Age Population (15-64 years)	1,012,131,229	70.32%	N.A.
Elderly (65+ years old)	172,262,174	11.97%	17.0
Total Dependency Ratio (Youth + Elderly)	427,192,545	29.68%	42.2

Sumber: <https://www.worldometers.info/demographics/china-demographics/>

Bisa dilihat pada tabel 7 diatas, bahwa populasi yang paling banyak di China merupakan umur 15 – 64 tahun yang dimana merupakan umur pekerja. Sehingga, apabila diimplementasikan dari indikator ini maka jumlah populasi laki-laki di China yang berusia 60 tahun keatas terbukti tidak memiliki pengaruh yang cukup besar.

Namun, ditemukan bahwa berdasarkan hasil dari wawancara korban *bride trafficking* yang dilakukan oleh *Human Rights Watch*, beberapa korban menyatakan bahwa mereka diperlakukan sebagai “istri” dan juga buruh yang tidak dibayar. Salah satu dari korban yaitu Ja Seng Nu, menceritakan kondisi kehidupannya selama menjadi “istri” seorang petani semangka di daerah Shanghai. Ja Seng Nu dikunci di dalam sebuah kamar dan diperkosa berkali-kali oleh anak dari keluarga petani tersebut demi mendapatkan keturunan secepatnya, kemudian Ja Seng Nu juga harus bangun pagi dan membuatkan sarapan untuk keluarganya, dan setelah itu bekerja di ladang semangka selama seharian penuh¹⁵⁹. Salah satu korban lainnya yaitu Tsawm Nu Ra, juga menceritakan bagaimana ia dijual di umur 16 tahun dan di sekap di dalam sebuah

¹⁵⁹ Human Rights Watch, *Op. Cit.*

ruangan. Tiga bulan kemudian, Tsawm Nu Ra keguguran dari kehamilannya dan dipaksa untuk bekerja di ladang tebu milik keluarga laki-laki yang mem"beli" nya, dan juga dipaksa untuk mengerjakan pekerjaan rumah¹⁶⁰.

Apabila menurut Bales tingginya jumlah populasi laki-laki yang berusia 60 tahun keatas berpengaruh menjadi faktor penarik karena menciptakan pasar atau kebutuhan akan jasa korban *human trafficking* untuk mengambil pekerjaan dengan keterampilan rendah (*low skill jobs*), maka dalam kasus *bride trafficking* ini juga dapat dibuktikan dengan banyaknya jumlah korban yang juga dipekerjakan secara paksa tanpa dibayar untuk mengerjakan pekerjaan rumah ataupun di ladang pertanian milik keluarga pembeli. Maka dari itu, menurut penulis indikator ini dapat menjadi faktor penarik dari korban *bride trafficking* ke China.

5.2.2 Government Corruption

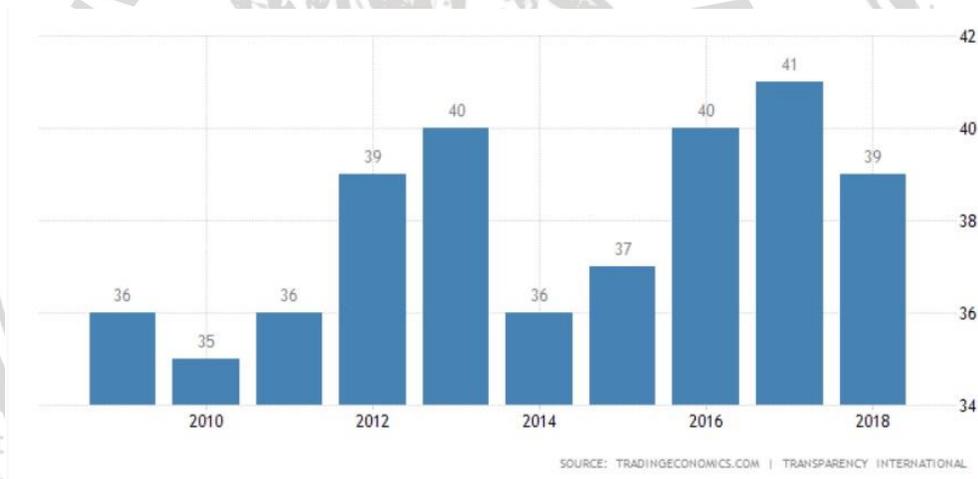
Menurut Bales, apabila negara destinasi memiliki tingkat korupsi yang tinggi maka tentunya akan mempengaruhi proses *human trafficking* lebih mudah karena praktek suap akan lebih mudah dilakukan. Pada indikator ini, penulis akan mengimplementasikan indikator ini dengan melihat indeks korupsi yang ada di China dengan menggunakan *Corruption Perception Index*. *Corruption Perception Index* menjelaskan bagaimana negara yang memiliki nilai dan peringkat yang rendah dalam indeksnya memiliki kecenderungan aktivitas korupsi yang sering terjadi sehingga penduduk maupun pelaku *bride trafficking* di negara tersebut dapat dengan mudah

¹⁶⁰ *Ibid.*

melakukan praktek penyuaipan dan pemerasan terhadap pejabat resmi negara hingga penegak hukum negara.

Apabila dilihat dari peringkatnya, China menempati posisi menengah kebawah dan skor nya berada di bawah 50 sehingga dapat dikatakan bahwa China memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Apabila dilihat dari gambar 17 dibawah, bisa dilihat bahwa terdapat peningkatan skor dari indeks korupsi yang ada di China pada tahun 2015 – 2017, dimana pada 2015 berada pada nilai 37, kemudian meningkat sampai pada nilai 40 di tahun 2016, dan kembali meningkat hingga nilai 41 pada tahun 2017.

Gambar 17. Grafik Indeks Korupsi China dari tahun 2009 - 2018



Sumber: <https://tradingeconomics.com/china/corruption-index>

Sebagian besar praktek korupsi yang ada di China merupakan *bribery* (suap), serta adanya campur tangan politik terhadap fasilitas public dan pengadilan. Praktek korupsi ini biasa disebut dengan *Guanxi*, yaitu ‘hadiah’ yang dikategorikan sebagai suapan menurut perusahaan asing dan undang-undang anti-korupsi nasional dan

internasional¹⁶¹. Maka dari itu, perusahaan-perusahaan disarankan untuk memperhatikan tipe, nilai, peristiwa, dan sifat hubungan bisnis dari hadiah yang diterima tersebut.

Menurut *Global Corruption Barometer* (GCB) pada tahun 2017, 26% dari responden survey tersebut menyatakan bahwa mereka perlu untuk melakukan penyuapan terhadap penggunaan pelayanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pengadilan¹⁶². Sistem peradilan yang ada di China memiliki risiko yang cukup tinggi untuk terjadinya penyuapan, dimana tujuan dari dilakukannya penyuapan dan pengiriman uang secara tidak teratur tersebut guna sebagai imbalan demi keputusan pengadilan yang menguntungkan. Kemudian, korupsi yang ada di dalam kepolisian juga marak terjadi dimana layanan kepolisian dapat disuap untuk mendapatkan perlindungan dari penegakan hukum¹⁶³. Korupsi yang terjadi pada layanan publik dimana pihak yang membutuhkan layanan tersebut harus memberikan suapan dana untuk dapat mempercepat prosesnya. Tingginya resiko korupsi yang terjadi di layanan publik ini disebabkan oleh birokrasi pemerintah yang tidak efisien dan rendahnya gaji karyawan pemerintahan¹⁶⁴.

Pada kasus *bride trafficking*, beberapa korban *bride trafficking* yang diwawancarai oleh *Human Rights Watch* menceritakan bagaimana polisi dan petugas

¹⁶¹ GAN Integrity, "China Corruption Report", diakses melalui <https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/china/> pada tanggal 11 November 2019.

¹⁶² China Power, "How Does Corruption Hinder China's Development", diakses melalui <https://chinapower.csis.org/china-corruption-development/> pada tanggal 11 November 2019.

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

China yang ada di perbatasan tidak melakukan apapun dan membiarkan mereka lewat ketika mereka melewati perbatasan, padahal mereka tidak memiliki Kartu Tanda

Penduduk dan paspor¹⁶⁵. Salah satu korban *bride trafficking* juga menceritakan dimana

keluarga pembeli dari korban melakukan suap kepada polisi perbatasan China sehingga korban dikembalikan ke rumah keluarga pembeli tersebut¹⁶⁶. Secara keseluruhan,

berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan *Human Rights Watch* dengan korban

bride trafficking, sebagian besar menceritakan bagaimana polisi China tidak

melakukan upaya-upaya yang signifikan dalam memberantas kasus *bride trafficking*.

Terlebih lagi dengan perbedaan bahasa, sehingga seringkali membutuhkan jasa

penerjemah untuk dapat berkomunikasi dengan polisi China, selain itu juga apabila

keluarga korban atau NGO yang meminta bantuan mencari korban *bride trafficking*,

banyak polisi China yang menolak untuk bergerak apabila informasi yang diberikan

tidak lengkap yaitu seperti nama pelaku, alamat rumah, atau nomor ID pelakunya.

Jarang sekali kasus *bride trafficking* ini ditangani secara serius hingga pengadilan,

adapun kasus dimana polisi menangkap pelaku *bride trafficking*, namun proses

selanjutnya bahwa pelaku tersebut diadili atau tidak, korban tidak mengetahuinya.

Bahkan, banyak korban ketika melarikan diri dari rumah pembeli ke kantor polisi,

mereka kemudian diperlakukan sebagai pelaku kriminal yang melanggar peraturan

imigrasi dimana biasanya berakhir dengan mendeportasi dan memenjarakan korban

daripada mencari dan menindak pelaku *bride trafficking*.

¹⁶⁵ Human Rights Watch, *Op. Cit.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan mengenai tingkat korupsi yang ada di China, bisa dilihat bahwa China memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi.

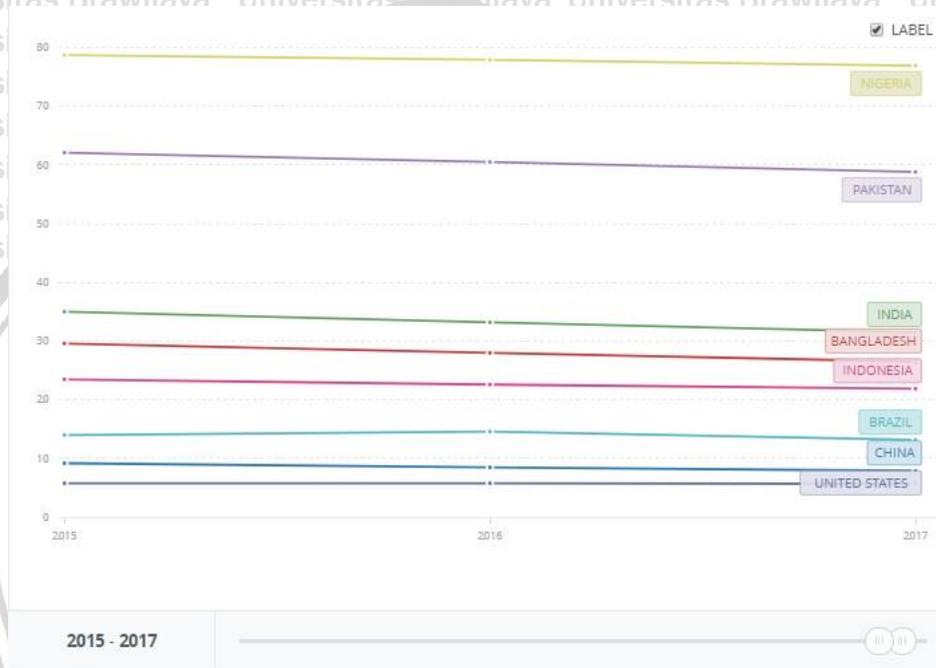
Dilihat dari nilai dan peringkat yang berada pada menengah kebawah, dan praktek-praktek korupsi yang mudah dilakukan kepada pihak pemerintah untuk dapat mengakses layanan publik menggunakan suapan. Dalam kasus *bride trafficking* ini juga bisa dilihat bahwa praktek korupsi marak terjadi di kepolisian China dan pengadilan China, dimana performa kepolisian dalam menangani kasus *bride trafficking* tidak maksimal, pihak kepolisian masih bisa disuap, proses pengadilan berjalan lambat, dan juga masih sedikit kasus pelaku *bride trafficking* yang ditangkap dan diadili. Maka dari itu, hasil dari analisis indikator ini, penulis melihat bahwa faktor tingkat korupsi yang ada di China mempengaruhi peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China karena tingginya tingkat korupsi yang ada di China mempermudah pelaku *bride trafficking* untuk melakukan operasinya yaitu mengirimkan korban dari Myanmar ke China.

5.2.3 Infant Mortality

Pada indikator ini, Bales melihat bahwa tingginya tingkat kematian bayi (*infant mortality*) merujuk pada tingkat kemiskinan yang ada di negara tersebut. Tingkat kematian bayi ditunjukkan dengan ketika seorang bayi meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun dan dihitung per 1000 bayi yang telah lahir. Tingkat kematian bayi ini juga menjadi indikator yang diakui secara internasional untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara, kesehatan populasi negara tersebut, dan secara keseluruhan

menggambarkan bagaimana kondisi layanan kesehatan, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi¹⁶⁷.

Gambar 18. Grafik Persentase Kematian Bayi China Pada Tahun 2015 – 2017 (%)



Sumber: <https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN?end=2017&locations=CN-IN-US-ID-BR-PK-NG-BD&start=2015&view=chart>

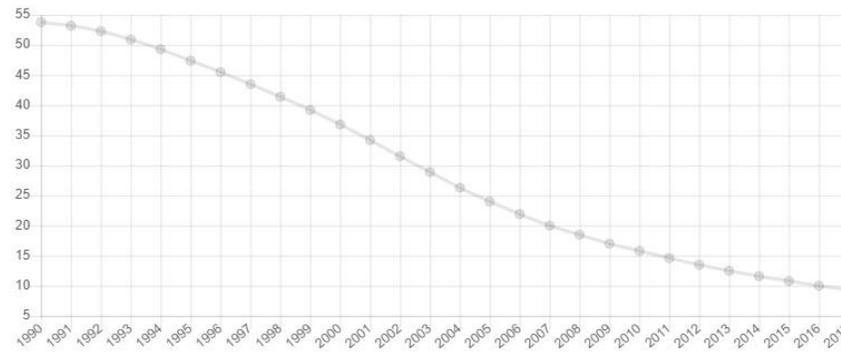
Gambar 18 diatas merupakan grafik dari tingkat kematian bayi yang ada di beberapa negara. Bisa dilihat bahwa, China merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kematian bayi paling rendah. Pada tahun 2015 tingkat kematian bayi di China sebesar 9,2% yang kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 8,5% dan

¹⁶⁷ NCBI, "Infant Mortality and Life Expectancy in China", diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3948891/> pada tanggal 12 November 2019.

kembali menurun pada tahun 2017 menjadi 7,9%. Menurut data diatas, China termasuk ke dalam kategori tingkat kematian bayi yang sangat rendah karena masih masuk diantara 0 – 9 %. Kemudian, dari tahun 1990 – 2017, tingkat kematian bayi yang ada di China terus mengalami penurunan, seperti yang bisa dilihat pada grafik dibawah ini:

Gambar 19. Grafik Tingkat Kematian Bayi di China pada tahun 1990 - 2017

Trends in under-five mortality rate



> For the most recent child mortality estimates, please visit childmortality.org

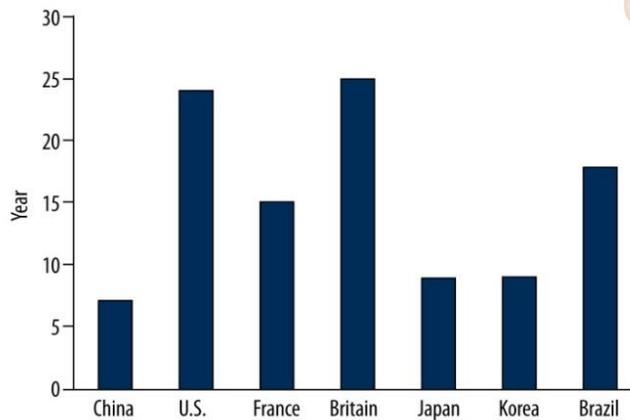
Sumber: <https://data.unicef.org/country/chn/>

Penurunan tingkat kematian bayi yang terus menurun pada setiap tahunnya tentu merupakan hasil dari upaya yang dilakukan Pemerintah China. China merupakan negara berkembang yang memiliki perkembangan sosio-ekonomi yang cukup pesat dari tahun 1980¹⁶⁸. Adapun upaya yang dilakukan seperti bergabungnya China dengan proyek *Millenium Development Goals* (MDGs), serta membuat sejumlah peraturan dan

¹⁶⁸ NCBI, *Op. Cit.*

regulasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak seperti *the Maternal and Infant Health Care Law of the PRC* pada tahun 1994¹⁶⁹.

Gambar 20. Grafik Jangka Waktu Yang Dibutuhkan Negara dalam Mengatasi Tingkat Kematian Bayi



Sumber: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3948891/>

Bisa dilihat pada gambar 20 diatas merupakan grafik dari jangka waktu yang dibutuhkan negara-negara dalam mengatasi permasalahan tingkat kematian bayi yang ada di negaranya. Berdasarkan grafik diatas, China merupakan negara dengan jangka waktu yang paling sedikit dalam mengatasi tingkat kematian bayi yaitu 7 tahun. Maka dari itu, bisa dilihat bahwa China merupakan salah satu negara yang paling cepat dalam menangani permasalahan ini dan upaya yang dilakukan terhadap permasalahan ini dapat dikatakan efisien dalam pengimplementasiannya.

Rendahnya tingkat kematian bayi yang ada di suatu negara tentunya didukung oleh sistem layanan kesehatan untuk masyarakatnya yang sangat baik. Dalam beberapa

¹⁶⁹ *Ibid.*

tahun terakhir, sistem layanan kesehatan di China meningkat dengan drastis dimana pada tahun 2000 hanya lebih dari 20% dari total penduduk di China yang terinsuransi untuk layanan kesehatannya, kemudian pada tahun 2011 hampir 95% dari total penduduk China sudah memiliki asuransi untuk layanan kesehatannya¹⁷⁰. Tingkat layanan kesehatan di Beijing setara dengan tingkat layanan kesehatan di beberapa kota Amerika seperti Hampshire dan California, kemudian juga layanan kesehatan yang ada di kota Mississippi, Amerika Serikat memiliki layanan kesehatan yang lebih rendah dari layanan kesehatan yang ada di 10 Provinsi di China¹⁷¹.

Pemerintah pusat China memiliki kewenangan secara utuh terkait peraturan kesehatan nasional, kebijakan, dan administrasinya¹⁷². Hal ini berdasarkan prinsip negara bahwa setiap penduduknya harus bisa menerima layanan kesehatan yang layak di tataran pemerintah daerah seperti provinsi, prefektur, kota, maupun kabupaten yang kemudian harus bisa memberikan fasilitas yang baik. Asuransi layanan kesehatan untuk publik ini dibiayai oleh negara. Pada tahun 2014, China mengalokasikan 5,6% dari GDP nya untuk layanan kesehatan, 30% dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah lokal, serta 38% dari perusahaan asuransi swasta atau donasi kesehatan sosial¹⁷³.

¹⁷⁰ China Power, "Is China's Health Care Meeting the Needs of its People", diakses melalui <https://chinapower.csis.org/china-health-care-quality/> pada tanggal 11 November 2019.

¹⁷¹ Hai Fang, "The Chinese Health Care System", diakses melalui <https://international.commonwealthfund.org/countries/china/> pada tanggal 11 November 2019.

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Ibid.

Bisa dilihat dari penjabaran diatas, dimana China sendiri sudah memiliki sistem layanan kesehatan publik yang memadai untuk memfasilitasi hampir seluruh penduduknya mulai dari alokasi dana dari pemerintah yang cukup besar untuk layanan kesehatan. Sistem layanan kesehatan yang sudah baik ini, menghasilkan rendahnya tingkat kematian yang ada di China. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa China memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup tinggi untuk penduduknya tinggal.

Apabila kita lihat dari sisi pelaku yaitu pembeli, korban *bride trafficking* ini kemudian dipaksa untuk memberikan keturunan kepada keluarga pelaku. Dengan layanan kesehatan yang sudah baik, maka akan membantu pelaku dalam memberikan keturunan atau anak yang sehat. Maka dari itu, pembeli pun tidak ragu akan kegagalan dalam mendapatkan keturunan dari korban *bride trafficking*. Maka dari itu, indikator ini dapat menjadi faktor penarik dari peningkatan *bride trafficking* ke China.

5.2.4 Food Production

China merupakan salah satu negara dengan populasi yang paling tinggi di dunia. China pernah menjadi salah satu negara yang dikategorikan sebagai *undernourished population*, yaitu menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)*, *undernourished population* didefinisikan sebagai kondisi individu yang tidak bisa mendapatkan cukup makanan untuk mengisi kebutuhan energy selama setahun, dan menjadi salah satu indikator kunci dari kelaparan kronis¹⁷⁴. Menurut FAO, China berhasil menurunkan tingkat *unmourished population* nya dari 23,9% di tahun 1990

¹⁷⁴ China Power, "How is China Feeding its Population of 1,4 Billion?", diakses melalui <https://chinapower.csis.org/china-food-security/> pada tanggal 12 November 2019.

menjadi 9,3% di tahun 2015¹⁷⁵. Keberhasilan dari pengurangan *unmourished population* ini tentunya didukung oleh peningkatan pendapatan per kapita di China yang mencapai 2.000%.

Pada tahun 1996, konsumsi hasil panen padi di China meningkat menjadi dua kali lipat dari 125 juta ton pada tahun 1975, menjadi 261 juta ton di tahun 2016¹⁷⁶. Peningkatan ini didukung oleh investasi yang didapatkan petani China sehingga berhasil memproduksi panen pokok yang tinggi, untuk mencukupi keseluruhan konsumsi pangan pokok, China hanya membutuhkan bantuan beberapa juta ton beras dan gandum per tahunnya.

Untuk konsumsi daging, China juga mengalami peningkatan konsumsinya dari 7 juta ton di tahun 1975 ke 75 juta ton di tahun 2017¹⁷⁷. Saat ini, penduduk China mengonsumsi 50 kilogram daging per kapita. Tingginya konsumsi daging ini menjadikan China sebagai negara yang mengonsumsi daging terbesar di dunia. Semakin tingginya pendapatan masyarakat kelas menengah di China, mengakibatkan perubahan konsumsi makanan dari yang berbasis makanan tradisional seperti beras, menjadi daging dan juga olahan susu.

Perubahan konsumsi makanan masyarakat China menyebabkan pemerintah China yang mengintensifkan produksi pertanian. Pada tahun 2012, Pemerintah China mengalokasikan subsidi untuk pertanian sebesar 165 Milyar US Dolar¹⁷⁸. Untuk sektor

¹⁷⁵ *Ibid.*

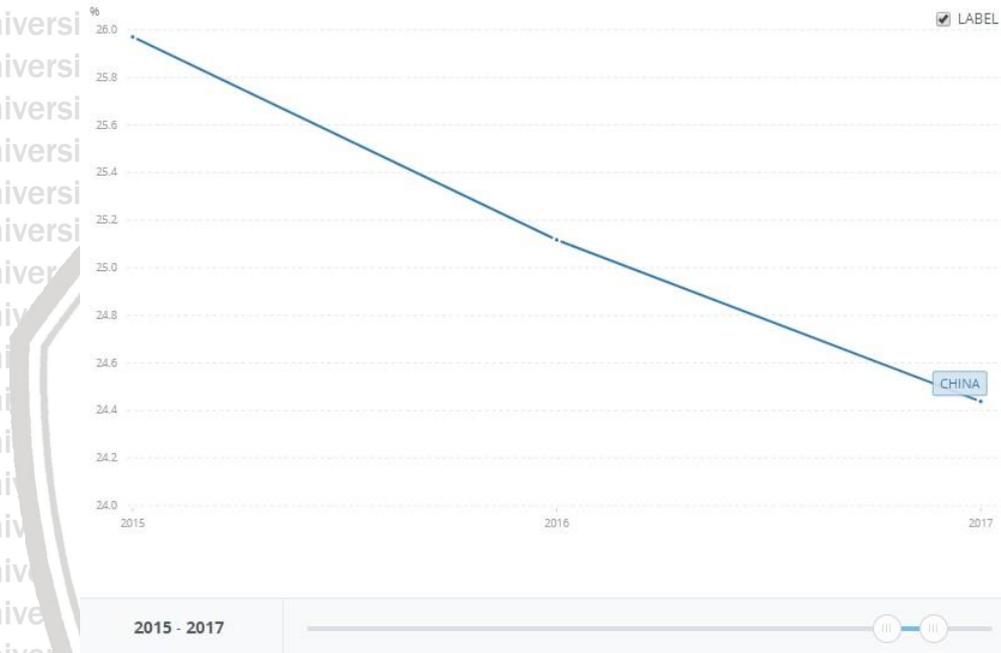
¹⁷⁶ *Ibid.*

¹⁷⁷ *Ibid.*

¹⁷⁸ *Ibid.*

perikanan, pada tahun 2016 FAO melaporkan bahwa China bertanggungjawab atas 60% industri perairan di dunia¹⁷⁹. Hal ini dilihat dari pasokan produksi ikan China ke dunia yang bernilai sebesar 20 milyar US Dolar¹⁸⁰.

Gambar 21. Grafik Persentase Populasi Perempuan China yang Bekerja di Bidang Pertanian Pada Tahun 2015 – 2017 (%)



Sumber:
<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?end=2017&locations=CN&start=2015&view=chart>

Apabila dilihat dari gambar diatas, persentase populasi perempuan China yang bekerja di bidang pertanian menurun dari tahun 2015 yaitu sebesar 25,97% kemudian tahun 2016 sebesar 25,117% dan terus menurun di tahun 2017 menjadi 24,438%¹⁸¹.

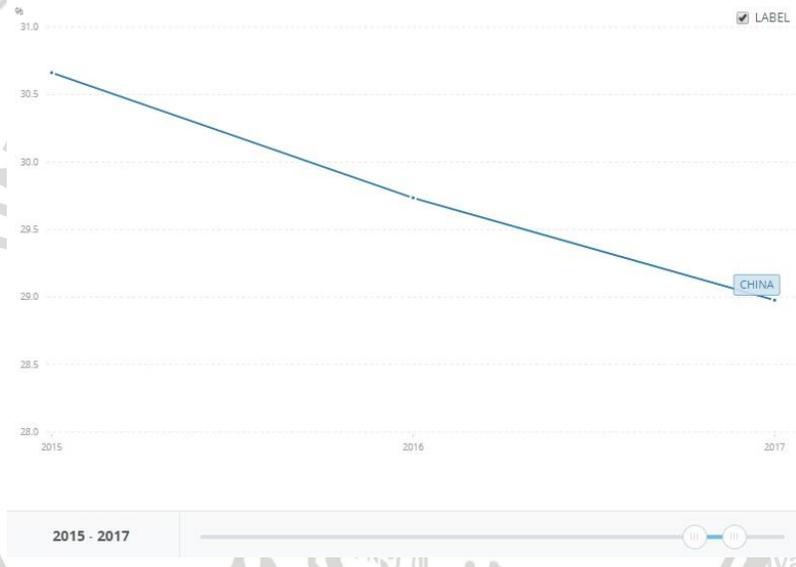
¹⁷⁹ Ibid.

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ World Bank, "Employment in Agriculture, female (% of female employment) (ILO estimate) – China" diakses melalui

Namun, apabila kita lihat dari gambar 22 dibawah persentase populasi laki-laki yang bekerja di bidang pertanian juga menurun dari tahun 2015 – 2017, dimana pada tahun 2015 sebesar 30,662% kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi 29,735% dan terus menurun hingga tahun 2017 menjadi 28,977%¹⁸². Meskipun persentase populasi kedua gender yang bekerja di bidang pertanian menurun, namun lebih banyak jumlah populasi laki-laki yang bekerja di bidang pertanian daripada perempuan.

Gambar 22. Grafik Persentase Populasi Laki-Laki China yang Bekerja di Bidang Pertanian Pada Tahun 2015 – 2017 (%)



Sumber:

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.MA.ZS?end=2017&locations=CN&start=2015>

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?end=2017&locations=CN&start=2015&view=chart> pada tanggal 7 Desember 2019.

¹⁸² World Bank, “*Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate) – China*”, diakses melalui <https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.MA.ZS?end=2017&locations=CN&start=2015> pada tanggal 7 Desember 2019.

Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan mengenai produksi pangan di China, bisa dikatakan bahwa China memiliki kekuatan di keseluruhan produksi pangan untuk konsumsi seluruh penduduknya. Tentunya hal ini menggambarkan bagaimana kesejahteraan ekonomi yang ada di China. Namun, apabila dilihat dari tingkat populasi pekerja China di bidang pertanian, lebih tinggi tingkat populasi laki-laki yang bekerja di bidang pertanian dibanding perempuan, sehingga penulis tidak dapat menyimpulkan bahwa tingkat produksi pangan di China menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya kasus *bride trafficking* ke China.

5.2.5 Energy Consumption

Menurut Bales, pada indikator ini juga menjadi salah satu gambaran bagaimana tingkat kesejahteraan yang ada di negara tujuan, semakin tinggi tingkat konsumsi energi yang ada di negara tersebut maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya sehingga menjadi faktor penarik bagi korban *human trafficking*.

Energi menjadi salah satu hal yang menyokong kehidupan manusia. Energi itu sendiri dibutuhkan untuk membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari seperti memproduksi makanan, transportasi, listrik, dan lain sebagainya. Tingkat konsumsi energi yang ada di negara-negara, tentunya berbeda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Disini bisa kita lihat bahwa tingkat konsumsi energi yang ada di suatu negara dapat menjadi gambaran bagaimana tingkat kesejahteraan yang ada di negara tersebut, karena semakin tinggi tingkat konsumsinya maka semakin banyak kebutuhan seperti listrik, dan transportasi itu harus dipenuhi.

Konsumsi energi yang ada di China itu sendiri memiliki pengaruh pada pertumbuhan ekonomi China. Tingkat konsumsi energi China sendiri terus meningkat drastis sejak tahun 2000 dan di prediksi akan terus meningkat beberapa dekade kedepan melihat pertumbuhan ekonomi di China yang juga terus meningkat¹⁸³. China sendiri memiliki 5 tipe energi primer yang dikonsumsi, yaitu batu bara, minyak, gas, nuklir, dan terbarukan¹⁸⁴. Kelima energi primer diatas digunakan untuk transportasi, industri, bangunan, dan lain sebagainya.

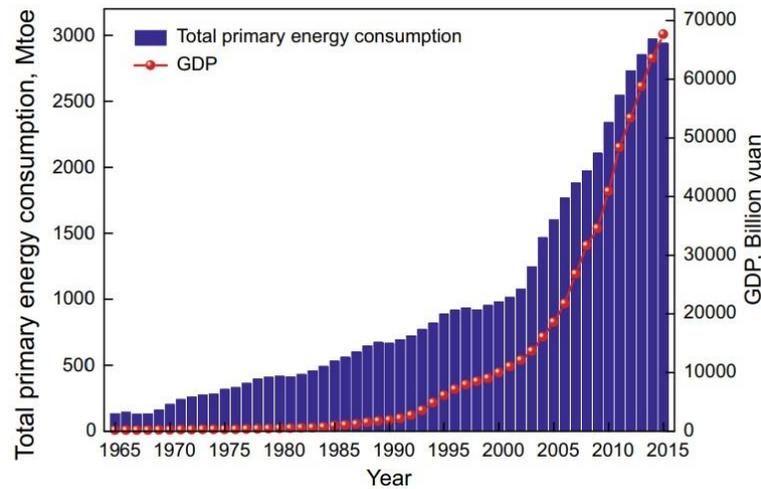
Menurut data statistik dari *International Energy Agency (IEA)*, *British Petroleum (BP)*, dan *National Bureau of Statistics of China (NBS)*, konsumsi energi China meningkat dari 131 juta ton minyak (Mtoe) pada tahun 1965 menjadi 3014 Mtoe di tahun 2015, dengan GDPnya yang juga meningkat dari 172 milyar yuan pada tahun 1965 menjadi 67,670 milyar yuan di tahun 2015¹⁸⁵.

¹⁸³ Kang-Yin Dong et al., "A Review of China's Energy Consumption Structure and Outlook Based On A Long Range Energy Alternatives Modeling Tool", 17 Desember 2016, *Petroleum Science*, Hal 214-227.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ *Ibid.*

Gambar 23. Grafik Tingkat Konsumsi Energi China pada Tahun 1965 - 2015



Sumber: BP Statistical Review of World Energy dan NBS China Statistical Yearbook

Menurut data yang diperoleh dari laporan tahunan *China Electric Power Planning and Engineering Institute*, total konsumsi energi yang dilakukan oleh China pada tahun 2017 adalah sebagai berikut¹⁸⁶; mencapai 4,64 milyar Mtoe batu bara, dimana merupakan peningkatan tahunan sebanyak 3,3%. Selanjutnya, untuk konsumsi energi seperti gas natural, *hydropower*, tenaga nuklir dan tenaga angin, terakumulasi sebesar 22,1% pada tahun 2017 tercatat terdapat peningkatan sebesar 1,3% setiap tahunnya. Untuk energi non-fosil mencapai 14,3% dimana terdapat peningkatan pertahunnya sebesar 0,5%. Dan, untuk batu bara China memproduksi 3,77 milyar ton dimana didapati peningkatan per tahunnya yang mencapai 5% sehingga menjadikan China sebagai negara importir gas natural terbesar di dunia.

¹⁸⁶ Zheng Xin, "China's Energy Consumption Hits Five Year Record", diakses melalui <https://www.chinadaily.com.cn/a/201904/28/WS5cc59903a3104842260b8ed7.html> pada tanggal 13 November 2019.

Selama setengah abad terakhir, perekonomian berbasis manufaktur di China sebagian besar berbahan bakar batu bara. Sejak tahun 1990 – 2015, konsumsi batu bara

China meningkat dari 1,05 milyar ton menjadi 3,97 milyar ton yang kemudian pada tahun 2016 bahan bakar utama China yaitu batu bara menjadi bahan bakar primer dengan jumlah total 62% dari total keseluruhan konsumsi energi di China¹⁸⁷.

Berdasarkan penjabaran diatas, bisa dilihat bahwa tingkat konsumsi energi yang ada di China masuk ke dalam kategori tinggi. Dimana dari produksi dan penggunaannya terdapat peningkatan yang terus menerus setiap tahunnya mengikuti pertumbuhan ekonominya. Kemudian, korban *bride trafficking* ini dijual dengan estimasi harga 3.000 – 13.000 US Dolar, dimana pembelinya sebagian besar berasal dari daerah-daerah pedesaan China Utara seperti Provinsi Yunnan. Kemudian bisa kita lihat bahwa kesejahteraan ekonomi ini juga berada di penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dimana mereka masih mampu untuk membeli korban *bride trafficking*. Maka dari itu, indikator ini dapat menjadi faktor penarik peningkatan *bride trafficking* ke China.

¹⁸⁷ China Power, "How Is China's Energy Footprint Changing?", diakses melalui <https://chinapower.csis.org/energy-footprint/> pada tanggal 13 November 2019.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai kasus peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015 – 2017 dengan menggunakan teori *human trafficking* oleh Kevin Bales, penulis menemukan bahwa dari kedua variabel yang ada, hanya beberapa indikator yang ada di dalamnya yang menjadi faktor pendukung dari peningkatan kasus *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015 – 2017.

Pada variabel pertama, yaitu *Trafficking FROM a Country*, penulis menemukan bahwa 5 dari 6 indikator yang ada berkorelasi dengan peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015 – 2017. Keempat indikator tersebut adalah *government corruption, infant mortality, food production, population pressure, dan conflict and social unrest*. Pada indikator *government corruption*, ditemukan bahwa praktek korupsi marak dilakukan oleh polisi dan petugas yang berjaga di daerah perbatasan Myanmar dengan China. Dimana daerah perbatasan tersebut dikontrol oleh KIO, kemudian hubungan dan komunikasi antara KIO dan Pemerintah Myanmar juga tidak begitu baik sehingga pengawasan yang ada pada daerah perbatasan tersebut tidak dilakukan secara maksimal. Dibuktikan dengan masih banyaknya celah yang dapat digunakan pelaku *bride trafficking* untuk memindahkan korban ke China, dan juga praktek suap masih dapat dilakukan kepada pihak kepolisian atau petugas yang berjaga.

Pada indikator *infant mortality*, dapat kita lihat bahwa tingkat kematian bayi yang ada di Myanmar pada tahun 2015 – 2017 masih masuk ke dalam kategori tinggi. Tingginya tingkat kematian bayi ini juga disebabkan oleh masih kurang baiknya layanan kesehatan bagi penduduk Myanmar, dimana hanya sebesar 2% GDP yang dialokasikan Pemerintah Myanmar untuk layanan kesehatan. Dari kondisi ini, bisa kita lihat bahwa Myanmar memiliki tingkat kesejahteraan ekonomi yang rendah. Kondisi ini lah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku *bride trafficking*. Pada indikator *food production*, ditemukan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi perekonomian Myanmar. Namun, tingkat populasi perempuan Myanmar yang bekerja di bidang pertanian lebih rendah daripada laki-laki. Penulis menemukan bahwa perlakuan pemerintah dan masyarakat Myanmar terhadap pekerja laki-laki dan perempuan berbeda, hal ini dibuktikan dengan upah atau gaji yang didapatkan perempuan lebih rendah daripada laki-laki, dan peraturan-peraturan nya masih lebih menguntungkan laki-laki. Kondisi ini lah kemudian yang dimanfaatkan pelaku *bride trafficking* untuk menghasut korban, dengan menjanjikan pekerjaan di bidang pertanian dengan upah yang lebih tinggi. Pada indikator *population pressure*, dari tahun 2015 – 2017 tingkat populasi Myanmar yang tidak bekerja mengalami peningkatan, dan sebagian besarnya adalah perempuan. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku *bride trafficking* dengan menjanjikan pekerjaan di China dengan upah yang lebih baik. Dan, pada indikator *conflict and social unrest*, konflik internal yang terjadi antara Pemerintah Myanmar dengan kelompok etnis bersenjata menyebabkan ratusan ribu penduduk daerah etnis berpindah tempat dan terlantar sehingga Pemerintah Myanmar dan KIO mendirikan kamp-kamp IDP. Namun, kehidupan di kamp ini juga tidak begitu

baik, sehingga banyak keluarga yang berpisah demi mencari uang untuk menghidupi keluarganya. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban *bride trafficking*, banyak pelaku *bride trafficking* yang mengambil perempuan-perempuan untuk dijual di kamp-kamp IDP ini karena kondisi kemiskinan yang mendesak.

Sedangkan untuk indikator yang tidak menjadi faktor peningkatan *bride trafficking* pada variabel ini ada pada indikator *% of Population Below Age 14*. Pada indikator ini ditemukan bahwa jumlah anak-anak yang berusia dibawah 14 tahun sudah bekerja karena kehidupan ekonomi keluarga yang kekurangan. Kondisi kemiskinan ini pula yang menyebabkan banyak kasus keluarga korban menelantarkan, menjual, dan menikahkan korban secara paksa karena keluarga tidak sanggup menghidupi korban. Namun, faktanya pada tahun 2015 – 2017 persentase populasi anak yang berumur di bawah 14 tahun menurun, sehingga penulis tidak menemukan korelasi dengan peningkatan *bride trafficking*.

Di variabel kedua, yaitu *Trafficking TO a Country*, penulis melihat dari negara China sebagai negara destinasi dari *bride trafficking*. Terdapat 5 indikator yang ada di dalam variabel ini, yaitu *% of Male Population Age 60+*, *government corruption*, *infant mortality*, *food production*, dan *energy consumption*. Dari 5 indikator, 4 indikator diantaranya yang menjadi faktor pendukung peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China pada tahun 2015 – 2017, yaitu *% of Male Population Age 60+*, *government corruption*, *infant mortality*, dan *energy consumption*. Pada indikator *% of Male Population Age 60+*, penulis menemukan bahwa jumlah populasi pekerja yang ada di China lebih tinggi daripada populasi lansianya. Menurut Bales, pada indikator

ini apabila populasi lansia yang ada di negara destinasi tinggi, maka hal tersebut menciptakan kebutuhan akan jasa korban *human trafficking* untuk mengambil pekerjaan dengan keterampilan rendah. Namun, diketahui kemudian bahwa banyak dari korban *bride trafficking* ini selain dinikahkan dan diminta untuk memberikan keturunan, namun mereka juga dipekerjakan sebagai buruh di tempat pekerjaan milik keluarga pembeli, seperti ladang pertanian, dan pekerjaan rumah tangga. Korban pun tidak digaji atas pekerjaan mereka. Maka dari itu, penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator ini dapat menjadi faktor pendukung dari peningkatan *bride trafficking* dari Myanmar ke China. Pada indikator *government corruption*, penulis menemukan bahwa praktek korupsi juga marak terjadi di pihak penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan. Performa polisi di China dalam menangani kasus *bride trafficking* ini juga tidak maksimal, polisi masih menerima suap untuk membebaskan korban dan memberikan akses pelaku *trafficking* untuk melewati batas negara. Proses pengadilan pun berjalan dengan lambat, hanya sedikit kasus yang sampai pada pengadilan namun kemudian tidak ada kejelasan apakah pelaku diadili dengan diberi hukuman atau tidak. Pada indikator *infant mortality*, ditemukan bahwa China merupakan salah satu negara dengan tingkat kematian bayi yang paling rendah di dunia, hal ini di dukung juga dengan sistem layanan kesehatan untuk penduduk yang sudah baik. Dengan layanan kesehatan yang sudah baik, maka akan membantu pembeli korban *bride trafficking* dalam memberikan keturunan atau anak yang sehat. Maka dari itu, pembeli pun tidak ragu akan kegagalan dalam mendapatkan keturunan dari korban *bride trafficking*. Dan, pada indikator *energy consumption per capita*, ditemukan bahwa tingkat konsumsi energi yang ada di China terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonominya.

Hal ini menggambarkan bagaimana kesejahteraan ekonomi yang ada di China, yang kemudian penduduknya mampu untuk membeli korban *bride trafficking*, dilihat dari sebagian besar pembeli korban *bride trafficking* berasal dari daerah pedesaan China di utara seperti Provinsi Yunnan.

Sedangkan 1 indikator *food production* tidak menjadi faktor penarik peningkatan *bride trafficking*. Tingkat produksi makanan yang ada di China masuk ke dalam kategori tinggi, dimana bisa dikatakan bahwa China memiliki kekuatan di keseluruhan produksi pangan untuk konsumsi seluruh penduduknya. Namun, pada sektor pertaniannya, lebih tinggi jumlah populasi laki-laki yang bekerja di sektor pertaniannya daripada perempuan sehingga penulis tidak dapat menyimpulkan bahwa tingkat produksi pangan di China menjadi salah satu faktor pendukung meningkatnya kasus *bride trafficking* ke China.

6.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah untuk pemerintah Myanmar dan Pemerintah China membuat upaya dalam memberantas kasus *bride trafficking* secara khusus. Pentingnya upaya penanganan secara khusus terhadap kasus *bride trafficking* ini dikarenakan selama ini penanganannya menggunakan metode dan upaya yang sama dengan menangani *human trafficking* seperti biasa. Sehingga, dalam penanganannya dapat dikatakan masih kurang efektif. Kemudian, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat oleh Pemerintah Myanmar dan Pemerintah China terhadap daerah perbatasannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Lamont, Christopher. 2014. *Research Methods in International Relations*. London: SAGE Publications.

Satori, Dja'man dan Aan Komariah. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

ONLINE

Bales, Kevin. (2006). *Testing a Theory of Human Trafficking*. Diakses melalui http://lastradainternational.org/lsidocs/bales_test_theory_0607.pdf.

Bales, Kevin. (2007). What Predicts Human Trafficking?. *International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, Vol.3, Issue 2*. 269-279. Diakses melalui <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01924036.2007>.

Barr, Heather. (2019) *It's A Booming Business: Trafficking Myanmar Brides in China*. Diakses melalui <https://www.hrw.org/news/2019/03/21/its-booming-business-trafficking-myanmar-brides-china> pada tanggal 26 Agustus 2019.

Beyrer, Chris. (2001). Shan Women and Girls and the Sex Industry in Southeast Asia: Political Causes and Human Rights Implications. *Social Science & Medicine*, 543-550. Diakses melalui <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0277953600003580> pada tanggal 3 November 2019.

Capabianco, P. Theory of Human Trafficking Applied to the Case of Japan. *Virginia Review of Asian Studies*. Diakses melalui <http://uiowa.academia.edu/PaulCapobianco>.

China Power. *How Does Corruption Hinder China's Development*. Diakses melalui <https://chinapower.csis.org/china-corruption-development/> pada tanggal 11 November 2019.

China Power. *How is China's Energy Footprint Changing?*. Diakses melalui <https://chinapower.csis.org/energy-footprint/> pada tanggal 13 November 2019.

China Power. *How is China Feeding its Population of 1,4 Billion?*. Diakses melalui <https://chinapower.csis.org/china-food-security/> pada tanggal 12 November 2019.

China Power. *Is China's Health Care Meeting the Needs of its People*. Diakses melalui <https://chinapower.csis.org/china-health-care-quality/> pada tanggal 11 November 2019.

Chu, Cindy Yik-Yi. (2010). Human Trafficking and Smuggling in China. *Journal of Contemporary China*. Diakses melalui <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10670564.2011.520842> pada tanggal 30 Oktober 2019.

Crothers, Lauren. (2016) *China, Cambodia Urged to Tackle Forced Marriage Problem*. Diakses melalui <https://www.aa.com.tr/en/anadolu-post/china-cambodia-urged-to-tackle-forced-marriage-problem/637292> pada tanggal 11 September 2019.

Dong, Kang-Yin & et al. (2016). A Review of China's Energy Consumption Structure and Outlook Based On A Long Range Energy Alternatives Modeling Tool. *Petroleum Science*. Diakses melalui <https://link.springer.com/article/10.1007/s12182-016-0136-z>.

Empower People. *Bride Trafficking*. Diakses melalui <http://www.empowerpeople.org.in/bride-trafficking.html> pada tanggal 3 November 2019.

Fang, Hai. *The Chinese Health Care System*. Diakses melalui <https://international.commonwealthfund.org/countries/china/> pada tanggal 11 November 2019.

FAO. *Women, the Unsung Heroes of Myanmar's Agriculture Economy*. Diakses melalui <http://www.fao.org/myanmar/news/detail-events/en/c/385218/> pada tanggal 30 November 2019.

Feingold, David A. (2013). *The Burmese Traffic-Jam Explored: Changing Dynamics and Ambiguous Reforms*. *Cultural Dynamics*, 207-227. Diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0921374013498137?icid=int.sj-full-text.similar-articles.3&journalCode=cnya> Pada tanggal 28 Oktober 2019.

Frontier. *Report Shines Spotlight on 'Unspeakable Abuse' of Trafficked Women*. diakses melalui <https://frontiermyanmar.net/en/report-shines-spotlight-on-unspeakable-abuse-of-trafficked-women> pada tanggal 26 November 2019.

GAN Integrity. *China Corruption Report*. diakses melalui <https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/china/> pada tanggal 11 November 2019.

Girls Not Brides. *Myanmar*. diakses melalui <https://www.girlsnotbrides.org/child-marriage/myanmar/> pada tanggal 5 Desember 2019.

Han, Seunghyun. (2017). *Human Trafficking and Ethnic Minority Problems in Myanmar. Policy Recommendations for Myanmar and Neighboring Countries*. Diakses melalui http://publicspherejournal.com/wp-content/uploads/2017/03/PSJ17_Article04.pdf.

Harris, Ebrahim., & Latiff, Rozanna. (2017). *Sold Into Marriage – how Rohingya Girls Become Child Brides in Malaysia*. Diakses melalui <https://www.reuters.com/article/uk-myanmar-rohingya-childbrides-insight-idUSKBN15U009> pada tanggal 10 Oktober 2019.

Human Rights Watch. *Give Us A Baby and We'll Let You Go*. Diakses dari <https://www.hrw.org/report/2019/03/21/give-us-baby-and-well-let-you-go/trafficking-kachin-brides-myanmar-china> pada tanggal 25 Agustus 2019.

IMF. *A Hidden Scourge*. Diakses melalui

<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2018/09/pdf/human-trafficking-in-southeast-asia-caballero.pdf> pada tanggal 28 November 2019.

International Labour Organization. *Child Labour in Myanmar*. Diakses melalui

<https://www.ilo.org/yangon/areas/childlabour/lang--en/index.htm> pada tanggal 10 November 2019.

Johns Hopking Bloomer School of Public Health and KWAT Report. 2018.

Estimating Trafficking of Myanmar Women for Forced Marriage and Childbearing in China. Diakses melalui

https://www.jhsph.edu/departments/international-health/news/_publications/Myanmar-forced-marriage-report-embargoed-until-07-Dec-2018.pdf.

Kachin's Women's Association Thailand. *Burma's Covered Up War: Atrocities Against the Kachin People*. Diakses melalui

<https://burmacampaign.org.uk/reports/burmas-covered-up-war-atrocities-against-the-kachin-people/> pada tanggal 24 Agustus 2019.

Kamler, Erin M. *Women of the Kachin Conflict: Trafficking and Militarized Femininity on the Burma-China Border*. Diakses melalui

http://www.burmalibrary.org/docs21/Kamler-2015_Women_of_the_Kachin_Conflict,_Trafficking_and_Militarized_Femininity_on_the_Burma-Chin_Border-en.pdf pada tanggal 23 Agustus 2019.

Kelin, C., & College, D. (2012). Slaves of Sex: Human Trafficking in Myanmar and the Greater Mekong Region. *Righting Wrongs A Journal of Human Rights*, Vol. 2., Issue 1. Diakses melalui <http://blogs.webster.edu/humanrights/files/Slaves-of-Sex.pdf> pada tanggal 3 November 2019.

Linm, Thein. *Myanmar and China Ink Human Trafficking Agreement in Beijing*. diakses melalui <https://www.mmtimes.com/national-news/5850-myanmar->

and-china-ink-human-trafficking-agreement-in-beijing.html pada tanggal 4 November 2019.

Myint, Jack. *The Truth About Myanmar's New Ceasefire Agreement*. Diakses melalui <https://thediplomat.com/2015/10/the-truth-about-myanmars-new-ceasefire-agreement/> pada tanggal 1 Desember 2019.

NCBI. *Infant Mortality and Life Expectancy in China*. Diakses melalui <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3948891/> pada tanggal 12 November 2019.

Ng, Desmond. (2019). *Raped, Beaten, and Sold in China: Vietnam's Kidnapped Young Brides*. Diakses melalui <https://www.channelnewsasia.com/news/cnainsider/vietnam-kidnapped-brides-trafficking-china-wives-11777162> pada tanggal 11 September 2019.

Ni, Jane. (2015). *Selling Bodies and Souls: Human Sex Trafficking in China*. New York: University of Albany. Diakses melalui https://www.albany.edu/honorscollege/files/Ni_Thesis.pdf.

Pimoljinda, P., & Thianthong, A. (2010). Human Trafficking in Burma and the Solutions Which Have Never Reached. *Journal of Asia Pasific Studies, Vol. 1 No.3*. 524-544. Diakses melalui <https://www.japss.org/upload/6.%20pimoljinda.pdf>.

Pletcher, Kenneth. *One Child Policy*. diakses melalui <https://www.britannica.com/topic/one-child-policy> pada tanggal 7 September 2019.

Shobert, Benjamin. *Healthcare in Myanmar*. Diakses melalui <https://www.forbes.com/sites/benjaminshobert/2013/08/19/healthcare-in-myanmar/#4fb0d2d96142> pada tanggal 6 November 2019.

Thar, Hein. *Government Seeks to Tame Hlaing Tharyar, Yangon's Wild West*. Diakses melalui <https://frontiermyanmar.net/en/government-seeks-to-tame-hlaing-tharyar-yangons-wild-west> pada tanggal 28 November 2019.

The ASEAN Post. (2019) *Myanmar's Trafficked Brides*. Diakses melalui <https://theaseanpost.com/article/myanmars-trafficked-brides> pada tanggal 11 September 2019.

The Guardian. *Can China Recover from It's Disastrous One Child Policy?*. Diakses melalui <https://www.theguardian.com/world/2019/mar/02/china-population-control-two-child-policy> pada tanggal 7 September 2019.

The Irrawaddy. *A Chronology of Myanmar's Kachin Conflict*. Diakses melalui <https://www.irrawaddy.com/news/military/chronology-kachin-conflict.html> pada tanggal 30 Agustus 2019.

Thein, Minn San & Oo, Khin Mar. *Creating Enabling Environments for Nutrition-Sensitive Food and Agriculture to Adress Malnutrition*. Diakses melalui http://www.fao.org/fileadmin/templates/rap/files/meetings/2017/170330_sesi0n4_1_Myanmar.pdf pada tanggal 10 November 2019.

The Jakarta Post. (2016) *Vietnam Faces Growing Human Trafficking to China*. Diakses melalui <https://www.thejakartapost.com/seasia/2016/10/24/vietnam-faces-growing-human-trafficking-to-china.html> pada tanggal 6 September 2019.

Trang, Madelene. *Trafficking Women in China: Is Gender A Defining Vulnerability Factor?*. Diakses melalui <https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/3813870> pada tanggal 27 Oktober 2019.

Transparency International. *Myanmar*. Diakses melalui <https://www.transparency.org/country/MMR> pada tanggal 6 November 2019.

Transparency International. *China*. Diakses melalui <https://www.transparency.org/country/CHN> pada tanggal 11 November 2019.

Transparency International. *Overview of Corruption and Anti-Corruption in Myanmar*. Diakses melalui <https://knowledgehub.transparency.org/helpdesk/overview-of-corruption-and-anti-corruption-in-myanmar> pada tanggal 4 November 2019.

UN-ACT. *Myanmar*. Diakses melalui <http://un-act.org/myanmar/> pada tanggal 17 September 2019.

UNFPA Myanmar. *New Census Report Reveals Alarming High Child Death in Districts: in Laboutta, One in Six Boys Die Before Their Fifth Birthday*.

UNHCR. *Internally Displaced Person*. Diakses melalui

<https://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html> pada tanggal 25 Agustus 2019. Diakses melalui <https://myanmar.unfpa.org/en/news/new-census-report-reveals-alarmingly-high-child-death-districts-labutta-one-six-boys-die-their> pada tanggal 25 November 2019.

UNICEF. *Myanmar: Maternal and Newborn Health Disparities*. Diakses melalui file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/country%20profile_MMR.pdf pada tanggal 25 November 2019.

UNODC. *Emerging Crimes*. Diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/emerging-crimes.html> pada tanggal 4 September 2019.

UNODC. *Economic Fraud and Identity-Related Crime*. Diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/identity-related-crime.html> pada tanggal 4 September 2019.

UNODC. *Forced Marriage*. Diakses melalui <https://www.unodc.org/e4j/en/tip-and-som/module-11/key-issues/som-or-tip---forced-marriage.html> pada tanggal 11 September 2019.

UNODC. *Global Report on Trafficking in Persons*. Diakses melalui <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-persons.html> pada tanggal 29 Oktober 2019.

UN WOMEN. *Tackling Human Trafficking in Myanmar*. diakses melalui <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2019/1/feature-tackling-human-trafficking-in-myanmar> pada tanggal 4 November 2019.

Win, Thin Lei. *Myanmar is Still the Third-Most Malnourished Country in Southeast Asia*. Diakses melalui <https://www.mmtimes.com/national-news/18665-myanmar-is-still-the-third-most-malnourished-country-in-southeast-asia.html> pada tanggal 11 November 2019.

World Bank. *Employment in Agriculture, female (% of female employment) (ILO estimate)* – *China*. Diakses melalui

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.FE.ZS?end=2017&locations=CN&start=2015&view=chart> pada tanggal 7 Desember 2019.

World Bank. *Employment in agriculture, male (% of male employment) (modeled ILO estimate)* — *China*. Diakses melalui

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.MA.ZS?end=2017&locations=CN&start=2015> pada tanggal 7 Desember 2019.

World Bank. *Myanmar: Analysis of Farm Production Economics*. Diakses melalui

<https://www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar-analysis-of-farm-production-economics> pada tahun 10 November 2019.

World Bank. *Population Age 0 – 14, female (% of female population)*. Diakses melalui

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.FE.ZS?end=2017&location_s=MM&start=2015 pada tanggal 27 November 2019.

World Bank. *Population Age 0 – 14, male (% of male population)*. Diakses melalui

<https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.0014.MA.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015> pada tanggal 27 November 2019.

World Bank. *Unemployment, female (% of female labor force) (modeled ILO estimate)*.

Diakses melalui

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.FE.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015> pada tanggal 28 November 2019.

World Bank. *Unemployment, Male (% of male labor force) (modeled ILO estimated)*.

Diakses melalui

<https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.MA.ZS?end=2017&locations=MM&start=2015> pada tanggal 28 November 2019.

World Population Review. *China Population 2019*. Diakses melalui

<http://worldpopulationreview.com/countries/china-population> pada tanggal 6 September 2019.

World Population Review. *Myanmar Population 2019*. Diakses melalui

<http://worldpopulationreview.com/countries/myanmar-population/> pada tanggal 23 Agustus 2019.

Xin, Zheng. *China's Energy Consumption Hits Five Year Record*. Diakses melalui <https://www.chinadaily.com.cn/a/201904/28/WS5cc59903a3104842260b8ed7.html> pada tanggal 13 November 2019.

Yakupitiyage, Tharanga. *Myanmar and China's Bride Trafficking Problem*. Diakses melalui <https://www.mmtimes.com/news/myanmar-and-chinas-bride-trafficking-problem> pada tanggal 1 November 2019.

Zhao, Gracie Ming. (2003). *Trafficking of Women for Marriage in China*. SAGE Publications, Vol. 3(1). Diakses melalui <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1466802503003001457> pada tanggal 3 November 2019.

